

1. ARMED FORCES

2. DEMOCRACY

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TS 07/02
Cho
m

TESIS

MILITER DAN GERAKAN PRODEMOKRASI:

... Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan
Prodemokrasi Di Indonesia (1990 – 1998)



Oleh:

CHOLISIN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

MILITER DAN GERAKAN PRODEMOKRASI:

**Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan
Prodemokrasi Di Indonesia (1990 – 1998)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu – Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**



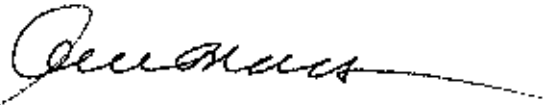
Oleh :

**CHOLISIN
NIM.099712710 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 Februari 2002

Pembimbing



Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D.
NIP. 130701133

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., MA.
NIP. 130937724

Telah diuji pada
Tanggal 7 September 2001

PANITIA PENGLUJI TESIS

Kelua : Dr. Laurentius Dyson P., M.A.
Anggota : 1. Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.
 2. Drs. Priyatmoko, M.A.
 3. Drs. Haryadi, M.Si
 4. Drs. Gitadi Tegas, M.Si.

***“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf
dan mencegah dari yang munkar,
merekalah orang – orang yang beruntung”***

(Surat 3 (Ali Imran) ayat 104)

***Dipersembahkan kepada :
Semua yang berjuang demi demokrasi dan
ibuku dan ayahku Chamidah dan Machfudz Amin serta
ibu mertuaku Hj. Suwarsilah.***

KATA PENGANTAR

Pertama – tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Saya ucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek PGSM yang telah memberikan bantuan finansial, sehingga meringankan beban dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. dr. Soedarto atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang hingga pertengahan pendidikan dijabat Prof. Dr. dr. Soedjono yang kemudian dijabat Prof. Dr. dr. Muhammad Amin atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ketua Program Studi Ilmu – Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti , MA., Ph.D., yang hingga pertengahan pendidikan kemudian dijabat Dr. Laurentius Dyson., MA., atas persetujuannya untuk mengembangkan penelitian tesis ini.

Rektor IKIP Yogyakarta Prof. Dr. Djohar, MS., yang hingga pertengahan pendidikan kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan sebagai Rektor-nya dijabat Prof. Suyanto, MA., Ph.D., atas kesempatan yang berikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program Magister.

Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta Prof. Dr. Soenarto HS., MS. (Alm.) yang hingga pertengahan pendidikan kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan sebagai Dekan-nya dijabat Drs. M. Subardi, M.Pd., atas pemberian ijin untuk mengikuti pendidikan program Magister.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya saya ucapkan kepada Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., sebagai pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan masukan pemikiran – pemikiran yang sangat tajam dan kritis, sehingga saya merasa lebih tercerahkan dalam penyusunan tesis ini.

Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA., Dr. Laurentius Dyson P., MA., Dede Oetomo, MA., Ph.D., Drs. Priyalmoko, MA., atas segala saran – saran yang sangat berharga bagi penyempurnaan proposal penelitian dan penyusunan tesis ini. Kepada Prof. Soetandyo, juga diucapkan terimakasih atas berkenan meminjamkan buku yang sangat membantu untuk menambah informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Drs. Haryadi M.Si., diucapkan terimakasih atas informasi dan diskusinya ketika penyusun mengikuti perkuliahan Ekonomi – Politik Pembangunan yang sangat banyak membantu untuk memahami kajian perspektif ekonomi – politik yang digunakan dalam penelitian ini.

Terimakasih juga disampaikan kepada Letnan Jenderal Syamsul Maarif (Mantan Kapuspen ABRI dan Gubernur Akmil) di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR dan kegiatan untuk menyelesaikan studinya di Pascasarjana Universitas Airlangga atas kesediannya untuk berdiskusi dan memberikan komentar hasil penelitian ini. Diskusi dan komentar yang diberikan sebelum penyusun mempertanggungjawabkan hasil penelitian ini di depan dewan penguji sangat bermanfaat untuk memahami pandangan salah seorang petinggi militer tentang hasil penelitian ini yang tampaknya tidak akan berbeda secara substansial dengan pandangan petinggi militer yang lain. Hal ini tentunya merupakan

informasi yang penting untuk memahami posisi hasil penelitian ini di kalangan militer.

Rekan – rekan staf pengajar pada Jurusan /Program Studi PPKn FIS Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberi dorongan untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kedua orang tuaku Chamidah dan Machfudz Amin dan Ibu mertuaku Hj. Suwarsilah atas do'a restu mereka telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Pedampingku yang setia Sri Wahyuningsih dan anak-anakku tercinta Muh. Fahmi Nugroho, Karlmah Nur Filria (Alm.) dan Asfi Hanifah, merekalah yang telah memberikan semangat yang sangat kuat untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu di sini atas segala bantuannya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Akhirnya penyusun mengharapkan tesis ini ada setitik manfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan, khususnya ilmu – ilmu sosial.

Surabaya, 25 Januari 2002

Penyusun,



Cholisin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang kecenderungan pola respon dan mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990 – 1998 (lengsemnya Soeharto) bersifat negatif (represif), padahal ketika itu mulai meningkatnya aktivitas gerakan prodemokrasi dan berkembangnya pemikiran akan perlunya mengembangkan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif – analitis juga bisa disebut sebagai penelitian *content analysts*. Unit analisis berupa berita (peristiwa) yang menggambarkan respon militer terhadap gerakan prodemokrasi dan unit referennya berupa rangkaian kata atau kalimat yang menunjukkan sesuatu yang mempunyai arti yang dapat dimasukkan dalam pengertian dan bentuk respon. Militer dalam hal ini dibatasi pada para petinggi Angkatan Darat yang menduduki jabatan strategis dan atau yang memiliki pengaruh yang kuat di kalangan Angkatan Darat, baik yang masih aktif maupun yang telah purnawirawan dan yang berkelompok dalam faksi “merah putih” maupun faksi “hijau”. Sedangkan gerakan prodemokrasi dibatasi pada pembangkangan elite, elite partai politik non-pemerintah (PPP, PDI, PRD dan PUDI), intelektual secara individual dan kelompok, aktivis mahasiswa, LSM prodemokrasi dan HAM dan perpolitikan kelas bawah (kaum buruh dan petani). Prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi dilakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap sumber informasi yang telah ditentukan yakni : buku (*literature*), dokumen resmi, jurnal ilmiah, makalah seminar, majalah, tabloid dan surat kabar. Metoda analisis yang digunakan adalah *hermeneutis*, yakni menafsirkan atau menginterpretasi data dengan perspektif ekonomi politik politisisme atau politik sebagai panglima (PSP) dan perspektif dalam lingkungannya yakni “R-S” (*rent seeking*) dan “akumulasi kekuasaan sebagai modal utama berbisnis”.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990-1998 berpola represif dalam bentuk yang bervariasi dari bentuk langsung (intimidasi, penganiayaan, penculikan dan pembunuhan) sampai pada bentuk *subtle* (konfrontatif, intervensi, pendeskreditan, pelarangan melakukan aktivitas, pencekalan dan penjejalan). Dan juga menunjukkan kecenderungan tidak adanya perbedaan antara respon militer yang masih aktif – purnawirawan, faksi “hijau”- “merah putih”. Respon militer yang berpola represif tersebut, karena untuk melindungi kepentingan politiknya yang menjadi modal utama bagi perlindungan dan pengembangan kepentingan ekonominya.

Kata kunci : Respon, Militer, Prodemokrasi.

DAFTAR ISI

	.Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENENTUAN PANITIA PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Masalah Penelitian	7
C.Tujuan Penelitian	8
D.Manfaat Penelitian	8
BAB II. PERSPEKTIF TEORI	9
A.Perspektif Organisasi Militer	12
B.Perspektif Neo-Patrimonial	16
C.Perspektif Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer.....	19

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Unit Analisis.....	27
C. Jenis Informasi dan Sumber Informasi.....	28
D. Prosedur yang Digunakan Untuk Memperoleh Informasi...	31
E. Kredibilitas dan Transferabilitas Informasi.....	32
F. Penyajian Data.....	32
G. Analisis Data.....	33
BAB IV. DINAMIKA MILITER DALAM POLITIK DAN EKONOMI DAN GERAKAN PRODEMOKRASI PADA ERA ORDE BARU (1966 – 1980-AN).....	34
A. Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1945 – 1966	34
1. Keterlibatan Militer dalam Politik 1945 – 1965	35
2. Keterlibatan Militer dalam Ekonomi 1945 – 1965	44
E. Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1966 – 1980-an	48
1. Format Politik Orde Baru	48
2. Keterlibatan Militer dalam Politik 1966-1980-an	53
3. Keterlibatan Militer dalam Ekonomi 1966 –1980-an...	59
C. Dinamika Gerakan Prodemokrasi 1966 – 1980-an.....	67

BAB V. RESPON MILITER TERHADAP GERAKAN	
PRODEMOKRASI (1990 – 1998)	78
A. Keterlibatan Militer dalam Politik : Konsolidasi dan	
Kegamangan Menghadapi Perubahan	78
B. Bisnis Militer di Tengah Kesenjangan dan	
Krisis Ekonomi	90
C. Partisipasi Politik Arus Bawah : Investasi dan Kekuatan	
Demokratisasi	98
D. Respon Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi.....	107
1. Respon terhadap Pembangkang Elite	107
a. Respon terhadap Petisi 50	108
b. Respon terhadap Petisi 96.....	111
2. Respon terhadap Partai Politik Nonpemerintah	113
a. Respon terhadap PPP	113
b. Respon terhadap PDI	117
c. Respon terhadap PRD	124
d. Respon terhadap PUDI	128
3. Respon terhadap Intelektual	129
4. Respon terhadap Aktivis Mahasiswa	142
5. Respon terhadap LSM Prodemokrasi dan HAM....	153
6. Respon terhadap Perpolitikan Kelas Bawah	162
a. Gerakan Kaum Buruh	162
b. Gerakan Kaum Tani	168

BAB VI. RESPON MILITER TERHADAP GERAKAN PRODEMOKRASI : ANALISIS PERSPEKTIF KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI MILITER.....	173
A. Pola – Pola Respon Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi	173
B. Dimensi Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer dalam Merespon Gerakan Prodemokrasi	185
BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	198
A. Kesimpulan	198
B. Implikasi	200
DAFTAR PUSTAKA	203

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Beberapa Politiko-Birokrat – Militer yang Memiliki Wewenang Mengalokasikan Fasilitas Ekonomi (1970-an).....	64
Tabel 2 : Society and State in Indonesia 1945 – 90	74
Tabel 3 : Aksi Penolakan Pencalonan Kembali Soeharto sebagai Presiden Periode 1998 – 2003 dan Tuntutan Dilakukan berbagai Perubahan (Per-Januari 1998)	103

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Hubungan Pengaruh Pers, Mahasiswa dengan Negara Tahun 1966 – 1972 (dalam Kasus Korupsi dan proyek TMI) ...	70
Bagan 2 : Themes Constituting the Four Main Discourses Representing the Two Extreme Poles	99

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1 : Kekuatan – Kekutan Sosial -Politik yang Berperan69



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan politik Indonesia pada awal 1990-an, menunjukkan semakin menguatnya proses demokrasi dari bawah.¹ Hal itu, seperti tercermin dari mulai maraknya gerakan arus bawah dan prodemokrasi yang mencapai klimaknya pada akhir 1990-an dengan melahirkan gerakan reformasi total (reformasi ekonomi, politik dan hukum). Gerakan reformasi yang substansinya menuntut pengembalian kedaulatan rakyat oleh pemerintahan otoriter Orde Baru (Orba) yang berkuasa selama 32 tahun, berhasil melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan melahirkan pemerintahan 'transisi' yang bertugas menyiapkan Pemilu 1999 untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis.

Gerakan-gerakan arus bawah,² misalnya aksi massa di Medan pada 1991 yang mampu menyedot sekitar 50.000 massa, dan aksi buruh PT. Gajah Tunggal yang melibatkan 14.000 buruh, merupakan aksi massa yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.³ Gerakan-gerakan arus bawah terus berkembang baik di pedesaan maupun

¹ Lihat Anders Uhlin, *Democracy and Diffusion : Transnational Lesson Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors*, (Sweden: Lund University, 1995), h.208, ia menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II, anti kolonialisme merupakan tema umum dalam Dunia Ketiga dan dilihat sebagai arus sejarah (*forward flow of history*) di Indonesia. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an antioriterianisme, demokrasi dan HAM merupakan representasi arus sejarah baru.

² Lihat, Muhammad AS.Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta:LP3ES, 1996), h.114, istilah arus bawah (*grass root politics*) dipakai untuk menunjukkan praktek dan diskursus politik masyarakat kelas bawah mulai dari para petani dan buruh di wilayah pedesaan sampai buruh industri, pedagang kecil, dan mereka yang berkerja di tempat yang disebut sektor informal dipertkotaan.

³ Dadang Juliantara, "Politik Perizinan, Gerakan Massa dan demokrasi", dalam Hairus Salim HS dan Anggar Jati Wijaya, eds., *Demokrasi dalam Pasungan: Politik Perizinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Forum LSM-LPSM, 1995), h.110.

perkotaan. Protes-protes dari gerakan arus bawah pedesaan yang sempat menjadi isu nasional antara lain, kasus BPPC, Jenggawah, Waduk Kedung Ombo, dan kasus Nipah. Sedangkan di perkotaan kasus yang menonjol diantaranya kasus sengketa tanah, huru-hara, dan isu SARA (suku, ras, agama, antar golongan). Kasus yang merupakan isu SARA dalam setting politik lokal, misalnya terjadi di Sunggaulodo, Tasikmalaya, Pekalongan, Banjarmasin, Sampang Madura, dan Ujungpandang.⁴ Disamping gerakan prodemokrasi yang telah berkembang dalam bentuk wacana dan /atau aktivitas yang dilakukan para intelektual, partai politik (PPP dan PDI), dan LSM, juga muncul kelompok-kelompok prodemokrasi alternatif seperti Forum demokrasi (Fordem), SBSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kelompok-kelompok solidaritas, maraknya kelompok diskusi mahasiswa, menjamurnya aksi-aksi protes kaum buruh dan petani⁵.

Meskipun sejak tahun 1993, dikalangan militer mulai berkembang pemikiran perlunya militer ikut menumbuhkan demokrasi⁶. Bahkan Salim Said menyatakan mestinya reformasi peran politik ABRI dilakukan setelah usai Perang Dingin. Said selengkapinya menyatakan :

Saya melihat reformasi politik di Indonesia, termasuk reformasi peranan politik ABRI itu harus sudah dilakukan ketika berakhirnya Perang Dingin 1990, saat Tembok Berlin runtuh 1989, Uni Soviet bubar dan sebagainya. Percaturan politik berubah tidak lagi barat dan timur, orang sudah bicara

⁴ Moch. Nurhasim, "Wacana Perlawanan Sosial Masa Orde Baru : Simbol "Arus Bawah" Pemilihan Umum 1997", *Prisma*, No.1 Tahun XXVII September-Oktober 1998, h. 35.

⁵ Hikam, *Demokrasi...*, h.7.

⁶ Gagasan demokrasi itu, berawal dari sambutan pemikiran Pak Nas (Sese-puh ABRI Jenderal Purn. AH. Nasution), pada HUT ke -48 ABRI, 5 Oktober 1993 yang diberi judul "Ke arah Masyarakat yang Lebih Demokratis". Menurut Pak Nas ABRI dengan dwifungsinya, telah berhasil mengantarkan perjalanan bangsa menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan rakyat yang makin meluas itu, dengan sendirinya mendorong naiknya aspirasi politik masyarakat. Oleh karena itu, ABRI dalam menghadapi masa depan bisa menumbuhkan kelompok menengah Indonesia yang diharapkan bisa menjadi sokoguru demokrasi. Caranya dengan mengendalikan konglomerat, demi terciptanya pemerataan ekonomi. Lihat Majalah *Editor*, No.3, Th. VII, 14 Oktober 1993, h.20.

HAM, demokrasi, dan orang atau dunia tidak lagi mentolerir tentara di dunia politik secara terbuka seperti yang terjadi di Indonesia dari sejak Orba sampai runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.⁷

Namun dalam realitas empirik respon militer (ABRI) terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif. Militer yang memiliki peran sosial – politik mestinya bisa bersifat independen bahkan sebagai dinamisator mestinya juga bisa akomodatif, tetapi keduanya tampak tidak dilakukan oleh militer.

Respon militer yang negatif terhadap gerakan prodemokrasi dapat dilihat pada fenomena berikut ini. Di bawah kepemimpinan L.B. Moerdani, ABRI menolak dialog antara kaum militer dan kaum intelektual yang "kritis" dengan alasan "kaum intelektual Indonesia terlalu dipengaruhi budaya Barat". Try Sutrisno yang menggantikan L.B. Moerdani, menggarut garis yang sama dengan alasan dikhotomi sipil-militer hanya ada di dalam sistem demokrasi liberal. Begitu pula Menko Polkam Soesilo Soedarma, pada awal 1994 menegaskan hal yang serupa, dengan alasan kaum intelektual yang dipengaruhi Barat merupakan ancaman yang serius terhadap persatuan nasional⁸.

Respon negatif terhadap munculnya kelompok 'kritis' setelah 51 tahun merdeka juga diperlihatkan Mayor Jenderal Syarwan Hamid (ketika itu sebagai Kasospol ABRI). Ia mengingatkan bahwa kelompok yang mewakili perubahan dan kebebasan, adalah "ibarat lapisan imajiner yang sangat tipis" di permukaan,

⁷ Salim Said, "Reformasi di ABRI Mestinya Dilakukan Usai Perang Dingin", H.U. Yogya Post, 27 Mei 1998, h.12.

⁸ Indria Samego et al., "...Bila ABRI Menghendaki" : *Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwijungsi ABRI*, (Bandung : Mizan, 1998a), h.161.

sementara di bawahnya, adalah lapisan masyarakat kita yang masih kental dengan keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan yang tentunya "lebih butuh pada stabilitas" agar dapat memberdayakan dirinya.⁹

Terhadap mimbar bebas yang berlangsung setiap hari di markas DPP PDI, yang dikuasai kubu Mogawati, Faisal Tanjung (pada waktu itu sebagai Pangab), memberikan penilaian sudah menjurus makar dan ditanggapi PKI. Mimbar itu dinilai telah menyudutkan ABRI, pemerintah dan negara. Misalnya dengan memint pertanggungjawaban Pangab dan Pangti, terhadap kasus Tanjungpriok, Lampung , Ujungpandang.¹⁰

Ramlan Surbakti¹¹, mengamati Direktorat Sospol (di Penda Propinsi Jawa Timur) sebagai aparat yang semi militer, dan menjadi penghambat proses terbentuknya *civil society* (demokrasi). Dalam praktek-empirik pembinaan yang dilakukan Direktorat Sospol terhadap Parpol dan Ormas lebih merupakan intervensi (melarang dan/atau mengharuskan, dan memberikan dana dan fasilitas terhadap yang memahaminya) terutama pada kegiatan persiapan dan selama Musda/Konferda/Muswil yang menetapkan program, menentukan susunan pengurus,

⁹ Syarwan Hamid, "Mewadahi (eran Serta Politik Masyarakat", dalam Syaro-fin Arba MF, eds., *Demikologi Politik Indonesia*, (Jakarta:Pustaka CIDESIDO,1998),h.272.

¹⁰ Majalah *Forum Keadilan*, No.9, Th. V, 12 Agustus 1996,h.16.

¹¹ Lihat Ramlan Surbakti, "Ditsospol dan Pembentukan Civil Society", dalam I.Basis Susilo, eds., *Masyarakat dan Negara*, kumpulan tulisan sebagai Kado untuk Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA yang memasuki masa pensiun sebagai PNS, (Surabaya : Airlangga University Press,1997),h.113-117.Tentang mengapa aparat Direktorat Sosopol dikatakan sebagai aparat semi-militer Ramlan, menjelaskan bahwa secara administratif masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri tetapi secara fungsional di bawah kendali Kepala Staf Sosopol ABRI. Tidak hanya Dirjen Sosopol selalu dari ABRI tetapi juga semua Kepala Direktorat Sosopol (tingkat Propinsi) dan Kepala Kantor Sosial Politik (Kakansosopol) lebih bertindak sebagai perantara Direktorat Sosopol dengan Bupati Kepala Daerah daripada sebagai aparat yang menjabarkan dan melaksanakan kebijakan sosopol Bupati.

merumuskan pernyataan politik, melakukan proses seleksi calon-jadi dan jadi-calon lembaga perwakilan rakyat menjelang Pemilu, dan ketika merumuskan suatu sikap politik baik di DPRD maupun di luar DPRD. Di contohkan (menurut sumber yang layak dipercaya), secara empirik para kader dan pemimpin PPP di Jatim berasal dari kalangan NU. Karena itu posisi kunci kepengurusan PPP mestinya kalau anggotalah yang berdaulat diisi oleh kader-kader yang berasal dari kalangan NU. Dengan intervensi Direktorat Sospol, Sekretaris Umum DPW dan Sekretaris Umum DPC PPP seluruh Jatim diduduki oleh kader dari Muslimin Indonesia (MI).

Fenomena respon negatif militer terhadap gerakan prodemokrasi di atas, itulah yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Terutama untuk mencari penjelasan mengapa respon negatif, bukan respon positif atau proaktif yang dilakukan militer terhadap gerakan prodemokrasi.

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang memusatkan perhatian pada penjelasan mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi merupakan sesuatu yang baru (tidak bersifat duplikasi). Hal itu dapat ditunjukkan bahwa penelitian tentang keterlibatan militer dalam politik yang ada, dilihat dari periodisasinya dapat dikelompokkan dalam periode sebelum dan sesudah Orba. Pada sebelum sampai masa awal Orba, penelitian yang ada pada umumnya tampak masih terbatas pada upaya mengungkap bagaimana perkembangan peran sosial-politik militer itu dilakukan, dan mengapa militer terlibat dalam politik. Misalnya

penelitian Yahya Muhaimin,¹² menyebutnya "jalan tengah" sebagai peran yang dilakukan militer dalam politik. Sundhaussen,¹³ mengungkap faktor eksternal (intervensi politisi sipil dan sistem politik tidak stabil) yang mendorong mengapa militer terlibat dalam politik.

Sedangkan kajian selama Orba, disamping mengangkat masalah bagaimana perkembangan keterlibatan militer dalam politik, juga masalah legitimasi dan masalah kemungkinan adanya perubahan pendekatan peran militer dalam politik karena adanya distorsi-distorsi dalam praktiknya. Temuan selama Orba menunjukkan keterlibatan militer dalam politik tidak lagi mengambil "jalan tengah", akan tetapi telah bergeser menjadi pemain politik yang dominan dan terutama dilakukan oleh TNI AD. Juga munculnya para jenderal "politik" dan "uang" yang dekat dengan Soeharto yang berperan menjamin loyalitas para panglima pasukan kepada pemerintah (Crouch, 1986, Subiyono, 1991, Leo, 1992)¹⁴.

Samego, dkk.,¹⁵ mengemukakan distorsi-distorsi peran sosial politik militer, seperti kuatnya penerapan pendekatan keamanan, campur tangan terlalu jauh militer terhadap kehidupan sosial politik, ekonomi dan hukum mengakibatkan antara lain

¹² Lihat Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982).

¹³ Lihat, Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

¹⁴ Lihat: Harold Crouch, *Militer dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986); Subiyono, et al., *Dwi Fungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997); Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1995).

¹⁵ Lihat: Indria Samego, et al., *Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwi Fungsi ABRI*, (Bandung: Mizan, 1998a), dan penelitian Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, (Bandung: Mizan 1998b).

banyak terjadi pelanggaran HAM, melemahnya wibawa hukum, semakin suburnya korupsi, nepotisme, dan hantunya profesionalisme militer. Sebagai alternatif pemecahannya perlu pergeseran peran sosial politik dari kemungkinan mempertahankan status-quo sampai penghapusan peran sosial politik.

Dengan demikian, penelitian yang ada tampak masih terbatas mengungkap masalah pelaksanaan dan perkembangan peran sosial politik militer (ABRI), dan dampak negatifnya terhadap kehidupan politik dan ekonomi nasional. Untuk itu kiranya diperlukan penelitian yang berupaya untuk mencari penjelasan mengenai mengapa peran sosial politik itu berdampak negatif. Penelitian ini, yang akan memfokuskan pada masalah mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif, dapat merupakan salah satu upaya mencari penjelasan tersebut. Oleh karena itu, fokus yang menjadi perhatian utama penelitian ini dapat diuyatakan merupakan upaya pengembangan dari penelitian yang telah ada.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola-pola respon negatif militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990 - 1998. (2) Mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990 - 1998 bersifat negatif? Masalah penelitian tersebut, fisibel untuk diteliti, karena pada periode 1990 sampai 1998 (21 Mei 1998/tongsernya Presiden Soeharto), secara

empirik menunjukkan berkembang pesatnya gerakan prodemokrasi, serta militer yang sangat reaktif, tidak proaktif dan represif (bersifat negatif) terhadap gerakan prodemokrasi. Juga menarik untuk diteliti mengapa militer kecenderungannya tetap represif, padahal dari kalangan sesepuh militer pada awal 1990-an mulai berkembang gagasan agar militer untuk ikut menumbuhkan demokrasi, terutama dalam mendorong lahirnya kelompok menengah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990-1998 bersifat negatif

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat yang bersifat akademis dan praktis. Manfaat yang bersifat akademis untuk memperkaya atau melengkapi informasi pengetahuan tentang politik militer khususnya yang terkait dengan gerakan pro demokrasi.

Sedangkan manfaat yang bersifat praktis, dapat dipertimbangkan sebagai pemikiran alternatif dalam menentukan kebijakan politik untuk memposisikan militer dalam politik dan bagi upaya mengembangkan kehidupan politik yang lebih demokratis.

BAB II

PERSPEKTIF TEORI

Studi tentang respon¹ militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990-1998 (lengsernya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998), merupakan langkah alternatif untuk memahami otoriterisme pada rezim Orba. Khususnya, sebagai upaya memberikan penjelasan alternatif mengapa militer memberikan respon negatif (represi) terhadap gerakan prodemokrasi?² Bentuk represi bisa langsung (seperti penahanan yang dibuat-buat, intimidasi, penculikan) maupun yang lebih *subtle* (seperti LITSUS, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada usaha memelihara atau bahkan memperbesar kekuasaan pemerintah). Represi merupakan bentuk dominasi yang sering nampak untuk membangun legitimasi disamping hegemoni.³ Represi merupakan salah satu metode dalam operasi

¹ Respon dimaksud merupakan sikap, opini, perilaku, proses interaksi terhadap peristiwa di luar dirinya, lihat Kacung Marijan, "Respons NU terhadap Pembangunan Politik Orde Baru", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 9, Mei 1991, h.41. Respon, dapat dikategorikan bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, respon dapat berupa setuju-tidak setuju (sikap); membenarkan - menyalahkan (opini); membolehkan - melarang (perilaku); skomodatif-antagonistik (interaksi).

² Istilah gerakan prodemokrasi, dimaksudkan adalah rakyat (people) dan organisasi yang aktif melakukan tuntutan perubahan kearah demokrasi dan melakukan wacana demokrasi, serta aktif bekerja untuk demokratisasi dalam berbagai bidang. Yang termasuk gerakan prodemokrasi ini, misalnya: elite pembangkang, LSM pro-demokrasi dan HAM, gerakan mahasiswa, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, gerakan intelektual. Lihat: Uhlin, *Democracy and Diffusion...*, h.57-58.

³ Pendapat ini dikemukakan Daniel Sparringa. Sedang hegemoni berwujud usaha menguasai isi pikiran dan bahkan cara berpikir melalui monopoli makna yang manipulatif dengan tujuan memberikan kesadaran publik tentang eksistensi rejim yang memiliki kepemimpinan moral dan intelektual. Lihat, Daniel Sparringa, "Dari Sebuah Panggilan ke Kembali ke Barak Sekarang : Sebuah Taksonomi Paradigma Intelektual Indonesia tentang Dwifungsi ABRI", Makalah, Disampaikan dalam Acara Dialog Nasional dengan tema " Aktualisasi Arah dan Tujuan Reformasi Pembangunan Bangsa " yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Jakarta 2 November 1998, h. 2.

pendekatan keamanan. Operasi pendekatan keamanan dibedakan atas metode represi dan metode persuasi fisik.⁴

Militer (ABRI) khususnya TNI-AD sejak awal sejarahnya tahun 1945 sampai Orba memainkan peranan politik yang penting.⁵ Tanpa dukungan TNI-AD pemerintah manapun tidak akan berkuasa lama.⁶ Karena keterlibatan dalam politik, maka timbul faksi-faksi dalam ABRI. Misal dikenal adanya ABRI hijau dan ABRI merah putih⁷. AS. Hikam, melihat faksionalisme di tubuh ABRI dulu karena ideologi dan sekarang kompleks sekali. Ada faksi yang dekat dengan Islam politik, dekat kubu nasionalis, kelompok Soehartois, kubu yang ingin lepas

⁴ Pendapat ini dikemukakan Arbi Sanit. Menurut Arbi Sanit, sampai akhir tahun 1980-an teknik represi menjadi andalan. Untuk itu tindakan kekerasan oleh alat keamanan diandalkan sebagai pamungkas. Tapi dalam rangka keterbukaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tekanan internasional, aparat keamanan mulai mempraktekkan metode persuasi sejak awal tahun 1990-an. Untuk itu penggunaan kekuatan fisik tidak lagi diarahkan untuk melumpuhkan "pengganggu keamanan" secara fisik, melainkan secara psikologis. Maka alat keamanan tidak menggunakan senjata secara langsung, tapi pakai peluru karet atau pentungan. Mereka tidak dibolehkan aktif menyerang, melainkan mendesak dan memojokkan atau membubarkan aksi massa. Lihat, Arbi Sanit, "Desa Mengempung Kota T", *Tempo Interaktif*, Edisi 50/1, 7 Februari 1997, Vol. II, September 1996 s/d Februari 1997, h. 578.

⁵ Lihat: Crouch, *Militer...*, h.389, yang menyatakan bahwa dari awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politik-nya di bawah Orde Baru, para perwira Angkatan Darat Indonesia senantiasa melibatkan dirinya ke dalam masalah-masalah politik dan hampir sepanjang masa itu dengan giat memainkan peranan politik yang penting.

⁶ Lihat: Takashi Shiraishi, "Militer Indonesia dalam Politik", dalam: *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISA*, No.38/XXII/1999, h.12, ia menyatakan bahwa militer dengan Angkatan Darat sebagai tulang punggungnya, memiliki monopoli kekuatan pemaksa negara, mempunyai peran yang terbentang dalam proses politik; mendominasi komunitas intelegen Indonesia; aparaturnya merembah hingga tingkat desa. Paling penting ia mempunyai kekuasaan struktural yang tanpa dukungannya pemerintah manapun tidak akan bisa berharap untuk tetap berkuasa lama dan bahwa ia mempunyai kapabilitas untuk mengambil alih kekuasaan negara jika ia mempunyai keinginan politik untuk melakukan hal itu.

⁷ ABRI hijau dikenal dekat dengan kalangan tokoh-tokoh Islam; ABRI merah putih dimaksud ABRI nasionalis. Dikhotomi ini, menurut Sjamsuddin Haris tidak lebih hanya untuk mengidentifikasi kubu-kubu yang ada. Lihat, Wawancara Sjamsuddin Haris, dalam *OPOSISI*, No.24, Th.1, 13-19 Januari 1999, h.8.

dari bayang-bayang Soeharto. Dan dalam melihat faksionalisme ini hendaknya dilihat dari individu-individu⁸.

Adanya dikhotomi ABRI hijau dan ABRI merah putih, dibenarkan Bambang Triantoro (Mantan Kassospol ABRI). Ia mencontohkan yang termasuk militer hijau, yaitu Letjen TNI Prabowo Subianto, Letjen Fachrul Razi, dan Mayjen Zacky Anwar Makarim⁹. Pengkotakan di tubuh ABRI dalam ABRI hijau dan ABRI merah putih, dibantah Kapuspen ABRI Mayjen Syamsul Ma'arif, yang menyatakan "ABRI itu ya ABRI. Tidak ada ABRI hijau atau merah putih"¹⁰. Pandangan yang senada juga dikemukakan Harold Crouch. Crouch, tidak melihat perbedaan yang jelas antara ABRI santri dan nonsantri (kaum abangan).¹¹ Untuk menjelaskan, mengapa respon militer (khususnya TNI-AD baik sebagai institusi, individu/faksi) bersifat negatif terhadap gerakan prodemokrasi, maka akan

⁸ M.A.S.Hikam, "ABRI Pecah Karena benturan Ideologi", Tabloid *VOKAL*, No.04 Th.1, edisi 7 - 13 Januari 1999, h.10.

⁹ Tentang adanya faksi dalam militer, Bambang Triantoro menjelaskan bahwa dalam sejarahnya terbentuknya faksi karena bawaan dari komponen yang membentuk TNI, yaitu TKR dan pasukan Lasykar, pasukan ini membawa warna politik tertentu. Yaitu komunis (Pasukan Bintang Merah, Jangkar Merah, dan Beruang Merah), nasionalis (Tentara Pelajar Indonesia), Islam (Lasykar Hizbullah), dan sosialis. Sedangkan ABRI sekarang, warna ideologi kelihatan setelah mereka menjadi ABRI setelah bergaul dengan berbagai kelompok kepentingan. Wawancara Mantan Kassospol ABRI Bambang Triantoro, dalam *OPOSISI* No.24 Th.1.....h.8.

¹⁰ Kapuspen : Tak Ada Itu Pengkotakan ABRI Hijau ...", *VOKAL*, No. 04 Th.1, Edisi 7-13 Januari 1999, h.11.

¹¹ Crouch, melihat ketika zaman Hartono hubungan ABRI dan ICMI jelas. Namun di masa Wiranto belum ada tanda-tanda yang jelas. Hartono tampaknya berhasil membersihkan unsur-unsur Benny Moerdani dari AD. Banyak perwira yang cenderung kepada Islam pada zaman Benny tidak dapat dipromosikan, pada zaman Hartono dinaikkan pangkatnya. Kecenderungan Islam kepada ABRI bukan berarti mereka menjalankan politik Islam. Tapi karena mereka berasal dari keluarga Islam. Jadi kalau melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren, mereka merasa kerassan. Ketika di bawah Benny Moerdani, ABRI memang merasa asing dengan dunia pesantren. Saya kira ini perbedaannya. Lihat,

Wawancara Harold Crouch, "Kontradiksi dalam Dwifungsi", *Tempo Interaktif*, Edisi 45/II, 10 Januari 1998, Vol. VI Desember 1997 s/d Februari 1998, h. 234 - 236.

diajukan beberapa teori. Dari beberapa teori kemudian akan dipilih salah satu diantaranya sebagai perspektif. Dasar pilihannya, teori itu disamping dipandang akurat untuk menjelaskan respon militer terhadap gerakan prodemokrasi tahun 90-an yang bersifat negatif, juga merupakan penjelasan alternatif dari penjelasan yang telah ada.

Perspektif Organisasi Militer



Morris J. Janowitz¹² menyatakan organisasi militer merupakan refleksi teknologi perang. Hasnan Habib¹³ tampak sejalan dengan konsep tersebut, ia menyatakan organisasi militer sebagai *raison d'etre* untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (*emergency organization*). Yang bercirikan sebagai organisasi keras, ketat, hirarkhis sentralistis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando. Ciri ini sebagai *habit formation*. Sedangkan Uhlin¹⁴, menggambarkan ciri khas organisasi militer adalah sangat hierarkhis dan otoriter.

¹² Morris Janowitz, *Military Conflict : Essays in the Institutional Analysis of War and Peace*, (Beverly Hills : SAGE Publication, 1975), h.110.

¹³ Yang dimaksud *emergency organization* adalah sebagai alat/kekuatan pertahanan keamanan untuk menghadapi, mengendalikan dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan bersejarah dari pihak-pihak lain yang mengancam negara, kedaulatan, integrasi wilayah dan nilai-nilai harkat bangsa. Sedangkan *habit formation* dimaksudkan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mutlak perlu agar tugas dapat terlaksana dalam keadaan bagaimanapun. Lihat: Hasnan Habib, "ABRI dan Demokratisasi Politik", dalam Selamet Ginting, dkk., eds., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung : Mizan, 1997), h.20-31.

¹⁴ Anders Uhlin, "Demokrasi di Indonesia : Peluang dan Hambatan", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. II, (Yogyakarta: Insist, 1999), h.91.

Sebagai *emergency organization*, maka stabilitas politik merupakan perhatian utama bagi militer. Karena itu militer sangat sensitif tentang hal ini, bahkan cenderung membesar-besarkan ancaman terhadap stabilitas politik. Akibatnya perbedaan-perbedaan pendapat dan persaingan politikpun dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Konflik-konflik politik kontemporer yang oleh orang lain sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan masuk akal bisa saja dianggap oleh para perwira militer sebagai ancaman terhadap rezim, atau rangkaian ancaman kecil yang akan berubah menjadi lebih besar di masa depan.

Ini berarti, organisasi militer bukanlah lembaga demokrasi. Karena tampak dengan jelas demokrasi sebagai konsep non-militer bersifat kontradiktif dengan ciri-ciri organisasi militer.

Eric Nordlinger¹⁵, dalam hal ini menggambarkan bahwa sikap negatif militer terhadap kegiatan politik masyarakat berkaitan erat dengan ciri organisasi militer, yaitu "hirarki dan keterpaduan". Kedua ciri tersebut cenderung untuk digeneralisasikan kepada kehidupan sipil dan dianggap perlu dan dapat diwujudkan dalam politik. Misalnya, perwira rendah yang menghormati dan mematuhi pimpinan mereka, rakyat juga perlu senantiasa patuh kepada pemerintah mereka. Sikap kritis rakyat terhadap pemimpin militer tidak dibenarkan, bahkan merupakan pelanggaran.

Organisasi militer merupakan organisasi yang terpadu, dimana militer

¹⁵ Lihat, Eric A. Nordlinger, *Militer dalam Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 78-84.

harus tampil sebagai satu keluarga, maka pernyataan kepentingan pribadi dalam militer tidak dibenarkan. Oleh karena itu, dalam politik juga perlu mengurangi artikulasi kepentingan kelompok dan individu dalam masyarakat.

Konsepsi dan ciri organisasi militer di atas, merupakan paradigma profesionalisme lama. Dimana fungsi militer difokuskan pada keamanan eksternal, militer secara politik netral, dan mengakui supremasi sipil. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang menganut profesionalisme baru¹⁶, dimana organisasi militer lebih merupakan refleksi kondisi sosial, politik dan kultur masyarakat, maka organisasi militer memiliki cirri khas tersendiri. Misalnya, fungsi militer difokuskan pada keamanan internal, ruang lingkup tindakan militer tak terbatas (multi fungsi), dan menciptakan manajerialisme militer-politik dan perluasan peranan. Fungsi militer sebagai stabilisator dan dinamisator dimaksudkan sebagai bentuk manajemen militer-politik untuk memperlancar jalannya pembangunan.

Menetapkan fungsi militer sebagai dinamisator pembangunan (termasuk dalam membangun kehidupan politik yang demokratis) lebih merupakan upaya memperkokoh legitimasi peran militer dalam politik. Karena, bagaimanapun tindakan-tindakan militer selalu menuntut struktur komando yang tegas dan kepatuhan kepada perintah pemimpin. Kondisi ini, sangat berbeda dengan kondisi yang dibutuhkan dalam sistem politik demokratis.

¹⁶ Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*, (Jakarta : Grafi- ti, 1996), h.28.

Yahya Muhaimin¹⁷, juga menggambarkan tentang sulitnya dwi fungsi ABRI dapat mendorong demokratisasi, karena musyawarah atau kearifan dan kebersamaan sebagai kerangka nilai yang sangat penting bagi demokratisasi, dalam tradisi kehidupan militer secara universal tidak dikenal. Sebab bersifat kontradiktif dengan sistem komando yang hirarkhis dengan disiplin yang kuat.

Sayidiman Suryohadiprojo (Jenderal Purn. dan Mantan Gubernur Lemhanas)¹⁸, mengakui TNI sebagai tentara profesional sangat memperhatikan aspek teknik militer secara lugas, sehingga tidak sendirinya dekat dengan pikiran dan perasaan masyarakat. Apalagi kalau tentara itu memegang kekuasaan yang besar dalam negara seperti yang terjadi pada TNI selama Orba. Daniel Lev¹⁹, juga memiliki pandangan senada. Lev, menyatakan dalam partisipasi politiknya, militer akan selalu menggunakan keahliannya dalam ilmu perang.

Dengan demikian, dari perspektif organisasi militer memang militer tidak dimaksudkan untuk ikut mengembangkan demokratisasi. Bahkan ciri-ciri organisasi militer bersifat kontradiktif dengan demokrasi. Oleh karena itu secara institusional, militer akan menjadi penghambat bagi pengembangan kehidupan yang demokratis.

¹⁷ Yahya Muhaimin, "Aktualisasi Konsep Tut Wuri Handayani", dalam: Ginting, dkk., *ABRI dan ...*, h. 53-54.

¹⁸ Sayidiman Suryohadiprojo, "Keselamatan dan Keamanan Negara serta TNI yang Mendapat Kepercayaan Rakyat", *Republika*, Jum'at 3 September 1999, h.6

¹⁹ "Dwifungsi ABRI Wajib Ditelaah", *Kompas*, 20 Agustus 1998, h.6.

Perspektif Neo-Patrimonial

Harold Crouch,²⁰ menampilkan konsep neo-patrimonial untuk menunjukkan sistem politik Orba yang lebih menyerupai negara patrimonial di masa lampau daripada suatu polity yang modern. Karl D. Jackson²¹, menggambarkan di bawah Orba, kekuasaan dikumpulkan dalam kompetisi personal untuk melegitimasi program-program dan simbol-simbol oleh Presiden. Kompetisi dilakukan antara lingkaran elite birokrat dan militer. Hubungan Presiden dengan lingkaran elite merupakan hubungan patron-klien. Pimpinan pada lingkaran klien mengharapkan patron dapat memelihara kebutuhan materi dan status klien. Jackson²², lebih lanjut menyatakan "kekuasaan yang diperoleh oleh masing-masing elite yang bersaing melalui kompetisi antara personal di dalam lingkaran Presiden". Dalam model neo-patrimonial²³, birokrasi disamping telah menampakkan ciri-ciri modern, tetapi dalam perilakunya masih memperlihatkan warisan tradisi dan budaya politik masa lampunya (yang dimaksud kebudayaan Jawa). Dalam anggapan seperti itu, birokrasi dan perilaku politik di Indonesia masih memperlihatkan karakteristik patrimonial. Dimana jabatan dan keseluruhan

²⁰ Harold Crouch, "Patrimonial and Military Rule in Indonesia", *World Politics*, July, 1979 seperti yang dikutip Kuntowijoyo, "Agama, Negara dan Formasi Sosial", dalam *Prisma* 8, 1984, h.37.

²¹ Karl D. Jackson, "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia", dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, eds., *Political Power and Communication in Indonesia*, (Berkeley: University of California Press, 1976), h. 14.

²² Jackson, "Bureaucratic Polity", h. 5.

²³ Maruel Kaisiepo, "Dari Kepolitikan Negara: Birokrasi dan Politik Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik* 2, (Jakarta: AIFI Bekerjasama dengan Gramedia, 1987), h. 24.

hirarki didasarkan atas hubungan personal atau hubungan "bapak-anak buah" (patron-klien). Ini berarti dalam model neo-patrimonial, patron (dalam hal ini Presiden) menjadi aktor yang paling menentukan bagi pemenuhan kepentingan kebutuhan materi dan karir klien (elite birokrasi sipil, militer, dan partai politik dan organisasi kepanjangan pemerintah). Presiden Soeharto sebagai patron menjadi kekuatan utama politik, yang dalam perkembangannya semakin menguat. Seperti dinyatakan Ramlan Surbakti,²⁴ bahwa sejak awal 1990-an, Presiden Soeharto makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakatan.

Elite militer memiliki posisi strategis sebagai penjamin stabilitas politik dalam model pembangunan Orba yang memprimadonakan ekonomi. Oleh karena itu, militer merupakan aktor politik yang penting setelah Presiden. Posisi militer yang strategis ini dimanfaatkan pemerintah untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya. Cara yang dilakukan Presiden Soeharto dengan mengendalikan kekuatan politik militer. Hal itu sebagaimana dinyatakan Liddle²⁵, bahwa selama Orba Soeharto mampu melakukan kontrol dan penunjukkan jabatan dalam militer dan doktrin dwi fungsi. Hanya ketika Jenderal L.B. Moerdany menjadi Pangab, kontrol itu terputus. Tetapi menjadi solid kembali mulai awal 1996, ketika Jenderal

²⁴Ramlan Surbakti, "Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 1998, h.3.

²⁵ R. William Liddle, "Indonesia : Suharto's Tightening Grip", dalam: *Journal of Democracy*, Vol.7, Number 4 October 1996, h. 60-61.

Faisal Tanjung menjadi Pangab, Jenderal Hartono menjadi KSAD, dan Kasospol ABRI dijabat Mayor Jenderal Syarwan Hamid. Namun seperti yang dinyatakan Lane²⁶, yang menjadi perhatian utama Soeharto bukanlah kepentingan militer, melainkan perlindungan terhadap kepentingan politik dan ekonomi keluarga Soeharto dan para konglomerat besar Cina yang terkait dengan Soeharto.

Dengan demikian, fungsi militer sebagai alat negara telah digeser menjadi alat pemerintah Soeharto dan keluarganya serta para kroninya (klien). Hal ini juga secara sadar diakui oleh pihak militer (ABRI) sendiri yang menyatakan, bahwa "format politik Presiden Soeharto untuk mendayagunakan peran sosial politik ABRI bagi kepentingannya".²⁷ Secara lebih detail Mayjen Suwarno Adiwijoyo (Mantan Assospol Kassospol ABRI) menggambarkan sebagai berikut²⁸

Selama Soeharto berkuasa, banyak petinggi ABRI yang takut membela kejujuran, kebenaran dan keadilan karena takut dinilai tidak loyal dan bahkan takut kehilangan kursi. Tidak sedikit jenderal yang mengingkari nurani rakyat, hati nurani keluarganya, bahkan nuraninya sendiri. Indoktrinasi dan *motto senior can do no wrong*, menjadi tidak sedikit anggota ABRI yang terbentuk menjadi semacam mesin perang dan robot yang bernyawa mirip *a pure fighting machine*. Tunduk kepada pemerintah tanpa *reserve*, bak seorang conteng.

Perspektif neo-patrimonial ini, menggambarkan Presiden (*patron*) sebagai faktor determinan terhadap peran sosial politik yang dilakukan militer (klien).

²⁶ Anders Uhlir, *Oposisi Berserak : Arus Demokratisasi Kelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1997), h. 60-61.

²⁷ Mabel ABRI, *TNI Abad XXI : Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*, Cet. keempat, (Jakarta: Jasa Bumi, 1999), h. 14.

²⁸ Suwarno Adiwijoyo, "Mengapa TNI Tidak kembali Ke Barak?", dalam Jenderal Pol (Purn) Kumarto (Penyunting), *Merentang Kritik terhadap Polri*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1999), h. 187.

Militer yang represif terhadap kegiatan politik masyarakat, termasuk terhadap gerakan prodemokrasi dilakukan untuk menjamin kepentingan dan menunjukkan loyalitasnya kepada patron. Sebagai imbalannya militer diberikan peran sosial, politik dan ekonomi yang sangat luas. Militer selama rezim Orba menyadari kondisi ini, namun kelihatannya tidak ada usaha – usaha yang benar-benar serius untuk melepaskan diri terhadap genggaman yang begitu ketat dari kekuasaan Presiden Suharto.

Perspektif Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer

Pandangan (filsafat) tentang hubungan antara angkatan bersenjata dengan politik yang banyak dikutip oleh tentara Indonesia adalah pandangan Carl von Clausewitz. Clausewitz²⁹, memandang perang sebagai alat politik untuk mencapai sasaran politik sebagai tujuan utamanya, karena itu perang dan politik tidak dapat dipandang terpisah. Berdasarkan pandangan ini TNI melihat misi tiap angkatan bersenjata dimanapun tak pernah lepas dari politik. Politik menjadi sesuatu yang inheren bagi militer.

Samsuddin³⁰ (Mayjen Purn. dan anggota Komnas HAM), mengajukan "Teori Kromosom dan Gen tentang Dwi Fungsi ABRI" untuk memperkuat pandangan bahwa peran sosial-politik merupakan *built-in* bagi militer. Teori ini,

²⁹ Mober ABRI, *TNI Abad XXI*....., h.4.

³⁰ Samsudin, "Dwifungsi ABRI : Teori Gen dan Kromosom", Kompas, 9 Nopember 1998, h.4.

didasarkan pada fakta sejarah perang kemerdekaan atas penolakan (ketidakpatuhan) Jenderal Sudirman untuk menyerah walaupun Presiden Soekarno waktu itu telah terlebih dahulu di tawan Belanda. Penolakan ini di nilai sebagai peran sosial politik ABRI yang pertama kali. Teori ini juga dimaksudkan untuk menyatakan konsep "Jalan Tengah"³¹ sebagai sesuatu yang tidak benar. Karena konsep tersebut hanya sebatas untuk mengingatkan bahwa dwi fungsi telah lama dilupakan.

Bila dicermati, Teori Kromosom dan Gen, lebih merupakan justifikasi bagi peran sosial politik militer, sedangkan konsep "Jalan Tengah" merupakan cara bagaimana peran itu dilaksanakan. Sehingga kuranglah tepat jika konsep "Jalan Tengah" dinilai sebagai sesuatu yang tidak benar.

Atas dasar pemahaman hubungan militer dan politik sebagai sesuatu yang inheren, maka peran TNI dirumuskan mencakup pertama, mempertahankan kedaulatan tanah air dari ancaman eksternal, kedua, menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman internal, ketiga, memberikan sumbangan aktif kepada pembangunan bangsa (*nation building*), keempat, mendorong pengembangan demokrasi dan masyarakat madani, kelima membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti

³¹ Konsep ini dikemukakan KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution pada 11 Nopember 1958 di Magelang yang menggambarkan jati diri TNI: Bukan sekedar "alat pemerintah" sebagaimana yang berlaku di negara-negara barat; bukan pula "alat suatu partai" sebagaimana yang ditentukan di negara-negara komunis; apalagi semacam "rejim militer" yang mendominasi negara. TNI adalah "alat perjuangan rakyat", sebagai salah satu dari kekuatan politik nasional yang ada.. dan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik itu, TNI tidak akan tidak aktif. Lihat, Mabas ABRI, *TNI Abad XXI.....*,h.11.

seluas-luasnya dan keenam, berperan aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia³².

Peran TNI tersebut di atas, membenarkan militer terlibat pada urusan non militer, dari politik, ekonomi, sosial, sampai mengurus olah raga. Dengan begitu, peran militer tidak lagi terbatas pada dwifungsi tetapi sudah multifungsi. Sehingga militer tidak terbatas sebagai pejuang, penjaga keamanan nasional, tetapi juga sebagai manajer dan birokrat. Semua peran itu, dilakukan dengan alasan demi kepentingan nasional. Atas dasar alasan tersebut, dapat diajukan pertanyaan: Benarkah keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi hanya untuk kepentingan nasional? Kalau memang demikian, siapakah yang menjamin kepentingan politik dan ekonomi militer?

Menurut Nordlinger³³, yang mendorong keterlibatan militer dalam politik terutama untuk melindungi otonomi dan kepentingan korporat militer. Begitu juga menurut S.E. Finer³⁴, kepentingan korpslah yang menjadi perhatian utama peran militer.

Doktrin "Jalan Tengah" sebagai pelaksanaan peran sosial politik militer, antara lain melahirkan aktivitas bisnis yang dikenal dengan istilah *civil missions*.³⁵ -

³² Mabas ABRI, *TNI Abad XXI*,h.6.

³³ Eric Nordlinger, *Militer*,h.103, tentang otonomi militer Nordlinger menyatakan bahwa pihak sipil tidak dapat mencampuri urusan penyusunan kurikulum pendidikan dan latihan, mutasi perwira dalam posisi tertentu, promosi para perwira tinggi, dan pembentukan strategi pertahanan. Hakikat otonomi itu juga menegaskan bahwa percobaan untuk mempengaruhi prajurit dan perwira oleh pejabat sipil akan selalu ditentang.

³⁴ S.E. Finer, *Comparative Government*, (New Zealand: Penguin Books, 1985), h.14.

³⁵ Budi Susanto, SJ dan A.Made Tony Supriatna, *ABRI: Siasat Kebudayaan 1945-1995*, (Yogyakarta: Kerjasama Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1995), h.89.

Secara konseptual *civic mission* merupakan penyatuan kegiatan ketentaraan dengan masyarakat sipil. Konsep ini diadopsi dari model dinas ketentaraan Amerika Serikat, dipelesetkan menjadi "nyivic", yaitu kegiatan yang semata-mata ekonomi alias "ngobyek"³⁶. Hal itu, menunjukkan di balik pelaksanaan peran sosial politik untuk kepentingan nasional, sesungguhnya juga dalam rangka untuk kepentingan korps. Dalam pelaksanaan *Civic Missions* dilakukan lewat dua cara yaitu "Operasi Bakti" dan "Operasi Karya". "Operasi Bakti" bertujuan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat perang. Sedangkan lewat "Operasi Karya" mencoba mempersempit jarak antara alokasi dana yang diberikan kepada tentara dengan kebutuhan seharusnya yang diperlukan tentara dalam hal dana.

Militer Indonesia dalam melakukan kegiatan *civic missions* tidak terlepas dari peran sosial politik. Lain halnya militer Amerika Serikat "nyivic" sebagai peran non-tempur tidak membuat militer melakukan intervensi di bidang politik atau mengurangi kemampuan militer untuk mempertahankan negara dari serangan pihak luar.³⁷

Kepentingan politik dan ekonomi TNI tercermin pada peran sosial politik yang berupa penugaskaryaan³⁸. Persoalannya, apakah pemenuhan kepentingan

³⁶ Hermawan Sulistyono. "Latar Belakang Keterlibatan ABRI dalam Bisnis", dalam *Majalah Suara Mahasiswa* Universitas Indonesia. (Jakarta : Grasindo, 1999), h.49.

³⁷ Peran non-tempur, misalnya bantuan bencana alam, keamanan dan kebijakan internal, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, lihat, Diamond, Larry & Plattner, Mare F., (ed), *Hubungan Sipil – Militer & Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h. Pendahuluan xviii.

³⁸ Penugaskaryaan meliputi: (1) sifatnya wajib sesuai dengan ketentuan per-UU (misalnya: mengisi wakil ABRI di MPR, DPR dan DPRD); (2) didasarkan pilihan MPR, DPR dan DPRD (misal: jabatan Presiden/Wakil Presiden, Ketua/Anggota BPK, Gubernur, Bupati, dll.), (3) atas penunjukan dari Presiden/Kepala Negara (misal: jabatan Perwakilan di LN, Menteri, dll.), (4) Penugasan atas

politik termasuk di dalamnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan ekonomi, atau sebaliknya? Penjelasan atas pertanyaan tersebut menyangkut masalah hubungan antara politik dengan ekonomi. Ramlan Surbakti³⁹ memperlihatkan hubungan antara politik dan ekonomi berdasarkan penjelasan sosial, paling tidak dikenal ada tiga perspektif yaitu: ekonomisme, politisisme, interaktif dan perilaku berkesinambungan. Perspektif ekonomisme, beranggapan proses-proses politik merupakan produk proses-proses non politik. Atau ekonomi menentukan politik. Sebaliknya menurut perspektif politisisme, struktur politik memiliki dan mengembangkan kepentingan sendiri dan menggunakan kepentingan - kepentingan ini terhadap kepentingan ekonomi. Sedangkan perspektif interaksi, mencoba menjembatani kedua perspektif di atas. Perspektif ini menganggap antara politik dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Terakhir perspektif perilaku yang berkesinambungan, yang didalamnya termasuk aliran perspektif *public choice* yang berupaya menerapkan asumsi, bahasa, dan logika ekonomi *neoklasik* ke dalam perilaku politik.

Pola hubungan antara politik dengan ekonomi di Indonesia lebih cenderung mengarah pada politisisme. Hal ini, ditunjukkan oleh Onghokham, Mackie, dan Chatib Basri. Onghokham,⁴⁰ melihat sepanjang sejarah Indonesia ada pola bahwa penguasa baru akan membawa *money man* sendiri. Oleh karena itu, elite politik

permintaan pemerintah cq. Menteri (misal: jabatan Eselon III, dsb.); (5) penugasan atas permintaan organisasi kemasyarakatan; dan (6) penugasan pada lembaga negara yang lain, seperti BUMN/D. Lihat: Soebijono, dkk., *Dwifungsi ABRI*, h.125; 136-137.

³⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h.206.

⁴⁰ Onghokham, "Elite dan Monopoli", dalam *Prisma 2*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h.13.



menguasai dana-dana ekonomi. Mackie, melihat kecenderungan yang sama. Ia menyatakan :

Di Indonesia pada umumnya adalah politik, bukan pemilikan, yang menjadi panglima, dan itu masih berlaku sampai saat ini tatkala negara ini pada intinya telah menjadi kapitalis dan terdapat sejumlah konsentrasi kekayaan dan pemilikan yang sangat besar tampil kepermukaan. Namun demikian, kelompok terakhir ini secara mengejutkan masih tidak berpengaruh secara politik, dibandingkan dengan kaum "politiko-birokrat", kaum "teknokrat", dan para pemimpin angkatan bersenjata.⁴¹

Chatib Basri, menunjukkan kecenderungan yang sama, khususnya dalam kasus ABRI. Ia menggambarkan kaitan akumulasi kapital dan kekuasaan sebagai berikut :

Salah satu keunikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Eropa adalah relasi antara akumulasi kapital dan kekuasaan. Dalam konsep yang konvensional, hubungan kausal antara akumulasi kapital dan kekuasaan lebih dipahami dari arah di mana akumulasi kapital bisa mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan. Kelompok bisnis yang besar misalnya memiliki kekuatan lobi untuk meminta proteksi. Tapi dalam kasus ABRI, akumulasi kapital justru terjadi karena mereka memiliki kekuasaan. Surat keputusan dan lisensi dapat menjadi modal utama berjalannya suatu bisnis⁴².

Dengan demikian, peran militer dalam politik sangat menguntungkan juga secara ekonomi. Sehingga militer berkepentingan untuk mempertahankan kondisi ini. Seperti dinyatakan MacIntyre,⁴³ elemen penting kelangsungan kekuatan militer

⁴¹ Mackie, J.A.C., "Pemilikan dan Kekuasaan di Indonesia", dalam Tanter, Richard dan Young, Kenneth, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1996), h. 78-79.

⁴² Muhammad Chatib Basri, "Bisnis ABRI : Membuka Kotak Pandora", dalam *Tempo*, 16 November 1998, h. 86.

⁴³ MacIntyre, Andrew, *Business and Politics in Indonesia*, (Australia : Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1990), h. 2.

mendukung Orba, karena mereka berkepentingan untuk mempertahankan *status quo* yang berupa keluasan dalam mempengaruhi politik dan penghargaan ekonomi yang substansial. Sementara itu, Ariel Heryanto,⁴⁴ melihat militerisme dan kapitalisme dalam pembangunan, belakangan ini justru menjadi musuh utama modernisme paruh kedua abad ke -20. Kekuasaan dalam modernitas dibentuk dengan mengerahkan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu alamiah, matematika, teknik, ekonomi) dan aparatus represi (hukum, militer, polisi) untuk mengendalikan alam dan masyarakat atas nama "stabilitas dan keamanan". Mereka sangat takut, curiga, dan anti kepada apa pun yang bersifat terbuka, majemuk, dan penuh kemungkinan.

Sehingga gerakan - gerakan arus bawah atau prodemokrasi, yang menginginkan adanya perubahan kehidupan politik yang lebih terbuka, demokratis dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan politik dan ekonomi militer. Dalam hal ini Nordlinger⁴⁵, menyatakan, dalam pandangan militer kesadaran politik kelas bawah dapat mengurangi kekuatan politik militer dalam meningkatkan kepentingannya.

Goodman⁴⁶, memberikan contoh dalam rangka demokratisasi, Argentina membatalkan proyek misil Condor yang terkenal dan mengakhiri wajib militer. Argentina, Brazil dan Chili mengurangi partisipasinya sebagai pemasok dalam

⁴⁴ Ariel Heryanto, "Bahasa dan Kuasa : Tatanan Postmodernisme", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim eds., *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung : Mizan, 1996), h.99.

⁴⁵ Nordlinger, *Militer.....*, h.116.

⁴⁶ Goodman, Lois W., "Peran Militer di Masa Lalu dan Sekarang", dalam Diamond, Plattner, (ed.), *Hubungan Sipil.....*, h.56.

perdagangan senjata internasional dan memprivatisasi perusahaannya untuk menghilangkan kontrol militer, dan mengubah beberapa perusahaannya menjadi produsen barang non-militer.

Berdasarkan berbagai pendapat di muka, maka dapat dihipotesiskan bahwa respon negatif militer terhadap gerakan prodemokrasi adalah dalam rangka untuk melindungi kepentingan politik dan ekonominya sebagaimana tercermin pada peran penugaskaryaan.

Perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer sebagai upaya menjelaskan masalah mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif, memang tidak populer lebih-lebih dikalangan militer. Lain halnya kedua perspektif terdahulu (perspektif organisasi militer dan perspektif *neo-patrimonial*), yang telah banyak digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. Bahkan dikalangan militer (TNI) kedua penjelasan itu, telah diakui kebenarannya sebagai penjelasan mengapa militer menjadi penghambat bagi pengembangan demokrasi. Berdasarkan pemikiran ini, maka perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer sebagaimana tercermin dalam penugaskaryaan yang akan digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif¹, dan sifat penelitiannya deskriptif-analitis. Disebut demikian, karena hendak mendeskripsikan secara rinci dan lengkap serta menginterpretasikan fenomena respon militer terhadap gerakan prodemokrasi.

Unit Analisis

Masalah penelitian adalah mempertanyakan (1) Bagaimana kecenderungan pola-pola respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990 – 1998. (2) Mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi pada tahun 1990-1998 bersifat negatif. Oleh karena itu, maka unit analisisnya berupa berita (peristiwa) dan unit referensi.² Unit analisis berita menggambarkan reaksi militer terhadap gerakan prodemokrasi, dan unit referensi yakni rangkaian kata atau kalimat

¹ Penelitian ini menempatkan pola-pola sebagai sasaran kajian dan bukan variabel sebagai sasarnya. Disamping itu, menuntut cara pemahaman yang runtut dan jernih atas dasar interpretasi, lihat: Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1996), h. 15.

² Bagong Suyanto, et.al. (eds.), *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1995), h. 172.

yang menunjukkan sesuatu yang mempunyai arti sesuai dengan kategori respon. Oleh sebab itu penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian content analysis (analisa isi/makna).³

Dengan demikian unit analisisnya meliputi peristiwa dan katogori yang berupa respon militer (para petinggi militer baik yang aktif maupun purnawirawan, dari faksi-faksi yang ada seperti ABRI merah putih maupun hijau dan lembaga militer khususnya di kalangan TNI AD , yang dinilai memiliki posisi strategis dalam arti sangat menentukan kebijakan politik militer) terhadap gerakan prodemokrasi (elite pembangkang, intelektual secara individual maupun dalam bentuk organisasi, mahasiswa, politisi dari PPP dan PDI, LSM prodemokrasi dan HAM, gerakan kaum buruh dan petani).Unit analisis peristiwa dan unit referen respon militer terhadap gerakan prodemokrasi diambil dengan teknik sampling purposif, artinya memilih berdasarkan penilaian tertentu, yaitu kecukupan bagi kepentingan penelitian.

Jenis Informasi dan Sumber Informasi

Dalam penelitian ini, informasi yang ingin diperoleh berupa data tertulis yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan. Sesuai dengan masalah penelitian, yaitu respon militer terhadap gerakan prodemokrasi, berarti

³ Menurut Barclson (1952) bahwa masalah – masalah konkrit yang dikaji *content analysis* antara lain berupa masalah kecenderungan-kecenderungan yang menyangkut isi komunikasi dan mendeskripsikan respon-respon sikap atau perilaku terhadap peristiwa-peristiwa komunikasi. Lihat, F. Nuryanto, "Macam dan Penggunaan Inferensi", Bahan Penataran Metodologi Penelitian *Content Analysis* Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta, 1991, h. 3-4.

menyangkut informasi mengenai reaksi militer terhadap peristiwa-peristiwa, perubahan - perubahan dan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada gerakan prodemokrasi. Oleh karena itu, jenis informasi yang dicari berupa : sikap, opini, perilaku, proses interaksi militer (lembaga dan para perwira tinggi militer) terhadap gerakan prodemokrasi dalam kehidupan politik nasional 1990-1998.

Militer sebagai lembaga misalnya: Seskoabri, Seskoad, Lemhanas. Para perwira tinggi militer meliputi yang aktif dan menduduki jabatan struktural maupun aktif/purnawirawan yang tergabung dalam faksi, serta purnawirawan tetapi masih berpengaruh dikalangan militer dan atau sangat intens mengikuti perkembangan politik militer (seperti Letjen TNI (Purn) Hasnan Habib, Jenderal TNI (Purn) Rudini, Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, dll.). Perwira tinggi militer aktif yang menduduki jabatan struktural seperti : Menhankam/Pangab, KSAD, Kaster ABRI, Kapuspen ABRI, Pangdam.

Sedangkan perwira tinggi militer aktif/purnawirawan dalam faksi ABRI sebagai berikut.⁴ Yang termasuk faksi ABRI merah putih, misalnya : (1) Jenderal TNI Wiranto, Panglima ABRI; (2) Letjen TNI Susilo Bambang Yudoyono, Kaster ABRI; (3) Letjen TNI Soegijono, Kasum ABRI; (4) Letjen TNI Johny Lumintang, Wakil KSAD; (5) Letjen TNI Soeyono, mantan Sekjen Dephankam; (6) Letjen TNI Agum Gumelar, Gubernur Lemhanas; (7) Letjen TNI Purn. M. Hendropriyono,

⁴ Tabloid OPOSISI, No.24, Tahun 1, h. 9

Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan; (8) Mayjen TNI Imam Oetomo, Gubernur Jatim; (9) Mayjen TNI Tyasno Sudarto, Ka BIA; (10) Mayjen TNI Ryamizard, Pangdam Brawijaya.

Kemudian yang termasuk faksi ABRI hijau, misalnya : (1) Jenderal TNI Purn Feisal Tanjung, Menko Polkam; (2) Jenderal TNI (Purn) R.Hartono, Mantan KSAD, Menpen; Mendagri; (3) Jenderal TNI Soebagyo HS, KSAD; (4) Letjen TNI Syarwan Hamid, Mendagri; (5) Letjen Purn ZA Maulani, Kabakin; (6) Letjen TNI Purn Prabowo Subianto, Mantan Pangkostrad; (7) Letjen TNI Fachrul Razi, Mantan Kasum ABRI; (8) Mayjen TNI Sjafrie Syamsudin, Mantan Pangdam Jaya; (9) Mayjen TNI Kivlan Zein, Mantan Pangdiv II Kostrad; (10) Mayjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, Menpen; (11) Mayjen TNI Zakky Makarim, Mantan Ka BIA; (12) Mayjen TNI Djoko Soebroto, Pangdam Brawijaya/Irjenad; dan (13) Mayjen TNI Syamsael Maarif, Kapuspen ABRI.

Disamping itu, sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka jenis informasi lain yang diperlukan adalah berupa: fakta-fakta dan data mengenai aktivitas dan wacana demokrasi dari gerakan prodemokrasi dalam kehidupan politik nasional yang terjadi pada 1990-1998. Gerakan prodemokrasi meliputi: (1) Pembangkang Elite , seperti Petisi 50, Petisi 96; (2) Gerakan Intelektual secara individual terutama dari kalangan akademisi (seperti: Arif Budiman, Amin Rais, Nurcholis Madjid, George Aditjondro, dll.) maupun secara kolektif (seperti: Fordem, FPKR, dll.); (3) Unsur-unsur prodemokrasi dari partai politik non-pemerintah (seperti :PPP dan PDI) dan dari partai 'oposisi', yaitu PUDI dan PRD; (4) LSM

prodemokrasi dan HAM, seperti : LBH, ELSAM , LPHAM, PPIPHAM, PBHI, ALDERA, KIPP, dll.; (5) Gerakan Mahasiswa, seperti : FAMI, SMID, Forkot, dll.; (6) Gerakan buruh dan tani, misalnya : SBSI, PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), Kasus Marsinah, Demonstrasi Buruh di Medan, Kasus Waduk Kedung Ombo, Kasus Nipah, Jenggawah , dll.

Untuk memperoleh jenis informasi tersebut dan sesuai dengan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif-analitis, maka yang dijadikan sumber informasi adalah: buku (literatur), dokumen resmi (terbitan Seskoabri, Seskoad, Lemhanas, Mabes ABRI), jurnal ilmiah, makalah seminar, majalah, tabloid, dan surat kabar.

Prosedur yang Digunakan untuk Memperoleh Informasi

Untuk memperoleh informasi dilakukan studi kepustakaan (*library research*). Langkah pertama, mencari dan menyeleksi berbagai informasi yang sudah tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti dari sumber informasi yang berupa buku (literatur), dokumen resmi, jurnal ilmiah, makalah seminar, majalah, tabloid, dan surat kabar. Langkah kedua, mempelajari/mengkaji sumber -- sumber informasi yang telah diseleksi tersebut dengan fokus kajian yang sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Kredibilitas-Transferabilitas Informasi

Untuk kredibilitas keteralihan informasi (data) dilakukan dengan cara "uraian rinci" (*thick description*)⁵. Yaitu data yang diperoleh tidak sekedar dikumpulkan saja tetapi ditafsirkan atau diinterpretasi dalam bentuk uraian secara rinci (analisis), seteliti dan secermat mungkin dengan segala macam pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian yang nyata. Sedangkan teknik yang digunakan adalah triangulasi penyidik dan teori.

Dalam melaksanakan teknik tersebut, maka data yang diperoleh akan dicek dengan data hasil penelitian/pengamatan orang lain dan dilakukan penjelesaian banding (*rival explanation*)⁶. Para pengamat/peneliti / para ilmuwan politik dan para ahli politik militer yang pandangan -pandangannya akan dijadikan penjelasan pembandingan, sebagai berikut. Dari pengamat/peneliti/para ilmuwan politik, misalnya : Arbi Sanit, Mochtar Pabotingi, Hermawan Soelistyo, Daniel T.Sparingga, Ramlan Subakti, Indria Samego, Herbert Feith, Daniel S. Lev,dll. Para ahli politik militer, misalnya: Harold Crouch, Ulf Sandhaussen, Salim Said, Yahya Muhaimin, dll.

Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan terutama dalam bentuk narasi *constructive realism* (subyek dan peneliti). Namun jika dipandang perlu, juga akan

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian*.....h. 183.

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*.....h. 178.

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram/bagan. Bentuk penyajian data ini, dinilai sangat tepat karena jenis data yang ingin diperoleh adalah berupa respon militer (sikap, opini, perilaku, dan proses interaksi) terhadap gerakan prodemokrasi (fakta /data tentang peristiwa, perubahan,).

Analisis Data

Sebagai jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif - analitis, maka pola berpikir induktif - empirik sangat berpengaruh dalam analisis data untuk menjawab masalah yang diajukan. Adapun metoda analisis yang digunakan adalah *hermeneutis*⁷, yakni menafsirkan atau menginterpretasi respon militer terhadap gerakan prodemokrasi. Dalam melakukan interpretasi, terutama akan berpegang pada perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer (melindungi peran sosial politik yang berupa penugaskaryaan).

⁷ Teknik untuk menafsirkan makna teks-teks, perspektif, pendirian, praksis, atau konteks situasi tertentu, baik untuk melaporkan temuan-temuan sendiri ataupun melaporkan perspektif orang-orang yang dikaji, lihat Bagong Suyanto, et al., (eds.), *Metode Penelitian.....*,h.149., lihat juga: Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Rakesarin,1996),h.138, bahwa penafsiran tetap berpegang pada materi yang ada, dicari latar belakangnya, konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau gagasannya lebih jelas; juga dapat dilihat pada: Ramlan Surbakti, 'Perkembangan Mutakhir Ilmu Politik', dalam: Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti, *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996),h.54, menyatakan metode interpretasi-kualitatif (*hermeneutika*) sangat tepat untuk mengungkap realitas politik empiris yang berada dibalik permukaan.

BAB IV
DINAMIKA MILITER DALAM POLITIK DAN EKONOMI
DAN GERAKAN PRODEMOKRASI
PADA ERA ORDE BARU (1966-1980-AN)

Dalam bab IV ini, akan dibahas mengenai format politik Orde Baru, keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi, dan perkembangan gerakan pro-demokrasi pada era 1966- 1980-an. Pembahasan ini, dimaksudkan sebagai upaya menggem-barkan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu respon militer terhadap gerakan prodemokrasi 1990-1998 (Bab V). Karena bagaimanapun kondisi pada tahun 1990-an merupakan hal yang tidak berdiri sendiri, tetapi ada mata rantai dengan kondisi sebelumnya.

Keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi pada era Orde Baru disamping karena diformalkan dan dikuatkan oleh format politik Orde Baru, tetapi juga merupakan perkembangan masa sebelumnya (1945-1965). Oleh karena itu, sebelum membahas dinamika keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi era Orde Baru (1966-1980-an) akan dikemukakan lebih dahulu secara singkat dinamika keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi 1945-1966.

Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1945-1966

Perkembangan organisasi militer Indonesia bermula bukan sebagai tentara reguler, tetapi tumbuh dari bawah sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR yang didirikan pada 22 Agustus 1945 terdiri dari unsur PETA, KNIL, Heiho, dll. Kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, dan baru memiliki Panglima Besar yang dipilih sendiri yaitu Jenderal Sudirman pada 18 Desember 1945. TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 25 Januari 1946. Dengan demikian TNI yang disahkan secara resmi berdirinya tanggal 3 Juni¹ 1947, merupakan gabungan dari TRI, kesatuan biro perjuangan dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya.¹

Keterlibatan Militer dalam Politik 1945-1965

Pada mulanya keterlibatan militer dalam politik bersifat *covert political support* terhadap politik Tan Malaka.² Hal itu diperlihatkan adanya rasa simpati Panglima Besar Jenderal Sudirman serta kalangan pimpinan tentara terutama dari bekas PETA terhadap gerakan politik Tan Malaka melalui Persatuan Perjuangan (PP), yang didirikan pada tanggal 16 Januari 1946. Jenderal Sudirman juga turut hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka.

¹ Lihat, Soebiyono, et al., *Dwi Fungsi ABRI : Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1997), h. 15. c

² David Easton, menyebutkan adanya dua macam support, yaitu bersifat *overt* dan *covert*, yang *overt* atau "terbuka" seperti : *Orientation* atau *states of mind*, Lihat, Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan*

Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982), h. 42.

Motif dukungan politik Panglima Besar Sudirman bukan karena sejalan dengan ideologi Tan Malaka yang komunis- nasionalis, tetapi pada komitmen nasional dan kecocokan pada strategi perjuangan PP serta karena sikap perlakuan yang tidak wajar dari Sjahrir terhadap tentara yang berasal dari PETA³. Bagi Tan Malaka strategi yang tepat dalam melawan Belanda adalah menekankan pada solidaritas nasional dan penolakan berunding dengan Belanda sampai mereka meninggalkan bumi Indonesia⁴, bukan dengan strategi diplomasi seperti yang ditekankan Sjahrir. Perlakuan yang tidak wajar Sjahrir terhadap tentara yang berasal dari PETA sebagai berjiwa fasis Jepang, khususnya pada diri Jenderal Sudirman menurut Anderson,⁵ sebagai sesuatu yang "tak masuk akal". Karena Sudirman- pun terlibat pertempuran melawan Jepang di Jawa Tengah, dia memang belajar taktik tempur dari Jepang. Akan tetapi teladan yang terbayang dalam pikirannya bukanlah samurai yang angkuh melainkan ksatria Jawa dan pembrontak-pembrontak militer yang legendaris melawan kekuasaan Belanda dalam abad-abad yang silam.

Tuduhan oposisi terhadap PP tetap dilancarkan terus. Kemudian untuk menghadapi kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Tan Malaka, Pemerintahan Sjahrir pada tanggal 20 Mei 1946, membentuk Divisi Siliwangi dan Brigade Mobil Polisi (*Mobile Police Brigade*). Perwira yang direkrut dalam unit baru ini lebih banyak yang berasal dari hasil pendidikan dan kecakapannya dari

³ Lihat, Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta: LP3ES, 1986),h.56, dan juga lihat, Yahya, *Perkembangan Militer.....*, h.42.

⁴ Yahya, *Perkembangan Militer.....*,h.41.

⁵ Sundhaussen, *Politik Militer.....*,h.38.

Belanda daripada dari Jepang, dan Sjahrir tidak meletakkannya di bawah komando Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar.⁶

Sjahrir tidak memilih perwira didikan Jepang (PETA) tampaknya ia tidak mau memperoleh kesulitan dalam penganadalian militer. Karena seperti dinyatakan Sundhaussen,⁷ PETA sudah terbiasa dengan suatu eksistensi yang bebas dari campur tangan atau pengarahan dari sipil.

Apa yang diawatirkan Sjahrir, tentang upaya kudeta oleh PP menjadi kenyataan. Hal itu tampak ketika PP yang didukung Divisi III TRI, dibawah Major Jenderal Sudarsono dan Pasukan Barisan Banteng dari Yogyakarta, melakukan penculikan terhadap Sjahrir sebagai upaya *coup d'etat*, namun gagal. Pasukan-pasukan Siliwangi yang merupakan bentukan Sjahrir dan Pesindo yang memukul mundur Divisi III TRI, dan Pasukan Barisan Banteng dari Yogyakarta. Peristiwa tersebut dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli 1946". Meskipun Jenderal Sudirman dalam peristiwa tersebut bersikap netral,⁸ atau bersifat independent, namun kemudian mendukung pemerintah dan menentang PP atas desakan Presiden. Kemudian para pemimpin PP seperti Tan Malaka, Sukarni, Ahmad Subardjo, dan lainnya ditangkap, dan sejak peristiwa 3 Juli 1946 tersebut, lumpuhlah PP. Tidak begitu dengan keterlibatan militer dalam politik, peristiwa tersebut meskipun mengisyaratkan kesalahan Jenderal Sudirman karena membiarkan sebgaiian kesatuan militemya terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946. Tetapi ia justru menjadi "satu faktor politik

⁶ Yahya, *Perkembangan Militer*.....,h.45.

⁷ Sundhaussen, *Politik Militer*....., h.32.

⁸ Yahya, *Perkembangan Militer*.....,h.47.

utama",⁹ karena dinilai mampu mencegah krisis yang mengancam perang saudara dan dukungannya terhadap pemerintah.

Dalam perang kemerdekaan ini, Ibu kota RI Yogyakarta jatuh ketangan Belanda dan pemimpin politik /tokoh-tokoh RI , seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Assaat, H.Agus Salim, Sultan Sjahrir, yang bertekad tetap tinggal di ibu kota, di tangkap Belanda dan diasingkan keluar Jawa. Sedangkan Panglima Besar Sudirman yang sedang menderita tbc, menginstruksikan Angkatan Perang RI dari tempat tidurnya, untuk melawan musuh berdasarkan rencana pertahanan yang sudah ada¹⁰. Rencana yang telah diputuskan Dewan Siasat Militer¹¹, antara lain bila terjadi serangan tiba-tiba maka tempat pimpinan negara untuk melakukan kegiatannya ditetapkan disuatu tempat di Sumatera, sedangkan untuk kegiatan bidang luar negeri ditetapkan di India, kemudian orang-orang pemerintah pusat, akan langsung ikut bergerilya di Jawa. Pihak pemerintah memilih tidak ikut bergerilya, yang berarti tidak konsisten dengan rencana yang telah disepakitinya sebagaimana yang telah diputuskan Dewan Siasat Militer. Peristiwa ini menurut Crouch,¹² merupakan puncak menjauhnya komandan tentara dari pihak pemerintah.

⁹ Yahya, *Perkembangan Militer.....*, h.47.

¹⁰ Sundhaussen, *Politik Militer.....*, h. 73.

¹¹ "Dewan Siasat Militer" dibentuk dalam rangka reorganisasi dan rasionalisasi militer guna menciptakan komando bidang pertahanan. Dia merupakan badan tertinggi yang menentukan strategi nasional yang akan dijalankan pemerintah, terutama dalam saat yang kritis. Di dalamnya duduk pimpinan-pimpinan politisi tertinggi dan pimpinan-pimpinan militer tertinggi yang langsung diketahuhi oleh Presiden. Anggotanya yaitu : Wakil Presiden, Perdana Menteri, Panglima Besar Militer, serta perwira-perwira Militer yang dipandang perlu, lihat, Yahya, *Perkembangan Militer.....*, h. 56.

¹² Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1986),h.24.

Salim Said,¹³ menilai bagaimanapun awal keterlibatan militer dalam politik lebih bersifat "spontan dan komplimenter" terhadap peran dominan politisi sipil. Tetapi peran itu kemudian berkembang menjadi "peranan kepemimpinan yang menentukan", ketika tentara memilih memimpin dari pada mengikuti pemerintah yang menyerah kepada musuh pada krisis Perang Kemerdekaan 19 Desember 1948 (Aksi Militer Belanda ke II).

Kemudian ketika tentara diminta untuk mengakhiri perang gerilya sebagai konsekuensi hasil persetujuan Roem-Royen (7 Mei 1949), diterima kalangan militer dengan kekecewaan yang luar biasa. Bahkan Panglima Besar Sudirman mengajak Kolonel A.H.Nasution guna mengajukan berhenti dari jabatan dan keluar dari dinas kotentaraan kepada panglima tertinggi. Namun rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan, dan memilih tetap loyal terhadap kebijakan pemerintah. Namun bukan berarti antara pemerintah (kaum politisi) dan kaum militer tidak lagi terjadi perbedaan pandangan politik dan strategi perjuangan. Bahkan justru sejak saat inilah timbulnya jurang lebar antara kaum politisi (sipil) dengan militer.¹⁴

Pada awal 1950-an, keterlibatan militer dalam politik menurun. Jenderal Sumitro melihat mulai tahun 1950 TNI/ABRI didudukkan dalam posisi konsep demokrasi barat. TNI/ABRI sepenuhnya dijadikan "*instrumental of force*" semata-mata.¹⁵ Namun posisi sebagai "*instrumental of force*", tidak berlangsung lama, karena

¹³ Salim Said, "Kepemimpinan Politik TNI/ABRI dalam Perspektif Sejarah", dalam Djoko Subroto, dkk., (Penunting), *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 163.

¹⁴ Yalya, *Perkembangan Militer*....., h.63.

¹⁵ Soemitro, *Suksesi Militer dan Mahasiswa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1999),h.60.

militer kemudian terlibat dalam krisis politik pada "Peristiwa 17 Oktober" 1952. "Peristiwa 17 Oktober", bermula dari dukungan pemerintah antara tahun 1950 sampai 1952 terhadap upaya kepemimpinan militer teknokratik dibawah KSAD

Kolonel Nasution dan KSAP Kolonel T.B. Simatupang, mengambil sikap untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik dan memusatkan perhatian untuk membina yang terpadu dan efektif. Untuk itu direncanakan rasionalisasi dan demobilisasi yang ditentang oleh banyak perwira bekas PETA yang kurang terlatih, yang merasa bahwa kedudukannya akan diturunkan sebanding dengan perwira-perwira yang telah "diwesternisasi". Ketika pemerintah dan para politisi oposisi di parlemen mendukung para perwira PETA, dan dianggap sebagai sesuatu yang sah dari penguasa sipil, dinilai pimpinan tentara sebagai "campu tangan" dalam soal-soal intern Angkatan Darat yang tak dapat diterima dan dibiarkan. Suatu kelompok perwira di Jakarta mengorganisasi suatu demonstrasi massa di depan istana presiden pada tanggal 17 Oktober 1952. Sementara sebuah delegasi perwira-perwira senior menemui Presiden Soekarno dan mendesaknya untuk membubarkan parlemen.¹⁶

Keterlibatan militer dalam politik baru mendapat pengakuan resmi, ketika Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957, setelah peranan

¹⁶ Crouch, *Militer dan Politik*....., h. 26 - 27. Tokoh utama penentang dari PETA adalah Kolonel Bambang Supeno bekas komandan Akademi Chandradimuka yang bertugas untuk membentuk kesadaran politik Angkatan Darat, yang dibubarkan Nasution dan kawan-kawan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Rasionalisasi dan demobilisasi dengan memperhentikan 80.000 prajurit, yang ketika itu berkekuatan 200.000. Perimbangan pemerintah, karena anggaran belanja Angkatan Darat untuk tahun 1953 akan menurun dari Rp. 2. 625 juta dalam tahun 1952, menjadi Rp. 1.900 juta. Sedangkan pertimbangan Markas Besar Angkatan Darat, mengingat 40% dari prajuritnya, secara fisik tidak memenuhi syarat untuk tugas aktif, dan usia rata-rata prajurit sudah mencapai kritis, yaitu 32 tahun, lihat, Sundhaussen, *Politik Militer*.....,h.109 - 115.

partai-partai politik dilumpuhkan (dengan pengecualian PKI) di lumpuhkan dan Undang-undang Darurat diberlakukan¹⁷. Tujuan dari dibentuknya Dewan Nasional adalah pura-pura membantu kabinet dengan menjalankan program-programnya, tapi pada kenyataannya dimaksudkan untuk mengambil alih peranan partai-partai politik. Adnan Buyung Nasution, melihat Angkatan Darat mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional dan menganjurkan supaya UUD 1945 diberlakukan kembali, dengan cara demikian membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif konkret terhadap pemerintahan konstitusional yang sedang diusahakan oleh Konstituante.¹⁸

Pada 9 Juni 1957, Soekarno menyampaikan pidato yang ditujukan baik kepada personil sipil maupun militer di Serang (Jawa Barat) mengatakan bahwa Dewan Nasional mencakup person-person dari golongan-golongan: buruh, petani, intelegensia, seniman, kaum wanita, orang-orang Kristen, orang-orang Muslim, para pengusaha nasional, (personil-personil) Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.¹⁹ Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan Nasional, Nasution melalui ceramahnya pada Ulang Tahun Akademi Militer Nasional di Magelang tanggal 12

¹⁷ Menurut Hasnan Habib, "Keadaan Darurat dan Darurat Perang" atau SOB (Staat van Oorlog en Beleg) pada tanggal 14 Maret 1957, peranan politik ABRI, terutama sekali Angkatan Darat, sangat meningkat. Sejak diberlakukan SOB itu terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti pengambilan perusahaan milik Belanda, pembubaran UUUS dan pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit 5 Juli 1959, pembubaran parlemen dan pembentukan Front Nasional, DPR Gotong-Royong dan MPR sementara, serta pembubaran partai-partai politik Masyumi dan PSI, dan sistem politik yang menjurus Demokrasi Terpimpin. Lihat Hasnan Habib, "Perkembangan Pemikiran Strategi di Indonesia", *Analisis CSIS*, 1996-6, h.444.

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Grafiti, 1995), h. 418.

¹⁹ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1992), h.10-11.

Nopember 1958, yang oleh Prof. Djokosutono dinamakan *the army's middle way*. Dalam pandangan Daniel Lev, tujuan Nasution melalui pidato itu agar kedudukan tentara yang statusnya sebagai golongan fungsional menjadi jelas, yaitu memperbolehkan keikutsertaan militer dalam pemerintahan dengan atau tanpa Undang-undang Darurat Bahaya Perang (SOB).²⁰

Dalam Dewan Nasional posisi politik militer tidaklah begitu menonjol. Soekarno dan anggota-anggota sipil masih menguasai lembaga politik yang baru didirikan itu. Dengan dintensipkannya kampanye untuk membebaskan Irian Barat, tentara mempunyai peluang untuk memainkan peranan yang lebih besar. Pada 10 Februari 1958, Mayor Jenderal Nasution yang menjadi KSAD, membentuk Fron Nasional Pembebasan Irian Barat. Tidak seperti Dewan Nasional, Fron ini didominasi oleh tentara.²¹ Fron Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang merupakan fron bersama Buruh-Tani-Pemuda dan Militer yang struktur organisasinya sampai tingkat kabupaten, diketuai KSAD Jenderal Nasution. Tujuan resminya membebaskan Irian Barat dari Belanda, tetapi disamping itu FNPIB juga berfungsi sebagai alat politik Angkatan Darat untuk mendorong paham demokrasi terpimpin berdasarkan UUD 1945.²²

Badan Kerjasama (BKS) antara sipil dan militer tersebut, oleh Angkatan Darat juga dimaksudkan untuk mengimbangi paratai-partai politik, terutama PKI. Ketika Presiden Soekarno melihat militer melahni FNPIB mulai menampakkan

²⁰ Yahya, *Perkembangan Militer.....*, h. 110-111.

²¹ Leo, *Golkar dan Militer.....*, h. 11.

²² Achian Buyung, *Aspirasi Pemerintahan.....*, h. 440.

memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat dan hal ini dinilai sebagai ancaman baginya, maka FNPIB pada Desember 1959 diganti dengan Fron Nasional (FN). Tujuan Fron Nasional bukanlah semata-mata sebagai pengganti FNPIB. Presiden sebagai ketuanya ternyata ingin mempunyai akses langsung kepada massa. Komponen FN adalah partai-partai politik, golongan-golongan fungsional (tentara dan lain-lain). Melalui FN partai-partai politik sayap kiri (khususnya PKI) dan militer saling berebut pengaruh di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten, sementara Presiden sebagai kekuatan pengimbang cenderung memberi angin pada PKI. Pada tahun 1964, kepemimpinan FN di tingkat provinsi dan kabupaten, sudah berada ditangan PKI. Sehingga tidak mengherankan jika FN kemudian oleh PKI dijadikan salah satu sarana untuk melakukan aksi petani PKI untuk melawan para tuan tanah.²³

Kemelut politik ini kemudian memuncak pada peristiwa 1965 (G 30 S PKI). Daniel S. Lev, melihat mengapa terjadi tragedi -65 itu, karena sistem politik Indonesia waktu Demokrasi Terpimpin kekurangan kontrol dan tidak mencukupi keperluan supaya orang tidak bisa dibunuh begitu saja. Lev, melihat pengalaman ini (tragedi-65) menunjukkan kalau tentara dimanapun, memainkan peranan politik, dengan sendirinya akan memakai keahliannya. Keahlian tentara adalah membunuh orang. Keahlian pimpinan politik sipil ialah membuat kompromi. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan lembaga-lembaga yang dapat melayani kepentingan masyarakat, termasuk melayani kepentingan keamanan.²⁴ Sejak peristiwa ini, maka

²³ Lihat, Leo, *Golkar dan Militer*.....,h.12-13.

²⁴ Lihat, Wawancara Daniel S. Lev, dalam F.X.Baskara T.Wardaya, *Mencari Demokrasi*, (Institut Studi Arus Informasi: 1999), h. 128-129.

militer (Angkatan Darat) memiliki posisi menentukan dalam perkembangan politik selanjutnya (Orde Baru).

Keterlibatan Militer dalam Ekonomi 1945 - 1965

Dalam masa perang kemerdekaan, keterlibatan militer dalam ekonomi (bisnis) seperti dinyatakan Mayjen TNI (Purn.) Suhardiman,²⁵ dengan melakukan gerilya ekonomi. Tujuannya untuk merongrong sistem perekonomian penjajah dan untuk membiayai perang dan revolusi. Misalnya, Laskar Rakyat Jakarta Raya mengendalikan ekonomi dengan memblokir kota Kerawang supaya beras daerah ini tidak bisa di ekspor ke Jakarta yang dikuasai Belanda.

Bentuk keterlibatan yang lain adalah penyelundupan dan perdagangan candu yang merupakan komoditas paling menguntungkan pada masa itu. Hasilnya kemudian ditukarkan dengan senjata.²⁶

²⁵ Hermawan Sulisty, 'Latar Belakang Keterlibatan ABRI dalam Bisnis', dalam *Majalah Suara Mahasiswa Universitas Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), h. 47.

²⁶ Indria Samego, et.al., *Bila ABRI Berbisnis*, (Bandung : Mizan, 1998), h.45.

Keterlibatan militer dalam ekonomi pada tahun 1950-an sampai akhir 1960-an, terutama ketika pemerintah melakukan kebijakan politik Banteng, tujuannya untuk membentuk kelompok pengusaha pribumi yang tangguh.²⁷ Politik Banteng sebagai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, pada mulanya dilakukan oleh serikat-serikat buruh yang hampir seluruhnya dikendalikan PKI. Meskipun Presiden Soekarno, menegaskan "pengambil alihan" itu di prakarsai oleh presiden sendiri. Untuk mencegah pengambil alihan secara meluas Jenderal Nasution pada tanggal 13 Desember 1957 melarang setiap pengambil alihan lebih lanjut dan dengan dekret menempatkan semua perusahaan asing terutama milik Belanda, yang sudah diambil alih itu dibawah pengawasan militer.²⁸ Bahkan yang terjadi tidak sekedar pengawasan, tetapi menurut Letnan Jenderal (purn.) Ali Sadikin bahwa pada tahun 1959 ABRI menempatkan perwira-perwira untuk terjun diperusahaan-perusahaan. Tujuannya agar jangan sampai perusahaan itu dikuasai oleh PKI.²⁹ Dengan demikian pengelolaan perusahaan-perusahaan negara praktis ada di tangan militer.

Pelaksanaan politik Banteng, ternyata mengalami kegagalan karena kurangnya tenaga ahli, administrasi yang lemah, keterlibatan para pemimpin secara pribadi dalam kegiatan bisnis dan tidak berpengalamannya para pemimpin Indonesia dalam dunia bisnis, ditambah dengan favoritisme dan praktek-praktek penyusunan, ketidakkonsistenan dan manipulasi politik.³⁰ Kendatipun demikian, pada awal 1965

²⁷ Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan : Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta : Yayasan Padi dan Kapas, 1991), h. 31.

²⁸ Yahya, *Bisnis dan Politik* , h. 41.

²⁹ Iswandi, *Bisnis Militer* , h. Pengantar xi

sekurang-kurangnya ada tiga kelompok bisnis tentara yang sangat menonjol, yaitu Yayasan Dharma Putra (YDP) milik kelompok bisnis Kostrad, Propelat yang dimiliki kelompok Siliwangi, dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah naungan Divisi Diponegoro.³¹ Ketika Soeharto yang menjadi Komandan Diponegoro, mengembangkan hubungan yang erat dengan pengusaha-pengusaha Cina seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Kelompok bisnis Diponegoro terutama terlibat dalam bisnis sektor pertanian yang semula dimiliki perusahaan-perusahaan Belanda.

Dari gambaran keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi tersebut di atas (1945-1965), dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, keterlibatan militer dalam politik pada awalnya dalam bentuk *political covert support* terhadap ide perjuangan PP dan bersifat spontan, kemudian menjadi faktor politik utama ketika peminat sipil di tawan pihak Belanda, sementara militer mengambil posisi sendiri dengan melakukan perang gerilya. Namun keterlibatan militer dalam politik pada awal 1950-an mulai surut, karena kemelut internal Angkatan Darat antara kelompok yang menghendaki pengembangan kekuatan militer secara profesional dengan non-profesional, klimaknya melahirkan "Peristiwa 17 Oktober", dimana militer menuntut pembubaran parlemen yang dianggap telah melakukan "intervensi" terhadap masalah internal Angkatan Darat. Meskipun keterlibatan militer dalam politik telah berlangsung lama, akan tetapi baru secara resmi diakui atau masuk dalam sistem politik ketika dibentuk Dewan Nasional, dimana militer sebagai salah satu yang mewakili golongan

³⁰ Yahya, *Bisnis dan Politik*, h. 91.

³¹ Samego, et al, *Bila ABRI Berbisnis*, h.71.

fungsional. Momentum ini dimanfaatkan militer untuk memperjelas posisi politiknya sebagai "jalan tengah". Dan kemudian militer menjadi kekuatan politik yang saling bersaing dengan PKI baik dalam merebut pengaruh massa maupun dalam mendekati kekuatan politik penyeimbang yaitu Presiden Soekarno. Peristiwa 1965, merupakan perobukan jalan bagi keterlibatan militer dalam politik secara lebih dalam dan luas.

Kedua, meskipun selama periode 1945 – 1965 militer berperan dalam politik akan tetapi tidak dominan. Namun para perwira militer banyak yang menduduki jabatan dalam pemerintah. Hal ini ditunjukkan John Mac Dougall,³² bahwa hampir seluruh perwira militer dari generasi 1945 sampai awal 1966 masih mengisi 64 % jabatan pembantu dekat Presiden, 38% menteri, 67% sekretaris jenderal, 67% inspektur jenderal dan 20% direktur jenderal. Kaum militer juga memperluas peranan mereka di bidang ekonomi baik manager BUMN maupun pengusaha swasta.

Ketiga, keterlibatan militer dalam ekonomi pada awalnya berupa "gerilya ekonomi", dan penyelundupan untuk keperluan memenuhi kebutuhan persenjataan. Kemudian dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, militer berperan secara dominan dalam pengelolaan perusahaan negara. Akan tetapi dalam perkembangannya politik Banteng di nilai mengalami kegagalan. Tetapi ada beberapa bisnis militer justru cukup menonjol, seperti Yayasan Dharma Putra (YDP), dan Devisi Diponegoro.

³² Harold Crouch, "Pasca Angkatan 1945 : Militer dan Politik di Indonesia", *Prisma 8*, (Jakarta : LP3ES, 1986), h. 13-19.

Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik dan Ekonomi 1966-1980-an

Dinamika keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi era Orde Baru, disamping merupakan perkembangan keterlibatan pada era sebelumnya, juga ditarenakan Orde Baru membuat format politik yang memberikan posisi penting bagi militer dalam pembangunan serta mengintegrasikannya dalam sistem politik yang dikembangkan. Bagaimana format politik itu terbentuk dan apa ciri-ciri format politik Orde Baru digambarkan pada bagain berikut ini.

Format Politik Orde Baru

Rezim Orde Baru muncul sebagai antitesis dari rezim Orde Lama. Dua hal warisan utama Orde Lama yaitu krisis politik dan ekonomi. Krisis politik utama adalah konflik berdarah G 30S/PKI yang hampir membawa perpecahan bangsa dan konfrontasi dengan Malaysia. Warisan krisis ekonomi digambarkan Yahya A. Muhaimin:

Pemerintah baru di bawah Soeharto mewarisi keadaan ekonomi yang sudah hampir ambruk. Hutang luar negeri berjumlah \$ 2,400 juta, laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, infrastruktur berantakan, kapasitas produksi sektor-sektor industri dan ekspor sangat merosot dan pengawasan atas anggaran serta penarikan pajak sudah tidak jalan lagi.³³

³³ Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik*....., h. 51.

Kritik yang berkembang menilainya krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat rezim Orde Lama lebih mengutamakan politik daripada ekonomi ("politik sebagai panglima"). Hal ini terlihat meskipun pada Mei 1963, pemerintah dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) menyusun program stabilitas ekonomi dan kemudian diikuti dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon) oleh Presiden dengan tujuan membangun kembali ekonomi melalui jalan kapitalis-liberal, tetapi kemudian dibatalkan. Pembatalan ini disebabkan ketiga aktor politik utama (Soekarno, PKI, TNI-AD) memandang masalah ekonomi sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan kampanye militer dan kepentingan perimbangan kekuatan, sebagai akibat konfrontasi dengan Malaysia.³⁴

Rezim Orde Baru dalam rangka mengatasi krisis di atas, kemudian menciptakan format politik yang memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif dan memberikan penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Slogan "politik sebagai panglima" dihilangkan dan diganti dengan slogan baru "ekonomi sebagai panglima" dan semboyan "politik *no* - pembangunan *yes*".³⁵ Dengan format politik yang demikian, maka formulasi kebijakan - kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya mengejar tujuan "mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi secepat mungkin melalui pengadaan modal secara besar-besaran, dengan menempatkan

³⁴ Lihat, Mohtar Mas'oe'd, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h.46-47.

³⁵ Dewi Fortuna Anwar, "Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik", dalam Syarifin Arba MF, ed., *Demitologi Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1998), h.3.

aparatur pemerintah secara menonjol dalam menentukan dan melaksanakan arah kebijaksanaan tersebut³⁶.

Angkatan Darat, lewat Seminar Angkatan Darat kedua, tanggal 25 sampai 31 Agustus 1966, yang sebagian besar men-diskusikan masalah-masalah bukan militer, menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh rezim baru.³⁷ Dukungan ini sangat penting, karena Angkatan Darat sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan yang dapat menjamin efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Format politik yang kemudian dikembangkan rezim Orde Baru merespon dukungan militer, dengan menempatkannya pada posisi sebagai kekuatan politik yang dominan.

Dewi Fortuna Anwar,³⁸ menggambarkan format politik Orde Baru, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, semakin memperluas peranan sosial - politik ABRI. Di bawah rezim Orde Baru, doktrin "Jalan Tengah" telah ditafsirkan secara sangat *flexible*, sehingga militer (ABRI) dikembangkan perannya tidak lagi sebatas sebagai salah satu kekuatan sosial - politik disamping kekuatan sosial - politik yang lain,

³⁶ Yalaya, *Bisnis dan Politik*....., h.17.

³⁷ Mohter, *Ekonomi dan Struktur*....., h.64., Lihat juga, Soebiyono, et.al., *Dwifungsi ABRI*....., h.36, yang memencinci hasil seminar TNI-AD II/1966 meliputi 2 (dua buku): (1) Buku Pertama memuat Doktrin Perjuangan TNI-AD yang berisikan : Landasan Idiil bagi perjuangan TNI-AD, Doktrin-doktrin Dasar Tri Ubsya Cakti dan Doktrin Perang Rakyat Semesta; (2) Buku Kedua memuat (a) Sumbangan fikiran TNI AD kepada Kabinet Ampera yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan dan rencana stabilitas politik yang antara lain berisikan Konsep Strategi dan Operasi Kabinet Ampera dan Konsep Strategi dan Operasi ABRI/TNI-AD, serta (b) Sumbangan fikiran TNI-AD kepada Kabinet Ampera berupa garis-garis besar kebijaksanaan dan rencana pelaksanaan stabilitas ekonomi yang antara lain berisikan keadaan ekonomi, program operasional, peranan TNI-AD dan kebutuhan produk-produk legesatif. Buku kedua ini disampaikan kepada Kabinet Ampera. Sebagaimana diketahui "Strategi Dasar Kabinet Ampera" menunjukkan banyak persamaannya dengan hasil-hasil Seminar TNI-AD II/1966.

³⁸ Dewi Fortuna, "Format Politik.....", h.3-6.

tetapi memiliki peranan yang dominan dan sangat luas di bidang non-Militer. Keterlibatan militer tidak hanya terlihat di bidang eksekutif, tetapi terlihat juga di bidang legislatif, yudikatif dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Peran militer yang semakin luas tersebut, semakin mempersempit ruang gerak masyarakat untuk bertindak secara lebih mandiri.

Peran politik militer yang besar dan tanpa batas waktu kapan mereka harus mengurangi atau kembali ke barak, merupakan hasil pergulatan dari tiga versi pemikiran tentang peranan militer dalam politik yang dimenangkan versi Soeharto dan Ali Murtopo. Soeharto dan Ali Moertopo menginginkan peran militer yang besar untuk melakukan stabilisasi kehidupan politik. Nasution juga menginginkan peran militer yang besar namun kemudian segera dikurangi dari waktu ke waktu sejalan dengan berkurangnya tingkat krisis sosial, ekonomi dan politik warisan Orde Lama. Berbeda dengan keduanya, Hatta malah menyarankan militer untuk kembali ke tangsi untuk membuka jalan bagi Orde Baru merealisasikan janji-janji demokratisasi dan keadilan sosialnya.³⁹

Kedua, menciptakan sistem pemilu yang tujuan utamanya untuk mempertahankan status - quo. Pemilu yang mestinya berfungsi antara lain memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara teratur dan berkala tidak terjadi. Karena Golkar sebagai partai pemerintah memang direkayasa sebagai partai hegemonic untuk selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu. Adanya rekayasa tersebut, tampak dimana

³⁹ R.Ecep Saifulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h.131.

PPP dan PDI dipersempit gerakannya sehingga tak pernah mampu mengurangi mayoritas Golkar di DPR.

Ketiga, menjadikan Golkar sebagai mesin pengumpul suara bagi pemerintah yang didukung penuh oleh militer dan Korpri. Pegawai negeri (birokrasi politik) yang seharusnya hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan yang netral secara politik, tetapi berubah menjadi bagian dari kekuatan politik (Golkar). Oleh karena itu Golkar dengan dukungan militer dan birokrasi yang memiliki jaringan ke desa-desa dapat memobilisasi dukungan suara secara efektif.

Keempat, membiarkan bidang legislatif dan yudikatif dalam posisi lemah dan subordinat pada lembaga eksekutif

Format politik Orde Baru yang menempatkan militer sebagai kekuatan politik dominan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan politik yang repressif. Hal ini dimungkinkan karena militer memiliki monopoli terhadap hak penggunaan kekerasan. Liddle⁴⁰, melihat keberhasilan rezim Orde Baru (Jenderal Soeharto) mempertahankan kekuasaannya karena memadukan strategi kebijakan kekerasan dengan kebijakan pemukiman (*exchange*) dengan bujukan (*persuasion*). Oleh karena itu lembaga militer (ABRI) sebenarnya yang berkuasa. Sebagaimana hal ini dinyatakan Liddle:

⁴⁰ Kebijakan politik penukaran (*exchange*) materi dengan dukungan politik, yang dimungkinkan oleh pertumbuhan ekonomi, merupakan kebijakan politik pokoknya dan kekerasan sebagai kebijakan terakhir (*policy of last resort*), lihat E. William Liddle, "Menjawab Tantangan Masa Reformasi", Makalah yang dipersiapkan untuk Konferensi Indonesia's Road to Recovery II : Redefining Nationalism to Rebuild the Nation, Berkeley, CA, 27 Mei, dimuat dalam Kompas, 8 dan 9 Juni 2000, h.4-5.

Saya selalu menyatakan bahwa yang berkuasa di Indonesia sebetulnya adalah ABRI. Banyak teman saya tidak sependapat dengan itu. Mereka menyatakan bahwa Soeharto yang berkuasa dan ABRI – seperti kekuatan-kekuatan yang lain-dimanfaatkan oleh Soeharto. Saya lebih suka melihat dari segi lembaga. Bagi saya lembaga yang berkuasa di Indonesia adalah ABRI dan presiden Soeharto adalah pemimpinnya.⁴¹

Kenyataan paling penting, format politik Orde Baru yang bercirikan melibatkan secara sistematis militer dan birokrasi sebagai kekuatan politik dominan, menjadikan eksekutif sangat kuat. Sebaliknya, format politik Orde Baru menjadikan masyarakat dan lembaga - lembaga demokrasi baik dalam tataran suprastruktur maupun infrastruktur semakin melemah. Format politik Orde Baru yang menenmpatkan posisi militer sebagai kekuatan politik dominan, memberikan jalan bagi militer tidak hanya untuk mengakumulasi kekuasaan politik tetapi juga kekuasaan ekonomi.

Dinamika Keterlibatan Militer dalam Politik 1966-1980-an

Ketika Orde Lama, ada dua kekuatan politik di bawah Presiden Sukarno, yaitu ABRI dan PKI. Orde Lama bukan suatu rezim yang terkonsolidasi, tapi mengandung beberapa unsur terpisah dan bahkan saling berlawanan. Khususnya AERI dan PKI. Sesudah itu, pada awal Orde Baru PKI dibasmi dan yang menjadi sumber kekuasaan politik di Indonesia cuma ABRI⁴².

⁴¹ Wawancara William Liddle, dalam FX. Baskara T. Wardaya (Ed.), *Mencari Demokrasi*, (Institut Studi Pusat Informasi, 1999), h. 269-270.

⁴² Lihat, Wawancara Liddle, dalam FX. Baskara T. Wardaya (Ed.), *Mencari...*, h. 251-252.

Keterlibatan militer pada awal Orde Baru tampak pada banyaknya ABRI (militer) yang dikaryakan. Hal itu terlihat dari 27 anggota kabinet yang diangkat Soeharto pada Juli 1966, terdapat 12 menteri yang merupakan anggota ABRI, yakni 6 menteri berasal dari Angkatan Darat dan 6 lainnya merupakan di luar Angkatan Darat. Dan yang menduduki posisi strategis pada saat itu di tingkat pusat misalnya, dari 20 departemen yang berurusan dengan sipil terdapat 11 anggota ABRI yang menduduki jabatan Sekretaris Jenderal.⁴³

Jabatan-jabatan strategis di tingkat daerah juga didominasi militer. Hal ini terlihat, misalnya kalau dalam tahun 1960 hanya beberapa gubernur propinsi saja berasal dari ABRI, maka pada tahun 1968, 68% dari gubernur-gubernur propinsi adalah perwira ABRI, dan jumlah itu meningkat menjadi 92% pada awal 1970-an. Dari semua jabatan bupati dalam tahun 1968, 59% dipegang perwira ABRI. Di Jawa Timur saja jumlahnya mencapai 84 % pada awal 1970-an.⁴⁴

Pada tahun 1973, jumlah anggota ABRI yang duduk di dalam kabinet bertambah 1 sehingga menjadi 13 orang. Adapun anggota kabinet yang seharusnya wakil partai pada saat itu banyak diisi oleh kaum teknokrat. Sementara itu anggota ABRI yang dikaryakan di tingkat pusat pada tahun 1973, mencapai 400 orang. Sedangkan untuk jabatan Gubernur, ABRI menempatkan anggotanya sebanyak 22 orang dari 26 propinsi.⁴⁵ Sehingga pada awal 1970-an ada semacam *joke* "under

⁴³ Indria Jarnego, et al., *Bila ABRI Menghendaki*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 106.

⁴⁴ Molitar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta LP3ES, 1989), h. 152.

⁴⁵ Indria, et al., *Bila ABRI...*, h. 106.

*colonialisme, we had a governor general, now that were independent, we have general governors.*⁴⁶

John Bresnan, melihat pada kurun 1967-1973 ada eksperimen singkat peurunjukkan militer dalam Kabinet menurun 18%, sipil yang memiliki pendidikan dan tidak memiliki afiliasi partai politik pada waktu yang sama naik dari 38% menjadi 77%. Eksperimentasi ini tidak lepas adanya timbul kepercayaan diri militer semakin kuat dengan kemenangan perolehan suara pada Pemilu 1971, dan peran ekonomi bantuan asing yang semakin memegang peran penting dalam pembangunan.⁴⁷

Meningkatnya secara kuantitas personil Kabinet dari para teknokrat, tampak tidak terkait dengan upaya mengembangkan demokrasi tetapi untuk memberikan tugas dalam mengelola ekonomi bantuan asing. Setelah peristiwa Malari 1974, militer menyadari bahwa peran yang dominan dalam pemerintahan, belum menjamin kemampuannya membangun stabilitas politik yang mantap. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila jabatan strategis dalam pemerintahan pusat yaitu sekretaris jenderal, direktur jenderal dan inspektur jenderal pada kabinet setelah 1971 menurun dari 55% menjadi 41%, berkembang pesat menjadi 89% pada tahun 1982.⁴⁸

Militer juga meningkatkan keterlibatan dalam politik melalui partai politik (Golkar), dan perwakilan politik (MPR , DPR, DPRD I dan DPRD II). Selepas Pemilu 1987 persentase perwira militer aktif di parlemen (MPR dan DPR) dari semula fraksi ABRI mengisi 40% meningkat menjadi 80% di DPR. Tujuh puluh

⁴⁶ Bresnan, John, *Managing Indonesia : The Modern Political Economy*, (New York : Columbia University Press, 1993), h. 110.

⁴⁷ Bresnan, *Managing Indonesia*, h. 109.

⁴⁸ Bresnan, *Managing Indonesia*, h.109.

sembilan dari seratus anggota fraksi ABRI di DPR (56 dari 59 kolonel, 14 dari 26 brigadir jenderal, dan 9 dari 15 mayor jenderal) adalah perwira aktif. Sebelum pelantikan anggota ABRI itu memperoleh latihan khusus selama dua bulan untuk menyiapkan mereka menjadi anggota DPR. Tujuannya untuk mendinamisasikan badan legislatif, sembari memberikan latihan buat perwira-perwira muda untuk masuk arena politik.⁴⁹

F-ABRI di DPR juga mempunyai tugas lain yang dikenal sebagai '*constituency work*'. Kepulauan Indonesia dibagi menjadi 100 wilayah *constituency*. Setiap anggota F-ABRI bertanggungjawab kepada satu wilayah *constituency*. Masing-masing anggota memiliki kantor dan tinggal selama empat masa reses DPR pada setiap tahun serta bekerjasama dengan komando teritorial, gubernur, bupati dan camat dan DPRD, terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh DPRD.⁵⁰

Kepemimpinan Golkar telah didominasi perwira-perwira ABRI. Hal ini terlihat, misalnya 28 pensiunan perwira senior ABRI yang sebelumnya (1982-1987) berstatus anggota ABRI yang ditunjuk pada 5 tahun periode berikutnya beralih sebagai anggota Golkar yang dipilih menjadi anggota DPR. Pada upacara pelantikan 1 Oktober 1987 itu, dua dari 28 itu (Mayjen Suharto dan Letjen Kharis Suhud)

⁴⁹ Michael van Langenberg, "Negara Orde Baru : Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Indy Subandi Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung : Mizan, 1996), h.232.

⁵⁰ Lihat, Ian Mac Farling, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces : Military Politics in Indonesia*, (Australia : Australian Defence Studies Center, 1996), h.146.

ditunjuk menduduki posisi paling berpengaruh, yakni sebagai pimpinan fraksi Golkar di DPR dan pimpinan DPR/MPR yang baru. Antara Agustus dan Oktober 1988, penulihan dewan kepemimpinan Golkar regional memperlihatkan semakin kuatnya partisipasi ABRI dalam Golkar. Seratus dua puluh (120) perwira militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah. Hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar dijabat oleh ABRI aktif maupun yang sudah pensiun. Sebagai formulasi ideologi, dwifungsi dan karyawan (kekaryaan) tetaplah yang mendasari bagi dimensi birokrasi-militer negara.⁵¹

Militer juga meningkatkan keterlibatan dalam politik melalui badan keamanan (Kopkamtib/Bakorstanas). Untuk kontinuitas melegitimasi pembangunan Kopkamtib sebagai badan ekstra konstitusional yang berfungsi menjaga stabilitas nasional dan memelihara ketertiban serta keamanan nasional untuk berjalannya pembangunan ekonomi, diganti dengan Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemanjapan Stabilitas Nasional). Bakorstanas berfungsi untuk mengintegrasikan antara kemandirian dan pembangunan. Pada Nopember 1988, Pangab Jenderal TNI Edi Sudrajat mengumumkan bahwa personil militer teritorial akan terlibat dalam pembangunan sejak dari tahap perencanaan guna mensinkronkan pendekatan kemakmuran dan keamanan. Dengan Bakorstanas ini, pembinaan teritorial oleh militer sekaligus menjadi andalan baru.⁵²

Upaya untuk memantapkan keterlibatan militer dalam politik (Dwifungsi

⁵¹Langenberg, "Negara Orde Baru.....", h.233.

⁵²Langenberg, "Negara Orde Baru.....", h.227.

ABRI), juga dilakukan melalui jalur yuridis. Karena pada tahun 1970-an seperti dinyatakan Letjen Syarwan Hamid (Wakil Ketua DPR/MPR) Dwifungsi menghadapi kritik dari masyarakat mengenai legalitasnya. Untuk menjawab tuntutan ini, meuncullah landasan konstitusional dalam bentuk ketetapan MPR maupun perundang-undangan. Dwifungsi ABRI dimasukkan dalam GBHN, ABRI menjadi modal dasar pembangunan, serta bentuk perundang-undang lainnya, seperti UU No. 20/1982 tentang Pokok - Pokok Hankam Negara yang kemudian disempurnakan dalam UU No.1/1989 dan UU No.2/1988 tentang Pokok-Pokok Keprajuritan. Asas legalitas ini merupakan pelengkap atau penyempurna legalitas sejarah dan perjuangan bangsa.⁵³

Keterlibatan militer dalam politik sejak awal Ordo Baru sampai pada 1980-an tidak mengalami perubahan yang mendasar, yaitu tetap memiliki peran politik yang dominan. Untuk mengembangkan dan mempertahankan dominasinya, tidak sebatas melalui hegemoni (legitimasi historis dan legalitas), tetapi juga dengan menggunakan dan menempatkan personilnya pada jabatan-jabatan strategis pada jaringan lembaga pemerintah, badan keamanan dan teritorial, partai politik, MPR dan DPR.

Militer sebagai kekuatan politik dominan, peran politiknya pada tahun 1980-an sesungguhnya tidak berubah seperti pada tahun 1950-an ketika Republik menghadapi kekuatan bersenjata yang berbau separtisme, seperti DI/TII,

⁵³ Lihat, Syarwan Hamid, "Kepemimpinan ABRI dalam Perspektif Sejarah", Djoko Subroto, Untung Susoro, Armaid Armawi (Akademi Militer) ,Penyunting, *V+tsi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), h. 134-135.

PRU/Permesta dan RMS, yaitu sebagai stabilisator . Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pada era 1980-an, Dwifungsi ABRI dipertanyakan kapasitasnya. Letjen TNI Syarwan Hamid⁵⁴, menggambarkan , pada era 80-an kepemimpinan dan dwifungsi ABRI, mendapat celaan dan cercaan, karena dianggap terlalu mendominasi keadaan dan struktur jabatan. Peranan selaku kekuatan stabilitas dengan pola kepemimpinan “ing madya mangun karsa” dipandang telah menyerobot hak sipil dan membatasi peranan politik komponen bangsa lainnya. ABRI berada dimana-mana, merasa lebih mampu dan lebih pantas dari kelompok lainnya, serta menduduki berbagai jabatan yang selalu diklaim ABRI sebagai jabatan strategis yang cukup rawan, namun kriterianya tidak transparan. Kepemimpinan ABRI dituduh menyalahgunakan konsep Dwifungsi ABRI justru untuk melanggengkan kepentingan sendiri. Juga dikritik terlalu mengedepankan aspek kuantitas dan mengabaikan aspek kualitas. Padahal aspek kualitas dan tidak harus terjun langsung dalam politik praktis inilah, merupakan salah satu syarat utama bagi semakin memantapkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dinamika Keterlibatan Militer dalam Ekonomi 1966-1980-an

Pada awal Orde Baru keterlibatan militer dalam ekonomi yang telah dirintis pada masa sebelumnya. Terutama dengan melakukan hubungan dengan para

⁵⁴ Syarwan Hamid, “Kepemimpinan ABRI....”, h. 135-136.

pengusaha Cina dan penanaman modal asing, para perwira militer Angkatan Darat, semakin mendominasi dunia perdagangan. Perluasan kesempatan berdagang penting sekali bagi peranan Angkatan Darat sebagai stabilisator. Kegagalan pemerintah yang lalu untuk memberikan kecukupan kepada personel-personel tentara telah menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat pembontakan terbuka. Dalam keadaan demikian, pimpinan Angkatan Darat berusaha mencari dana-dana untuk menambah apa yang tersedia dari anggaran belanja negara, disamping itu banyak perwira yang diperbolehkan bekerja untuk tujuan ekonomi masing-masing untuk menambah pendapatan dari gaji. Praktek keuangan "inkonvensional" ini menimbulkan kesan pengeluaran untuk ketahanan dan keamanan tidak naik demi kepentingan pembangunan ekonomi. Kesan itu terlihat seperti pada alokasi anggaran negara untuk pertahanan dan keamanan pada akhir tahun 1960-an hanya berjumlah sepertiga sampai setengah dari pengeluaran sesungguhnya yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Praktek keuangan yang tidak biasa ini, juga menciptakan suatu sistem, di mana perwira-perwira tertentu harus berada pada jabatan tertentu, dari mana dapat dikumpulkan kekayaan pribadi.⁵⁵

Dengan demikian tidak mengherankan jika bisnis Angkatan Darat pada awal Orde Baru tampak semakin menguat. Misalnya, kelompok bisnis Diponegoro pada tahun 1967, melakukan penggabungan dari sepuluh perusahaan agribisnis

⁵⁵ Lihat, Crouch, *Militer dan Politik.....*, h.309.

dengan nama PT Rumpun, kemudian memperluas bidang usahanya yaitu menggarap sektor perkapalan (*shipping*) dan *stevedoring*.⁵⁶

Pada dasawarsa 1970-an, ekonomi didominasi oleh semangat "pro-nasionalisme", dengan pilihan kebijaksanaan politik yang *exclusionary*, yaitu membatasi partisipasi hanya pada para anggota koalisi, dan menekankan praktek "minimisasi konflik dan maksimalisasi produktivitas."⁵⁷ Dengan kebijakan politik yang demikian, maka keterlibatan militer dalam ekonomi semakin intens. Kepemimpinan dalam BUMN diberbagai departemen (sebagai Komisaris/Direktur) didominasi militer. Perusahaan-perusahaan negara dalam sektor perekonomian yang strategis telah menjadi sumber dana utama bagi kekuatan-kekuatan politik dan kalangan militer, termasuk sebagai basis penumpukan kekayaan pribadi di kalangan pemegang kekuasaan. Melalui kewenangan yang dimilikinya, perusahaan negara mengalokasikan kontrak-kontrak untuk konstruksi, persediaan, dan distribusi bahan-bahan mentah, serta konsensi pengeboran minyak dan penebangan hutan. Bagi para pemimpin politik perusahaan negara juga merupakan sarana untuk memperoleh dukungan. Dengan demikian BUMN merupakan bagian integral dari dominasi politik kalangan militer dan fraksi-fraksi di dalamnya.⁵⁸

Dalam kepemimpinan militer dalam BUMN seperti yang terjadi pada Pertamina, Ibnu Sutowo (Letjen Purn/Direktur 1957-1976) dalam praktiknya bekerja

⁵⁶ Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h. 71

⁵⁷ Lihat, Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik*, h.215.

⁵⁸ Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h. 75.

sebagai perusahaan swasta yang bertanggung jawab hanya kepada pimpinan militer. Hal ini disebabkan Pertamina merupakan sumber dana terpenting bagi keuangan angkatan bersenjata dan pimpinan militer. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika pada tahun 1976 diungkapkan hutang-hutang sebanyak lebih dari \$ 10 milyar, pengganti Ibnu Sutowo juga dari perwira Angkatan Darat yang lain.⁵⁹ Kerugian Pertamina tersebut, patut dipertanyakan. Sebab pajak dari industri minyak sesungguhnya naik dari 15 % dari pendapatan dalam negeri pada 1967 menjadi lebih dari 50% setelah naiknya harga minyak pada 1973.⁶⁰ Akan tetapi sebagian besar keuntungan industri minyak sebenarnya tidak diserahkan kepada pemerintah, khususnya sampai awal tahun 1970-an, melainkan digunakan oleh Angkatan Bersenjata dan pimpinannya. Urusan keuangan Pertamina, dirahasiakan untuk menutup perannya sebagai sumber dana yang penting bagi pimpinan Angkatan Bersenjata dan juga sumber patronase yang penting bagi beberapa pengusaha besar.⁶¹

Perusahaan lain yang dikuasai militer adalah Bulog, yang semula bernama Komando Logistik Nasional yang didirikan pada 1966. Pada waktu Bulog dipimpin

⁵⁹ Lihat, Iswandi, *Bisnis Militer*....., h. 142-146, juga lihat Crouch, *Militer dan Politik*....., h.312.

⁶⁰ Menurut Subroto (Mantan Menteri Pertambangan), periode minyak bisa dilihat sebagai berikut. Pertama periode 1969-1979. Dalam kuan waktu ini kita mendapatkan hasil dari minyak yang baik. Pada 1969-1982 harga naik dari US\$ 3 ke US\$ 12, lalu menjadi US\$ 34 perbarel. Pada 1975 ketika Pertamina mengalami krisis. Dan pada periode ini, potensi di luar minyak terbelengkhai. Kedua periode 1982-1986, pemerintah mulai menyadari bahwa titik tertinggi harga minyak sudah tercapai, karena itu sesudahnya akan turun. Ketiga pasca 1986 sampai sekarang. Pada periode ini terpaksa kita mengambil langkah-langkah dan mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Ada yang bisa memanfaatkan dengan cepat dan ada yang kurang bisa. Di sinilah pokok dari permasalahan kesenjangan. Lihat, Wawancara Prof. Dr. Subroto : "Pola Eksplorasi Minyak Harus Pakai Riset Sharing", *Tempo Interaktif*, Edisi 32/15 Oktober 1996, Vol. II : September 1996 s/d Februari 1997, h.164.

⁶¹ Yahya, *Bisnis dan Politik*....., h.142.

Brigjen TNI Achmad Tirtosudiro, Bulog dibawah kontrol perwira Angkatan Darat baik di tingkat Pusat maupun daerah. Bisnis Bulog terutama dalam pengadaan beras untuk para pegawai negeri sipil maupun militer, melibatkan juga kalangan pengusaha Cina. Seperti halnya Pertamina, Bulog yang dikendalikan oleh tentara mengalami krisis keuangan, bahkan dikenal sebagai "pusat korupsi". Pada tahun 1973 Tirtosudiro dicopot dari jabatannya.⁶²

Keterlibatan militer dalam ekonomi disamping dalam BUMN juga dalam bentuk kedudukannya yang memiliki wewenang mengalokasikan fasilitas ekonomi (Lihat Tabel :1) serta dalam bentuk perusahaan/ yayasan dan koperasi. Di antara perusahaan militer Angkatan Darat yang menonjol adalah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) dan Yayasan Dharma Putra.

Yayasan Kartika Eka Paksi didirikan pada 1972, ketika Kasad dipegang oleh Umar Wirahadikusuma. Resminya YKEP berbisnis untuk kesejahteraan prajurit TNI-AD. Memang yayasan ini sudah dapat menyediakan 13.700 rumah BTN untuk prajurit TNI-AD dengan nilai investasi sekitar Rp.20 miliar. Juga memberikan beasiswa kepada anak-anak prajurit dan purnawirawan yang berbakat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dana yang dimiliki digunakan juga untuk membangun Universitas Ahmad Yani di Bandung, serta untuk hadiah Lebaran dan Natal bagi para prajurit TNI-AD. Disamping bidang sosial YKEP mengembangkan bisnis dalam arti sesungguhnya. Sejak 1972 setidaknya telah memiliki 26 anak perusahaan, yakni 22

⁶² Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h.77.

Tabel 1
Beberapa Politiko-Birokrat-Militer Yang Memiliki Wewenang
Mengatokasikan Fasilitas Ekonomi (1970-an)

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Jend. Sudjono Humardani	Bekas Kepala Deputy/Finansial dan Ekonomi Dewisi Diponegoro dan Kepala Deputy Finnek Komandan Pusat Angkatan Darat. Direktur PT. Truba, mantan ASPRI, tokoh penting secara politis dalam jaringan bisnis Cina dan Jepang. Juga anggota penting dari pimpinan Opsus di bawah kendali Ali Murtopo
2.	Jend. Sofar	Mantan Kepala Finnek Kostrad dan memimpin kelompok bisnis Kostrad, yaitu Yayasan Dharma Putra. Ia juga pernah menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri/KADIN
3.	Jend. Suryo	Mantan Direktur Yayasan Dharma Putra dan Direktur Hotel Indonesia Group milik pemerintah. Mantan Kepala Audit Pemerintah, dan ASPRI bidang Finnek. Ia juga pernah menjabat Direktur Pengendalian Keuangan Negara/Pekuneg bentukan Presiden Suharto, lembaga yang juga punya otoritas melaksanakan penyitaan perusahaan.
4.	Jend. Alamsyah Ratu Prativiranegara	Asisten ke VII Finnek Komando Pusat Angkatan Darat (1963-1965), ASPRI dan Sekretaris Negara (1969-1972)
5.	Jend. Tirtosudiro	Pernah menjadi ASPRI dan Ketua Bulog (1972).
6.	Jend. Suhardiman	Mantan Kepala Perusahaan Dagang Negara, PT Jaya Bhakti. Juga pernah mengepalai Serikat Organisasi Kerja Seluruh Indonesia (SOKSI) yang disponsori militer dan anti PKI, yang juga menjadi cikal bakal SPSI. Direktur Perusahaan Negara Pilot Proyek Berdikari, sampai 1972

Sumber : Richard Robinson , 1988, h. 252, sebagaimana dikutip Iswandi, 2000, h. 130.

perusahaan di bawah payung PT Tri Usaha Bhakti (Truba), dan 4 perusahaan berdiri sendiri.⁶³ Bisnis yang dikembangkan YKEP mencakup bidang-bidang yang strategis seperti perbankan, asuransi, kayu, pengelolaan hutan, konstruksi, kontraktor, transportasi udara, dan rekreasi (golf).

Bisnis institusional Angkatan Darat yang lain yang menonjol adalah Yayasan Dharma Putra milik Kostrad. Yayasan ini memiliki hubungan paling dekat dengan kelompok pejabat yang berasal dari posisi-posisi kekuasaan dominan dan berpengaruh di bawah Orde Baru. Oleh karena itu, Yayasan Dharma Putra menikmati pengaruh kekuasaan Suharto dengan memperoleh 28% keuntungan PT Bogasari Flour Mills yang dibagi dengan Yayasan Harapan Kita milik Ibu Tien Suharto. Hal ini tidak lepas dari fasilitas kredit permodalan yang dijamin oleh Suharto dari Bank Indonesia sebesar Rp. 2.800.000.000,00 yang segera cair dengan waktu 5 hari saja, meski seringkali disebutkan bahwa modal perusahaan tersebut hanyalah Rp. 100 juta.⁶⁴

⁶³ Perusahaan-perusahaan di bawah YKEP adalah PT Aerokarto Indonesia, PT Asuransi Cigna Indonesia, PT Cilegon Fabricators, PT Kayan River Indah Timber Plywood, PT Kultujaya Tri Usaha, PT Lukita Wahana Sari, PT Meranti Sakti Indah Plywood, PT Meranti Sakti Indonesia, PT Mina Mulia Djaya Bhakti, PT Panca Usaha Palopo Plywood, PT Pondok Indah Padang Golf, PT Private Development Finance Co., PT Sinkora Indonesia Lestari, PT Sumber Mas Indonesia, PT Sumber Mas Timber, PT Turba Anugrah Elektronik, PT Turba Gatra Perkasa, PT Truba Jurong Engineering, PT Truba Jurong Engineering Pie Ltd., PT Truba Sadaya Industri, PT Sakal Sakti, PT Kayan River Timber Product, PT Sempati Air, PT Internasional Timber Corporation Indonesia (ITCI), PT Bank Artha Graha, dan PT Danayasa Arthatama. Lihat, Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h. 79-80, lihat juga Iswandi, *Bisnis Militer.....*, h. 164.

⁶⁴ Iswandi, *Bisnis Militer.....*, h. 158.

Bisnis militer Angkatan Darat dalam bentuk koperasi yakni Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat), dikembangkan ke Kodim melalui Primkopad. Inkopad sedikitnya memiliki 9 perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan 7 perusahaan berstatus *joint-venture*. Kesembilan perusahaan tersebut, Kartika Plaza Hotel, Duta Kartika Kencana Tours & Travel, Kartika Aneka Niaga, Duta Kartika Cargo Service, Mina Kartika, Orchied Palace Hotel, Kartika Cipta Sarana, dan Mina Kartika Samudra. Sedangkan perusahaan yang berstatus *joint-venture*, adalah Hotel Kartika Plaza Bali, Rimba Kartika Jaya, Mitra Kartika Sejati, Kartika Inti Perkasa, Kartika Summa, Mahkota Transindo Indah, dan Duta Kartika Forwarder.⁶⁵

Sementara itu pada 21 September 1985 TNI - AD dan Kadin menjalin kerjasama untuk melatih dan mengembangkan para anggota Kopassus menjadi wiraswasta yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah/desa, yang disebut Operasi Prawita (Prajurit Wiraswasta).⁶⁶

Sampai pada dekade 1980-an nasionalisme ekonomi di bawah pimpinan militer, tampak berkembang. Akan tetapi faktor utama pemujaan perkembangan itu, karena naiknya harga minyak secara drastis pada tahun 1973/1974. Tahun 1981/1982 pajak minyak menyumbang sebesar Rp. 8.627 miliar atau 61,7% dari pendapatan nasional, dan 70 % dari pendapatan dalam negeri. Hasil ekspor minyak inilah yang memberi kemungkinan naiknya anggaran pembangunan dari Rp. 450 miliar pada tahun 1973/1974 menjadi Rp. 6.940 miliar pada tahun 1981/1982.⁶⁷

⁶⁵ Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h.82.

⁶⁶ Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h.82.

⁶⁷ Iswandi, *Bisnis Militer*, h.116-117.

Dinamika Gerakan Prodemokrasi 1966-1980-an

Tumbangnya rezim Demokrasi Terpimpin memunculkan Orde Baru dengan berbagai upaya melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan pada umumnya dan tatanan kehidupan politik. Pembangunanisme, menjadi dasar dalam penataan yang memberikan pembenaran terhadap pembinaan politik yang "bebas dari konflik ideologi", dan yang berdasarkan pada pragmatisme, rasionalisme, ketertiban dan keahlian praktis atau teknokratis.⁶² Tatanan yang demikian, menempatkan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik serta peranan teknokrat menjadi sangat menonjol. Perbedaan ideologi yang mewarnai kehidupan politik era sebelumnya dipandang sebagai penghambat pembangunan, karena menimbulkan konflik berkepanjangan. Untuk mengatasi hal ini peran politisi, perlu diganti dengan para teknokrat. Dan untuk kepentingan stabilitas politik, maka peranan militer menjadi sangat strategis dalam paradigma "pembangunanisme". Pengembangan demokrasi kemudian menjadi persoalan sekunder. Demokrasi diyakini akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang mantap.

Dalam upaya penataan yang sejalan dengan "pembangunanisme", maka Orde Baru kemudian melakukan pembenahan struktural terhadap saluran-saluran peran serta masyarakat. Pembenahan itu terutama bertujuan : (1) menyederhanakan struktur dan proses perwakilan kepentingan dengan memperkecil peranan politik

⁶² Mohtar Mas'ood, "Peran Serta Masyarakat : Kebijakan dan Pelaksanaan", dalam *Prisma* 9, (Jakarta : LP3ES, 1984), h. 50.

kepartaian, dan (2) mengarahkan peran serta masyarakat pada kegiatan menerapkan kebijaksanaan.⁶⁹ Penyederhanaan perwakilan kepentingan, merupakan upaya membuat DPR dan MPR lebih tanggap terhadap kehendak eksekutif dan juga mengurangi peranan dan jumlah partai politik, serta mengubah sistem perwakilan kepentingan berdasar partai menjadi sistem perwakilan berdasarkan fungsi atau "Korporatisme Negara".⁷⁰

Dalam model "Korporatisme Negara", saluran-saluran peran serta masyarakat terbatas pada wadah-wadah tunggal yang diakui/diciptakan pemerintah, seperti KNPI, SPSI, PWI, HKTI, HIPMI, KADIN dan KORPRI. Hal ini merupakan wujud dari kontrol terhadap proses-proses politik dalam masyarakat, agar partisipasinya dalam pembangunan sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah. Kontrol dilakukan oleh birokrasi sipil dan terutama birokrasi militer yang berkerjasama dengan kaum teknokrat dalam pengelolaan politik, ekonomi dan sosial.

Arif Budiman, membandingkan kekuatan-kekuatan sosial politik yang berperan dalam era Orde Baru dengan era sebelumnya, seperti terlihat pada diagram berikut (Lihat, Diagram 1).

⁶⁹ Mohtar, "Peran Serta.....", h. 51.

⁷⁰ Dalam sistem perwakilan kepentingan seperti ini, unit konstituensinya berjumlah terbatas, tunggal, mewajibkan keanggotaan, tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis, menarik anggota berdasar fungsi/profesi, memperoleh monopoli dalam bidang perwakilan kepentingan tertentu, mendapat pengakuan, izin dari atau bahkan diciptakan sendiri oleh pemerintah, dan pemilihan kepengimpinannya serta artikulasi kepentingannya dikendalikan pemerintah, Lihat, Mohtar, "Peran Serta.....", h. 51.

Diagram 1
Kekuatan-kekuatan Sosial Politik yang Berperan

	Presiden Dan Birokrasi Negara	Militer	Elit Sipil		Rakyat
			Pol- itik	Profe- sional	
Demokrasi Parlementer (1949-1959)	(X)	-	X	(X)	-
Demokrasi Tas-pimpin (1959-1965)	X	(X)	-	-	(X) ¹⁾
Negara Orde Baru (1965-sakarong)	(X)	X	-	(X)	-

Keterangan:

X : Berperan besar

(X) : Berperan, meski tidak dominan

1) : Terutama diorganisir oleh PKI.

Sumber : Arif Budiman, *Negara dan Pembangunan*, 1991, h. 43.

Dengan demikian dalam era Orde Baru peran serta masyarakat sangat terbatas pada dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Gerakan prodemokrasi sangat sulit berkembang.

Memang pada awal Orba, tampak ada kebebasan pers dan aktivitas mahasiswa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah, akan tetapi tidak mampu untuk mendorong demokratisasi. Hal ini misalnya dapat dilihat pada skema berikut ini:

Skema 1
Hubungan Pengaruh Pers, Mahasiswa dengan Negara Tahun 1966-1972
(dalam kasus korupsi dan proyek MII)

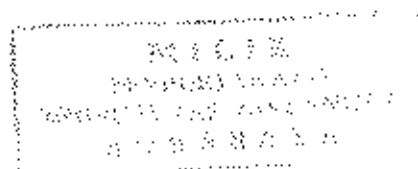
Kekuatan Politik Masyarakat	Tema Kritik	Reaksi Positif Negara	Reaksi Negatif Negara	Hasil
	1. Berantas Korupsi (1967-1968)	Pembentukan TPK dan <i>Task force</i>	Tuduhan merongrong kewibawaan negara, Penangkapan korupsi Kelas Teri.	Tidak sesuai dengan harapan Masyarakat
Pers dan Mahasiswa	2. Berantas Korupsi (1969-1970)	Pembentukan Komisi 4 dan UU No.3/1971 tentang PTPK	Tuduhan merongrong kewibawaan/kekuasaan negara	Tidak ada hasil nyata
	3. Batalan atau tunda proyek MII (1971-1972)	Memorandum Pansus DPR	Penangkapan, Penahanan Mahasiswa dan intro-grasi wartawan/redaktur	Gagal, Proyek MII jalan terus

Sumber: Akhmad Zaini Abar, "Kebebasan Pers, Kekecewaan Masyarakat dan Keperkasaaan Negara" (Studi Sejarah Pers Awal Orde Baru, 1966-1972), *Prisma 4*, (Jakarta : LP3ES, 1994), h.40.

Akomodasi pemerintah dengan pembentukan TPK (Team Pembrantasan Korupsi), *Task force* UI⁷¹, Komisi 4⁷² dan UU No.3/1971 tentang Pembrantasan

⁷¹*Task force* UI dipimpin Presiden Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera yang beranggotakan sejumlah staf pengajar dan mahasiswa UI, yang bertugas melakukan penelitian ke berbagai aparatur negara, kemudian membuat rekomendasi beserta hasil laporan penelitian untuk diserahkan kepada pemerintah dalam rangka membantu mengamankan dana negara terhadap berbagai penyelewengan dan korupsi. Lihat, Zaini Abar, "Kebebasan Pers.....", h. 25-26.

⁷²Awai Februari 1970, Presiden membentuk komisi yang kemudian disebut "Komisi 4" untuk merealisasikan tekadnya membrantas korupsi. Komisi ini diketuai Wilopo, SH (tokoh PNI dan



Tindak Pidana Korupsi (PTPK) tampak hanya bersifat simbolik atau formalistik saja.

Bahkan karena keterikatan pemerintah pada stabilisasi, berakibat pada penindasan terhadap gerakan protes. Seperti yang terjadi pada April 1968, ketika kenaikan harga bahan bakar 400% yang diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya membangkitkan oposisi yang lebih besar. Beberapa mahasiswa tertembak mati selama demonstrasi. Militer mulai mengganggu organisasi-organisasi mahasiswa yang mengkritik pemerintah. Bahkan Komandan Militer Jakarta, menyatakan kalau tindakannya itu disebut "hukum rimba", seperti yang dituduhkan para pemrotes, maka ia mengakui bahwa hukum itu diterapkan untuk melawan setan.⁷³

Puncak kekecewaan mahasiswa terlihat pada aksi protes yang dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) 1974, demonstrasi menentang dominasi asing khususnya Jepang atas ekonomi Indonesia, namun berubah menjadi penghancuran massal terhadap sebuah pertokoan di Jakarta, dan dengan demikian memberikan alasan yang tepat bagi militer untuk menindas para pemrakasa. Dan sekitar 700 yang ditangkap, 45 orang tetap ditahan dan 7 surat kabar ditutup untuk selamanya. Kemudian pemerintah membatasi ruang gerak politik mahasiswa dengan

Mantan Perdana Menteri), dengan anggota-anggota : I.J. Kasimo (tokoh Partai Katolik), Herman Johannes (tokoh Partai Persatuan Indonesia Raya dan mantan Rektor UGM, Yogyakarta), serta Anwar Tjokroaminoto (tokoh PSII), Mayjen Sutopo Yuwono (Kedua BAKIN) sebagai sekretaris, sedangkan Mohammad Hatta duduk sebagai penasihat. Komisi ini bertugas meneliti dan menilai kebijaksanaan dan hasil-hasil pemberantasan korupsi serta memberi nasehat dan saran kepada Presiden tentang tindakan selanjutnya untuk membrantas korupsi. Zaini Abar, "Kebebasan Pers....", h.30.

⁷³ Mohter, *Ekonomi dan Struktur Politik*.....,h.124-125.

mengeluarkan SK 028/1974 yang melarang kegiatan-kegiatan bersifat politik di kampus. Pada pertengahan 1976 muncul protes terhadap SK tersebut, dan kemudian dicabut oleh pemerintah. Pencabutan itu terjadi menjelang Pemilu 1977 dan SU MPR 1978, tampaknya pemerintah sangat berkepentingan menarik simpati dan mendapat legitimasi dari mahasiswa. Gerakan mahasiswa 1978 meskipun tanpa dukungan yang nyata dari cendekiawan, militer dan pemerintah, tetap menampilkan sebagai gerakan moral dan keengganan untuk ditunggangi.⁷⁴

Awal 1980-an merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa. Birokrasi kampus mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Infrastruktur politik mahasiswa seperti DEMAS, perpefoncoan, pers kampus dihapuskan atau diubah fungsinya, tidak lagi mandiri ditangan mahasiswa. Menjelang akhir 1980-an aksi protes mahasiswa muncul di kampus-kampus beberapa kota. Mulanya aksi-aksi tersebut mengangkat isu yang berkaitan dengan persoalan internal kampus atau isu yang tidak berkaitan langsung dengan politik. Tetapi tidak lama kemudian mulai mengalihkan ke persoalan-persoalan sosial.⁷⁵

Partai politik yang diharapkan dapat ikut mendorong tumbuhnya gerakan pro-demokrasi semakin melemah terutama ketika digiring untuk berfusi pada tahun 1973 menjadi 3 partai dari 10 partai, yaitu Golkar, PPP dan PDI. PPP mencakup

⁷⁴ Lihat, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik.....*, h.125, dan lihat Bonar Tigor Naipospos, "Mahasiswa Indonesia dalam Pangung Politik : Kearif Gerakan Rakyat?", dalam *Prisma 7*, (Jakarta : LP3ES, Juli 1996), h.26.

⁷⁵ Bonar, "Mahasiswa Indonesia.....", h. 29-31.

kekuatan Islam, meskipun memiliki persamaan tetapi juga tradisi bersaing terutama antara unsur MI dengan NU. Misalnya pemihakan dan dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan J.Naro pada awal 1980-an, justru lebih memperkeruh pertikaian internal NU-MI serta internal MI ketimbang menyelesaikannya.⁷⁶

Sedangkan PDI merupakan fusi yang lebih kompleks lagi antara agama non-Islam, sosialis, dan nasionalis (PNI). Peta konflik PDI sepanjang 1975-1988 memperlihatkan dominannya soal distribusi kekuasaan internal. Yaitu konflik Sanusi-Usep dengan Isnaeni-Sunawar pada tahun 1975-1977, Haryanto dengan Usep (1978), kemudian Isnaeni-Sunawar dengan Kelompok Empat (1981), maupun Sunawar-Haryanto (1985-1986).⁷⁷

Gerakan lain yang orientasinya pada *grass-root* adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO).⁷⁸ Namun pada awal perkembangannya pada 1960-an, strategi operasionalnya lebih ditekankan menangani kasus-kasus kelaparan dan kemiskinan dengan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Pada 1979-an, strateginya mulai berubah kearah mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang tersedia bagi mereka. Pada awal 1980-an bangkit kesadaran tentang pentingnya

⁷⁶ Syaenuddin Haris, "Pembinaan Politik, Demokratisasi dan Pembentukan "Civil Society" : Problematika Kepartaian Indonesia Di Bawah Orde Baru", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 17, (Jakarta : Kerjasama AAPI dan LIPI dengan Gramedia. Pustaka Utama, 1997),h.61.

⁷⁷ Haris, "Pembinaan Politik.....". h.62.

⁷⁸ Direktur LBH Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan LSM memang sulit dirumuskan. Namun secara sederhana, bisa dirlikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lihat, "Bangkitnya Sebuah Alternatif", *Tempo*, 4 Mei 1991, h.19.

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mencari terobosan untuk mengadakan perombakan sosial secara damai dan demokratis. LSM kemudian lebih berorientasi pada perubahan struktural. Tujuan jangka pendeknya melakukan perubahan struktural dan kelembagaan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Sedangkan tujuan jangka panjangnya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial serta partisipasi aktif dalam kebijakan politik pemerintah.⁷⁹

Baru pada akhir 1980-an LSM tampak dengan berani melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Tepatnya pada tahun 1989 Konperensi INGI (International NGO Forum on Indonesia) yang merupakan forum pertemuan antara LSM asal Indonesia dengan sejumlah LSM mancanegara guna membahas berbagai masalah tentang pembangunan Indonesia yang diselenggarakan di Nieupoort, Belgia pernah membuat panas kuping para pejabat tinggi Indonesia, karena banyak mengkritik beleid pemerintah RI. Seperti dalam kasus pembangunan Waduk Kedungombo yang tak beres penanganan ganti ruginya, serta pemaksaan terhadap penduduk agar meninggalkan lahan pertanahannya. Kesimpulan Konperensi ini kemudian diteruskan lewat surat kepada Bank Dunia dan IGGI- dua instansi yang dianggap ikut bertanggungjawab karena bantuan keuangan atas pembangunan waduk ini.⁸⁰

⁷⁹ Lilik Salamah, "Peran dan Posisi LSM dalam Hubungan Negara dan Masyarakat", dalam I Basis Susilo, Editor, *Masyarakat dan Negara : Kado Untuk Prof. Soetandyo Wigrijosoebroto, MPA*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1997), h.153-154.

⁸⁰ "Bangkitnya.....", h.18.

Meskipun berbagai kelompok kepentingan menunjukkan masih lemah, tetapi bukan berarti kekuatan masyarakat sama sekali hilang, karena masyarakat masih mempunyai "ketahanan praktis" maupun "ketahanan simbolis".⁸¹ Pada tahun 1970-an ketahanan praktis, mulai bergeser dari petani desa ke pekerja kota. Dalam menyuarakan penderitaannya ketahanan ini sering memakai cara spontan seperti protes dan mogok. Pada tahun 1988 terjadi unjuk rasa buruh sebanyak 39 kali, dan pada 1989 terjadi 19 kali.⁸² Masa akhir 1980-an merupakan masa kembali maraknya demonstrasi.

Dinamika gerakan prodemokrasi pada era 1965 – 1980-an, tampak mengalami pasang surut dan belum mampu mendorong pengembangan kehidupan yang lebih demokratis. Hal ini berkait erat dengan masalah hubungan negara dengan masyarakat. Negara Orba yang mengutamakan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada stabilitas politik, membawa konsekuensi lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan kooptasi terhadap berbagai kelompok

⁸¹ Ketahanan praktis atau langsung adalah aktivitas yang menyuarakan kepentingan sosial dan tuntutan sebagai tantangan langsung terhadap kebijakan pemerintah tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang lebih toleran dan untuk menolak kebijakan tertentu pemerintah. Sedangkan, ketahanan simbolis merupakan tindakan tak langsung melawan pemerintah. Tujuan utamanya adalah meletakkan penderitaan sosial pada sikap simbolik, di mana kritikan terhadap pemerintah diungkapkan dengan halus dan terkadang humor dalam semangat kritik membangun. Media utamanya adalah media massa, teater dan pertemuan informal. Meskipun ketahanan ini dilakukan oleh para intelektual, mahasiswa dan artis, skoper dan ukurannya tak terbatas karena ekspresi simbolik ini bisa melibatkan semua grup masyarakat dari bawah sampai atas. Lihat, Bob S.Hadivinata, "Masyarakat Sipil Indonesia: Sejarah, Kelangsungan dan Transformasinya", *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No.1, (Yogyakarta : Insist, 1999), h. 11-13.

⁸² R.Eep Saefullah Fatah, "Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi : Potret Pergeseran Politik Orde Baru", *Prisma* 4, April 1994, h. 12.

kepentingan dalam masyarakat. Partisipasi politik kemudian hanya diberikan kepada kelompok kepentingan yang bersedia dikooptasi. Partisipasi yang demikian tidak signifikan dengan upaya pengembangan demokratisasi, karena tetap dalam kontrol negara. Sehingga masyarakat yang seharusnya mampu melakukan kontrol terhadap negara, tapi dalam realitas justru dikontrol oleh negara secara ketat. Dalam kondisi yang demikian, negara akan berkembang semakin kuat, sebaliknya posisi masyarakat semakin lemah. Hal ini misalnya dapat dilihat gambaran perkembangan hubungan antara negara dengan masyarakat, yang diperlihatkan Hal Hill semenjak dari era Orde Lama sampai akhir 1980-an pada era Orde Baru (Lihat, Tabel 2).

Tabel 2. Society and State in Indonesia 1945 – 90

	Old Order		New Order		
	1945 – 59	1959 – 65	1965 – 74	1974 – 84	1984 - 90
Society	Highly participatory mobilisation system Parties and mass Organisation vigorous	Parties increasingly constrained but still used by Sukarno as Counterweight to Army	Highly participatory at first but less so after 1971 election	Popular participation in politics and policy-making much reduced	Exclusionary regime little popular participation in politics
State	Constrained by lack of funds and constant need to ensure popular support, weak governments, with low level of autonomy	State autonomy much greater, but still severely limited by lack of funds and regional smuggling	Government weak at first, but becoming stronger as economic growth increases revenues and control over resources	Strong state, with oil revenues abundant; increasingly autonomous	Strong state, highly autonomous despite declining of revenues

Sumber : Hal Hill, (Edited), *Indonesia New Order : The Dynamics of Socio - Economic Transformation*, (NSW Australia : Allen & Unwin Pty Ltd, 1994), h. 3.

BAB V

RESPON MILITER TERHADAP GERAKAN PRO DEMOKRASI (1990-1998)

Bab V ini merupakan deskripsi hasil penelitian. Dalam Bab ini, akan dideskripsikan mengenai kondisi keterlibatan militer dalam politik dan ekonomi serta gerakan prodemokrasi pada kurun waktu 1990-an. Kemudian selanjutnya dideskripsikan mengenai respon militer terhadap berbagai gerakan prodemokrasi.

Keterlibatan Militer Dalam Politik : Konsolidasi dan Kegamangan Menghadapi Perubahan

Memasuki awal 1990-an, tampak ABRI melakukan konsolidasi baik dalam jajaran ABRI, kekaryaan, dan sebagai unsur Golkar. Konsolidasi dalam jajaran ABRI misalnya, tampak bahwa selama jangka waktu 30 bulan (Juli 1990-Januari 1992) terjadi 92 pergantian (tingkat pusat, kodam dan korem). Sementara dalam 13 bulan berikutnya (Januari 1992 – Agustus 1993) jumlah pergantian itu mencapai 131. Jumlah itu tentu saja, tak termasuk anggota ABRI yang di “karyakan” di jalur legeslatif. Intensitas mutasi ini, ada keterkaitan dengan “kerentanan politik” makro di Indonesia.¹ Sampai tahun 1992 ada sekitar 14000 pejabat ABRI yang melaksanakan tugas kekaryaan (karyawan *tasks*) yang dikontrol oleh Kassospol

¹ “Dua Jenderal Santri di Pucuk Piramida ABRI”, *Tiraz*, No.4/Thn. 1, 23 Februari 1995, h. 58.

ABRI. Dari tugas bisnis sampai birokrasi, dari tugas operasional seperti kapten penerbangan komersial sampai tugas kebijakan (*policy tasks*) seperti gubernur propinsi. Mayoritas pejabat ABRI yang dikaryakan adalah dari Angkatan Darat, yang direkrut dari lulusan Akademi Militer. Hal ini bisa dipahami, misalnya pada kelas TNI-AD di Akademi Militer pada tahun 1973 menerima 400 taruna, penerimaan yang begitu besar dimaksudkan untuk mengisi jabatan kekarayaan (*karyawan post*).²

Adanya pendapat yang mengkaitkan mutasi besar-besaran dalam jajaran ABRI tersebut di atas, dengan “kerentanan politik” tampak tidak mengada – ada. Karena pada 1993 militer mencoba menekan Presiden melalui F-ABRI di DPR mendeklarasikan dukungan yang kuat terhadap Pangab Jenderal Try Sutrisno untuk menduduki jabatan Wakil Presiden 1993-1998. Langkah F-ABRI mendahului dan tanpa dikonsultasikan lebih dahulu dengan FKP dan FUD. Seperti yang pernah dilakukan FKP ketika mencalonkan Sudharmono sebagai Wakil Presiden yang mendahului FABRI dan FUD. Kasospol ABRI Harsudiono Hartas menyatakan ABRI dengan izin presiden akan mencalonkan Try Sutrisno. Namun ketika ditanyakan apakah sudah dikonsultasikan dengan Pak Harto, Hartas menjawab, “Ini akan dikonsultasikan”.³ Nampak pencalonan Try Sutrisno oleh F-ABRI sebagai mendahului sebelum dikonsultasikan kepada Presiden sebagai Pangti ABRI.

² Ian Mac Farling, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia*, (Australia: Australian Defence Studies Centre, 1996), h. 145 – 146.

³ Mohtar Mas'ood & Riza Noer Arfani, “SU-MPR dan Pembentukan Kabinet VP”, *Profil Indonesia*, *Jurnal Tahunan CIDES No. 1/1994*, h. 332.

Oleh karena itu, tak mengheran jika kemudian mengundang komentar Suhardiman (anggota DPA dan MPR yang ketua Dewan Pimpinan SOKSI), proses demokrasi belum selesai, politik adalah *the art of possibility*, jadi meskipun sudah terpilih satu calon wakil presiden, masih harus menunggu pertimbangan pikiran dan perasaan politik presiden terpilih.⁴

John T. Sidel, melihat pencalonan Try Sutrisno sebagai pendirian militer untuk membuka persiapan dan mendukung sirkulasi pada pusat kekuasaan negara Orde Baru.⁵ Penekanan ini sukses dan menutup kesempatan Habibie yang tampaknya merupakan kandidat wakil Presiden pilihan Presiden Soeharto.

Pada sisi lain, terhadap gagasan pencalonan kembali Presiden Soeharto, militer tampak kurang antusias. Letjen Harsudiono Hartas, Kassospol ABRI menyatakan bahwa pimpinan F-ABRI akan membicarakannya dengan Soeharto tiga bulan sebelum SU-MPR. Jikalau Suharto tidak bersedia, ABRI juga sudah siap mencalonkan yang lain. Bahkan pernyataan yang lebih jelas lagi dikemukakan Letjen (Purn.) Hasnan Habib bahwa di masa mendatang, dengan tantangan yang lain, maka dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda.⁶

⁴ Mas'ood & Arfani, "SU-MPR.....", h. 333.

⁵ John T. Sidel, "Macel Total : Logics of Circulation and Accumulation in The Demise of Indonesia's New Order", *Majalah Indonesia*, Number 66, October 1998, Cornell Southeast Asia Program, 1999, h. 175.

⁶ Suryadinata, *Golkar dan Militer.....*, h. 152.

Tampaknya Soeharto menyadari, militer mulai mampu memainkan peran politiknya terlepas dari kontrolnya dan dukungan terhadapnya mulai menurun. Oleh karena itu, ketika sesudah SU MPR pada tahun 1993 Presiden Soeharto mengangkat Jenderal Faisal Tanjung sebagai Pangab dan Jenderal Wismoyo Arismunandar sebagai KSAD, di pandang sebagai upaya mengembalikan kemampuan kontrolnya terhadap militer. Kemudian ketika pada tahun 1995 Wismoyo diganti Jenderal Hartono yang berduet dengan Jenderal Faisal Tanjung, kedunya dari keluarga santri dan dekat dengan golongan Islam (ICMI), ada pimpinan ABRI yang merasa tidak senang. Dalam hal ini Crouch, menyatakan kalau dulu golongan Islam selalu merasa dipojokkan oleh ABRI, sejak akhir 1980-an. Pak Harto telah menganggap orang Islam yang terorganisasi dalam ICMI sebagai sekutu politik yang semakin penting. Pendekatan Pak Harto terhadap ICMI tidak disukai oleh sementara pemimpin ABRI. Lebih lanjut, Crouch, menyatakan sikap baik-baik ABRI terhadap ICMI belum tentu meresap kedalam tubuh ABRI yang sudah begitu lama bersikap curiga terhadap organisasi-organisasi Islam yang dianggap berbau "neo-Masyumi".⁷ Misalnya dalam gambaran Hartas, ICMI as "*individualistic, Islamic and extreme*".⁸

Ketidak senangan terhadap ICMI dapat dipahami, karena ICMI yang berdiri pada awal 1990-an, dengan Habiebie sebagai ketuanya" dikafangkan para

⁷ Harold Crouch, "ABRI dan Islam", *Tirias*, No.4/Tm. 1, 23 Februari 1995, h. 59.

⁸ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia : Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, (London : Routledge, 1995), h. 145.

aktivis Muslim dilihat sebagai kendaraan untuk mendesak tatanan politik baru – yang tidak terlalu tergantung pada militer dan mencerminkan lebih banyak kepentingan Muslim dan non-Jawa”.⁹ Pernyataan-pernyataan Habibie , setelah selesai berbicara di hadapan para perwira militer, menunjukkan keinginan adanya tatanan baru dimana sipil memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan nasional. Habibie, sebagai Menristek yang ketika itu juga sebagai Ketua ICMI ditugasi Presiden Soeharto untuk berbicara dihadapan para perwira ABRI tentang visi masa depan ABRI Pada 21 September 1996 ceramah dilakukan di Markas Sesko ABRI Bandung, dihadapan para siswa Sesko ABRI, Seskoad, Sespimpol, serta para perwira Garnizun Bandung – Cimahi. Lima hari kemudian berbicara di Gedung Olah Raga A. Yani Mabes ABRI Cilangkap dihadapan 1200 perwira dari ketiga angkatan dan Polri, selama lima setengah jam. Dari sedikit keterangan Habibie kepada ADIL , dalam kedua ceramah itu diayatakan, yang eksklusif adalah ABRI dari Angkatan '45 sebab seratus persen anggota ABRI waktu itu adalah Angkatan '45 yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Setelah Angkatan '45 menjadi ABRI adalah pilihan profesi yang berjuang bersama profesi lain untuk membangun bangsa. Lebih lanjut Habibie menyebut adalah keliru bila memilih pemimpin nasional hanya dari lingkungan ABRI saja, atau dari sipil saja.

⁹ John McBeth, Michael Vatikiotis dan Margot dan Margot Cohen, "Indonesia Masih Terkatung – kalung", Laporan, Far Eastern Economic Review, 4 Juni 1998, dalam Inam Baehaqi (Penyunting), Soeharto Lengser: Perspektif Luar Negeri, Terjemahan , Farid Wahdiyono, (Yogyakarta : LKIS, 1999), h. 112.

Carapurkan keduanya, dan pilih yang terbaik.¹⁰

Salim Said, berpendapat ceramah Habiebie di Cilangkap dan Seskoad, adalah usaha Pak Harto untuk menjembatani apa yang banyak dilihat orang sebagai masih adanya jarak antara Habiebie dengan ABRI. Mendekatkan itu, karena keduanya sebagai pembantu Presiden. Kedua-duanya melaksanakan kebijaksanaan Presiden. Itu bukan kebijaksanaan ABRI sendiri, atau Habiebie sendiri.¹¹

Disamping melakukan kontrol tugas kekaryaan, militer juga pada awal 1990-an, terlihat secara pro-aktif melakukan konsolidasi dalam hubungannya dengan Golkar. Konsolidasi itu dilakukan, karena pada Sidang Umum MPR Maret 1988, telah terjadi perbedaan antara F-KP dengan F-ABRI dalam pencalonan Wakil Presiden Sudharmono. F-KP dengan bulat lebih dulu mencalonkan Sudharmono. Reaksi F-ABRI, diam dan tak mengajukan nama, cuma mendukung saja. Hal ini mengejutkan, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Yang sudah-sudah F-ABRI, bersama F-KP dan F-UD selalu kompak menyebutkan nama. Kemelut ini, sempat menimbulkan insiden. Anggota F-ABRI Brigjen Ibrahim Saleh, dalam sidang pleno tiba-tiba saja melakukan interupsi. Sempat terdengar ia berbicara tentang masalah pencalonan, sebelum akhirnya diminta turun. Peristiwa ini juga menunjukkan melemahnya komunikasi tiga jalur. Dalam konteks ini Jenderal Purnawirawan Sumitro, bekas Pangkopkamtib, menyatakan pada masa

¹⁰ "Mencari Sosok ABRI Abad 21", *Tabloid Adil*, No. 01, Tahun Ke-65, 5-15 Oktober 1996, h. 5.

¹¹ Lihat, Wawancara Salim Said, dalam *Tabloid Adil*, No. 01, Tahun Ke-65, 5-15 Oktober 1996, h. 8.

peralihan untuk melepas peran ABRI di Golkar yang akan terjadi nanti, bisa saja menimbulkan kekosongan kekuatan, bahkan kekacauan. Itu sebabnya mekanisme tiga jalur akan tetap ada dan paling tidak dipertahankan sampai 1993.¹²

Konsolidasi juga terlihat pada upaya menyiapkan anggota keluarga ABRI (KBA) untuk menjadi pimpinan Golkar di tingkat I dan II menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Jakarta, Oktober 1993. Dari 27 Propinsi yang ada, KBA menguasai 21 propinsi, dan dari 301 DPD tingkat II, tercatat 230 cabang diketuai dari unsur KBA.¹³ Menurut Jenderal (Purn.) Sumitro, menguasai kepemimpinan Golkar di daerah untuk menghalangi seseorang menjadi pimpinan Golkar di Munas.¹⁴ Maka tak mengherankan ketika hasil Munas Golkar 1993, yang terpilih Harmoko (sipil) sebagai Ketua DPP, suara tak puas sempat keluar dari lingkungan ABRI. Misalnya, seminggu setelah Munas Mayjen Raja Kami Sembiring Meliala, anggota pimpinan Fraksi ABRI di DPR, menyatakan: "Kendati kalah dalam perebutan posisi puncak Golkar, ABRI tak akan melepas kursi presiden ke sipil karena rakyat masih menghendaki tokoh militer sebagai presiden mendatang". Pada bagian lain, Sembiring menyatakan: "Kalau Golkar sudah dikuasai orang lain, kan lebih baik kita tinggalkan". Namun Pangab Jenderal Faisal Tanjung meluruskan lewat sebuah siaran pers, bahwa ABRI mendukung

¹² "Tiga Jalur Arti Korsleting", *Tempo* 21 September 1991, h. 32.

¹³ "Munas dan Strategi ABRI", *Editor*, No.5/Th. VII/ 28 Oktober 1993, h.23.

¹⁴ "Utuk Apa Soemitro Menggebrak", *QATRA*, 8 Juli 1995, h. 23.

reperennahnya hasil Munas Golkar. Karenanya, semua pernyataan yang tak senapas dengan hal di atas tak bisa dianggap sebagai sikap ABRI.¹⁵

Upaya konsolidasi terus dilakukan seperti terlihat ketika menghadapi Pemilu 1997, penjabatan kursi dewan dalam pencalonan disepakati jalur A dan B masing-masing 30% dan jalur C sebanyak 40%. Calon dari jalur C diperkirakan semakin banyak dari KBA. Sehingga diharapkan ide serta kepentingan militer semakin mendapat dukungan di lembaga perwakilan.¹⁶ Anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 1997 dikenal sarat dengan nepotisme, termasuk dari kalangan militer. Bahkan KSAD Jenderal R.Hartono, dalam Kampanye Pemilu 1997 menyatakan secara tegas bahwa ABRI adalah kader Golkar.

Meskipun secara jelas militer melakukan konsolidasi posisi politiknya dan tetap menggunakan Golkar sebagai mesin politiknya, tetapi Letjen Syarwan Hamid melihat justru peran sospol ABRI pada 1990-an adalah "Tut Wuri Handayani". Mengodepankan peran dinamisator, tanpa mengabaikan perannya sebagai stabilisator. Ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan dan mendorong kekuatan atau komponen nasional yang lain, agar dapat lebih berperan secara fungsional dan maksimal. Namun dalam melakukan peran tersebut, tetap juga berprinsip pada "ing Ngarso Sung Tulodo" dan "Ing Madyo Mangun Karso". Ketiganya berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Saling terkait dan melengkapi. Apabila terjadi kemandekan

¹⁵ "Turun Naik", h. 29.

¹⁶ Lihat, Arbi Sanit, "Pencalonan Pemilu Golkar", *Tempo Interaktif*, Edisi 32/1, 15 Oktober 1996, Vol.II, September 1996 s/d Februari 1997, h. 169.

sistem, ABRI siap tampil dalam posisi” Ing Ngarso Sung Tulodo”. Sedangkan kalau terjadi perbedaan atau belum dicapai kesepakatan, maka ABRI siap tampil dalam posisi “ Ing Madyo Mangun Karso”.¹⁷ Masih menurut Letjen Syarwan Hamid pada era 1990-an, peran sosial politik ABRI dipermasalahkan “utilitas” (nilai guna/manfaat). Artinya sampai sejauh mana manfaat peran sospol ABRI bagi demokrasi. Apa relevansinya untuk menjamin konsistensi, kontekstualisasi, dan aktualisasi perannya agar semakin akseptabel dan feasible, sampai dengan tuntutan dan tantangan masa depan.¹⁸

Ketika melihat derasnya tuntutan reformasi politik dari masyarakat, Ketua F-ABRI Mayjen TNI Hari Sabarno, menyatakan tentang pandangan reformasi politik menurut ABRI. Dalam reformasi politik, ABRI lebih mengutamakan reformasi kultural. Yaitu perubahan etika, budaya politik. Untuk menyatukan perbedaan politik, perbedaan ras dan agama yang beraneka ragam ini dibutuhkan etika dan budaya politik. Tidak bisa yang besar memaksakan kehendaknya, sehingga menjadi diktator mayoritas. Sedangkan yang kecil merasa tidak diperhatikan, sehingga menjadi tirani minoritas, itu juga tidak benar.¹⁹

Tuntutan reformasi politik berkembang dalam eskalasi krisis politik yang menunjukkan kekuatan reformasi tidak mungkin bisa dibendung lagi, namun

¹⁷ Syarwan Hamid, “Peran Sospol ABRI”, Selamat Ginting, dkk., Editor, *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung : Mizan, 1997), h. Pengantar xxvi.

¹⁸ Syarwan Hamid, “Peran Sospol”, h. Pengantar xxiv.

¹⁹ Wawancara Mayjen TNI Hari Sabarno, “ABRI Sekarang Akan Lebih Akomodatif dan Modern”, *Tempo Interaktif*, Edisi 50/II, 14 Februari 1998, Vol.VI, Desember 1997 – Februari 1998, h. 451.

militer sebagai kekuatan politik dominan tampak ada kesan bersikap gamang terhadap perubahan. Memang ABRI menggelar dialog pada 18 April 1998, dihadiri 25 tokoh masyarakat, 29 Ormas Pemuda, sejumlah ilmuwan dan 39 Senat Mahasiswa, di gedung Graha Niaga, lantai 6 PRJ (Pekan Raya Jakarta). Dialog itu ditolak oleh para mahasiswa dari kampus besar seperti UI, UGM, ITB dan IPB. Dalam dialog tersebut Menhankam Pangab Jenderal Wiranto, dalam menanggapi berbagai pertanyaan antara lain menyatakan:

Beberapa kejadian kritis dalam perjalanan bangsa ini terselamatkan karena adanya dua fungsi ABRI itu. ABRI menyadari bahwa Dwifungsi ABRI harus tetap lestari. Hanya implementasinya perlu perkembangan – perkembangan yang kita katakan ada penyesuaian dengan nilai-nilai instrumental. Karena itu ABRI dari ing ngarsa sung tulada (di depan), ing madya (di tengah), sekarang menjadi tut wuri handayani. Menyadari bahwa saat ini elemen-elemen bangsa perlu didorong ke depan, karena itu kita tutwuri handayani, walau tidak kaku begitu. Bukan harga mati. Bisa saja kita ke depan, ke tengah dan di belakang. Ini membuktikan ABRI responsif terhadap perkembangan. Karena itu jangan dicurigai.²⁰

Arah perubahan yang tidak jelas dari militer menghadapi tuntutan reformasi politik, nampak ketika ditanya Jawa Pos, tentang *follow up* konkret dari dialog. Menurut Wiranto, itu tidak harus ada solusi karena luasnya materi yang digagas. Dialog itu berbeda dibandingkan seminar maupun lokakarya, yang harus dicari kesimpulannya. Dialog itu sekedar tukar pikiran untuk mengomunikasikan pikiran – pikiran dari masyarakat, yang kemudian diserap pemerintah. Yang

²⁰ "Mulailah dengan Mengakui Dosa-dosa Politik", *Majalah Tatuk*, No.5, Th. 1, 30 April 1998, h.2 dan 3.

penting sekarang sudah ada penyerapan aspirasi dari masyarakat. Tapi hasil dialog ini sudah pasti akan saya laporkan kepada Presiden.²¹

Arbi Smit, menilai dialog itu sebagai keinginan ABRI memberi kesan kepada masyarakat awam bahwa ABRI baik. Padahal ABRI yang bertanggung jawab selama ini tidak menunjukkan arah perubahan. Dengan nada yang sama, Amin Rais menilai dialog saja tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Apalagi kalau dialog itu hanya sekedar *lips service*.²²

Keengganan untuk melakukan perubahan juga nampak, pada waktu menanggapi pernyataan Ketua MPR Harmoko (18 Mei Sore 1998) atas desakan mahasiswa yang menyerukan kepada presiden agar "mengundurkan diri, demi persatuan dan kesatuan bangsa". Beberapa jam setelah seruan Harmoko itu, Wiranto mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pernyataan, bahwa tuntutan para pemimpin MPR agar presiden mundur itu tidak konstitusional dan mengancam bertindak tegas bila aksi protes berlanjut.²³ Hal itu dibuktikan, ketika militer menggagalkan rencana pengerahan massa model Manila di Monas. Para Jenderal memblokir lokasi tersebut dengan mengerahkan 15.000 tentara dan memperingatkan pemimpin aksi, Amin Rais, bahwa rapat umum dapat memicu pembantaian. Pada pagi hari di saat hari --H- 20 Mei, Amien mengimbau

²¹ "Dialog Mahasiswa -- ABRI, Siapa Untung?", Jawa Pos, 20 April 1998, h. 3.

²² "Dialog itu Tidak Efektif", Jawa Pos, 20 April 1998, h. 3.

²³ Malinda Liu, "Kemenangan Mahasiswa dan Manuver Para Jenderal", Laporan, Newsweek, 1 Juni 1998, dalam, Imam Baihaqi (Penyunting), Soeharto Letgser....., h. 41.

masyarakat untuk tetap tinggal di rumah.²⁴

Militer baru kelihatan terpicu enggan membantu Soeharto, ketika basis kekuatan Soeharto sudah berantakan, yaitu melemahnya dukungan dari MPR dan mundurnya 14 menteri dalam kabinetnya. Kemudian Jenderal Wiranto menemui Soeharto pada Rabu malam (20 Mei), dan mengatakan kepadanya bahwa ABRI tidak lagi dapat menjamin keamanan di Jakarta. Meskipun aksi protes massa telah diminta berhenti pada menit-menit terakhir untuk menghindari konfrontasi dengan 17.000 pasukan yang dikerahkan di Ibukota, sedikitnya 30.000 mahasiswa masih menduduki gedung MPR. Soeharto akhirnya tahu bahwa tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkan, dia kemudian lengser.²⁵

Setelah pernyataan berhentinya Presiden Soeharto, dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyatakan sikap politik: mendukung pemberhentian Presiden Soeharto dan pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai presiden, ABRI akan tetap berperan aktif mencegah penyimpangan dan hal-hal yang akan mengancam keutuhan bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris MPR, termasuk Bapak Soeharto dan keluarganya.²⁶ Dalam perkembangan mengenai perlindungan terhadap mantan Presiden Soeharto, Jaksa

²⁴ Liu, "Kemenangan Mahasiswa....", h.43.

²⁵ Michael Vatikiotis dan Adam Schwarz, "Kejatuhan Soeharto dan Kebangkitan Rakyat Indonesia: Menengok Hari-hari Terakhir Soeharto di Istana", *Far Eastern Economic Review*, 4 Juni 1998, dalam Imam Baihaqi (Penyunting), *Soeharto Lengser*, h. 69.

²⁶ "ABRI Sambut Baik Pernyataan Berhenti HM Soeharto", H.U. Sore Yogya Post, 21 Mei 1998, h. 1 dan 11.

Agung Marzuki Darusman, menyatakan “ Pak Wiranto, mengutamakan kehormatan dari Pak Harto. Di sisi lain, ada yang motivasinya kehormatan bangsa”.²⁷

Dalam melihat masalah krisis politik yang berkembang sejak pertengahan 1997, militer (Mabas ABRI) melihatnya dari alir pendekatan masalah. Berangkat dari pendekatan ini, maka pada umumnya kelemahan fungsi dan sistem yang terjadi diakibatkan adanya budaya politik yang kurang kondusif terhadap terbangunnya paradigma yang menuju kepada implementasi normatif dari ketentuan yang ada. Kemudian secara umum dalam bidang struktural, diidentifikasi karena kekuatan terlalu terpusat pada eksekutif.²⁸

Bisnis Militer di Tengah Kesenjangan dan Krisis Ekonomi

Survey yang dilakukan Ian Mac Farling pada 1990-an terhadap pejabat TNI-AD yang telah belajar di Sesko-AD pada 1972, 84% responden menyatakan alasan mereka belajar adalah untuk kepentingan ekonomi.

Concern with money was highlighted by an survey of TNI-AD officers who were students at Sesko-AD in 1972. It was undertaken at the instigation of the deputy commandant with the aim of discovering the reasons why the officers had joined the TNI-AD. 84% of the respondents cited economic reasons. They heis no prospect of advancement in civilian life through family contacts of lack of

²⁷ Wawancara Marzuki Darusman, “Kejaksan Tidak Bisa Jadi Lahan Perpolitikan”, *Forum Keadilan*, No.12, 14 November 1999, h. 80.

²⁸ Mabas ABRI, *ABRI dan Reformasi : Pokok-Pokok Pikiran ABRI Tentang Reformasi Menuju Pencapaian Cita-Cita Nasional*, Jakarta, Juni 1998, h.5.

*money. In short they were all from poor families and could not progress in civilian society because of their background.*²⁹

Tingginya minat para perwira TNI-AD diatas, terlihat semakin menguatnya bisnis yang dikelolanya. Misalnya, TNI-AD melalui YKEP juga memiliki usaha berskala besar seperti pembangunan Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (Sudirman Central Business Distric, SCBD) yang menelan biaya sekitar 3,25 miliar dolar AS, dan peresmianya dihadiri oleh para menteri, Gubernur DKI, para pengusaha kelas kakap, serta para diplomat asing pada awal 1990-an. Ada dua perwira tinggi yang hadir saat itu, yang merupakan salah satu wakil para pemegang saham, yakni Jenderal TNI Edy Sudrajat dan Mayor Jenderal TNI T.B. Silalahi.³⁰

Perekembangan bisnis Angkatan Darat semakin meluas. Pada 1997, melalui Yayasan Kesejahteraan (YK) Kobame (Korps Baret Merah) dan PT Kobame Propertindo, bekerjasama dengan pihak swasta (Masagung Corp), mendirikan Graha Cijantung yang biaya pembangunannya sekitar Rp. 55 milyar. YK Kobame juga memperkuat bisnisnya dengan mulai menerjuni bisnis angkutan penyeberangan di rute Merak – Bakauheni, dan yayasan ini akan turut mengoperasikan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tribuana I untuk rute tersebut. KMP Tribuana I, yang berharga Rp.7,5 miliar, akan dikelola oleh PT Tribuana Antar Nusa (TAN). YK-Kobame menguasai 70% saham TAN. Dibandingkan 16 KMP lain yang sudah menangani rute Merak – Bakauheni, KMP Tribuana I konon memiliki kecepatan sekitar dua kali lipatnya, yaitu 18 knots sehingga waktu tempuh

²⁹ Ian Mac Farling, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces : Military Politics in Indonesia*, (Australia : Australian Defence Studies Centre, 1996), h. 169.

³⁰ Indria Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 80.

menjadi hanya sekitar 45 menit. Padahal KMP lain membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk jarak yang sama.³¹

Jenderal Nasution, pada 1993 (pada HUT ke-48 ABRI) meminta perhatian ABRI dalam menghadapi masa depan bisa menumbuhkan kelompok menengah Indonesia yang diharapkan bisa menjadi soko guru demokrasi. Bagi ABRI tak ada pilihan lain kecuali mengendalikan konglomerat, demi terciptanya pemerataan ekonomi rakyat.³² Selama ini, seperti dikatakan Kwik Kian Gie, ABRI berperan besar dalam stabilitas politik dan hankam, ketenangan dan ketentraman berusaha bagi konglomerat. Tapi ABRI tidak ikut campur sama sekali di dalam pembentukan kebijakan pembangunan ekonomi.³³ Gus Dur Ketua PBNU, melihat selama ini ABRI hanya sebagai centeng, tukang pukul untuk mengamankan pembangunan.³⁴

Menhankam Jenderal Edy Sudrajat ketika itu, menyadari keahlian ABRI lebih banyak di bidang lain (politik). Tapi ia berharap bisa solid dalam bidang ekonomi.³⁵ Karena masih lemahnya manajemen dalam ekonomi, maka bisnis militer dalam pengelolannya banyak bekerjasama dengan konglomerat. Mayjen Hari Sabarno Ketua F-ABRI di DPR, menyatakan, "Kalau ABRI memiliki yayasan dan mengelolakan yayasan itu kepada konglomerat, itu hanya untuk menjaga profesionalitas. Sehingga diharapkan para pelaku ekonomi itu akan berperilaku ekonomi demi negara, demi bangsa, dan demi rakyat. Bukan

³¹ Samego, et al., *Bila ABRI Berbisnis*, h. 82.

³² "Semangat Baru Dwifungsi ABRI", *Editor*, No.3/Thn. VII/14 Oktober 1993, h. 20.

³³ "Membangkitkan Lapisan Menengah", *Editor*, No.3/Thn. VII....., h. 25.

³⁴ "Semangat Baru.....", h. 20.

³⁵ Lihat, Wawancara Menhankam Edy Sudrajat, "ABRI Iktu Mendorong", *Editor*, No.3/Thn. VII/14 Oktober 1993, h. 20.

ekonomi untuk dirinya sendiri".³⁶ Letjen (purn.) Solihin G.P, tidak mempermasalahkan ABRI dekat dengan konglomerat. Yang harus dilihat apakah konglomerat yang benar, atau konglomerat yang tidak benar. Kalau konglomerat tidak benar gedenya karena melanggar hukum. ABRI tidak boleh membiarkan. Karena ABRI harus berdiri di atas hukum dan mengerahkannya demi eksistensi pembangunan ketahanan nasional.³⁷

Kerjasama bisnis Angkatan Darat dengan konglomerat pada tahun 1990, misalnya YKEP dengan pengusaha nonpribumi (Tommy Winata) pemilik PT Karya Nusantara, yang kemudian disusul dengan masuknya pengusaha nonpribumi lain (Santoso Gunara) dari PT Carana Karthapura. Mereka masing-masing memiliki 30% saham. BAG (Bank Artha Graha), sedangkan sisanya (40%) masih ditangan YKEP. BAG sekarang memiliki sedikitnya 11 kantor cabang dan 30% dari seluruh pegawainya berasal dari keluarga ABRI. Bisnis besar lain YKEP adalah dalam bidang perkayuan dengan bendera PT International Timber Corporation Indonesia (ITC) bersama tokoh bisnis perkayuan Bob Hasan (pemilik PT Nusamba, perusahaan perkayuan terbesar di Indonesia) dan Putra Presiden Soeharto, Bambang Triatmodjo. Pembagian saham adalah 51% untuk YKEP, 35% untuk Bob Hasan, serta 14% untuk Bambang Triatmodjo.³⁸

Dampak negatif bisnis militer lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, dibenarkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (purnawirawan) M. Yasin. Menurut Yasin, awalnya ABRI berbisnis cuma untuk menambah pendapatan. Tapi belakangan ini sudah keterlaluan. Semua mau dikuasainya.³⁹

³⁶ Wawancara Mayjen TNI Hari Sabarno : "ABRI Sekarang Akan Lebih Akomodatif dan Moderat", *Tempo Interaktif*, Edisi 50/IL, 14 Februari 1998, Vol. VI, Desember 1997 s/d Februari 1998, h. 455.

³⁷ "Munafsirkan Kembali Dwifungsi : Sejumlah Komentar tentang Imbauan A.H. Nasution", *Editor*, No. 3/Thn. VII....., h. 28.

³⁸ Sarnego, et al, *Bila ABRI Berbisnis*, h. 81.

³⁹ Wawancara M. Yasin, *Gatra* 7 November 1998, h. 72.

Penelitian Samego, dkk, menunjukkan dampak negatif bisnis militer lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak positifnya: (1) menunjang kegiatan operasi militer, (2) demi kesejahteraan prajurit dan keluarganya, (3) demi kesejahteraan masyarakat sipil yang terlibat dalam bisnis ABRI. Sedangkan dampak negatifnya: (1) kelas komprador penopang kapitalisme semu (*Erzatz Capitalism*), (2) Korupsi dan *State Corporation*, (3) Nepotisme dan Neopatrimonialisme, (4) melunturnya profesionalisme militer.⁴⁰

Dampak negatif bisnis militer tersebut, tidak dapat dipungkiri memiliki andil terhadap timbulnya kesenjangan dan krisis ekonomi. Kesenjangan ekonomi 1990-an nampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Faisal Basri, memperlihatkan ketika pada tahun 1970 ada 70 juta orang miskin atau 60%. Pada 1996 menurun menjadi 22,5 juta atau 11,2%, kemudian meningkat pada bulan pertama 1998 diperkirakan menjadi 118, 5 juta atau 60, 6%. Sedangkan pengangguran pada akhir 1997 diperkirakan 20 juta orang.⁴¹

Indria Samego, melihat kerusuhan yang terjadi sepanjang tahun 1997 disamping faktor kemajemukan suku bangsa, juga karena kesenjangan ekonomi. Dan sumber dari segala kerusuhan itu ada di Jakarta. Ia menunjuk 80% peredaran uang di Indonesia ada di Jakarta, dan yang menguasainya hanya segelintir orang. Hal ini bisa terjadi, karena adanya semacam iklim yang saling menguntungkan dan

⁴⁰ Lihat, Samego, et al, *Bila ABRI Berbisnis*, h. 127 – 141.

⁴¹ Lihat, Faisal H.Basri, "Krisis Ekonomi Indonesia di Antara Globalisasi dan Tuntutan Reformasi Total", *Majalah Suara Mahasiswa UI*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), h. 9-10.

memperkuat hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dengan pengusaha. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum hanya berlaku untuk si lemah saja, untuk si kuat tidak berlaku sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkolusi tadi.⁴²

Kesenjangan ekonomi menurut Tatang Setiawan (41 tahun Ketua Yayasan Bina Sektor Informal, LSM yang menangani berbagai sektor informal) merupakan penyebab utama kasus kerusuhan Tasikmalaya. Menurut penuturan Tatang, umumnya masyarakat hanya mampu berkeaktifitas di sektor-sektor seperti kredit, boordir, anyaman, dan peternakan. Maka begitu masuk pengusaha yang modalnya kuat, mereka terpinggir. Akibatnya terjadi pengangguran. Sebelum datang konglomerat, masyarakat masih mampu berkarya. Tapi begitu konglomerat datang, mereka terdesak ke pinggir. Faktor lain adalah emosi melihat pemimpin pondoknya diperlakukan kasar oleh aparat.⁴³

Penguasaan ekonomi dan hasil-hasil pembangunan yang lebih terpusat pada segelintir orang dan sebagai faktor timbulnya krisis ekonomi merupakan kenyataan yang sulit dibantah. Hal itu dapat ditunjukkan ketika Presiden mengundang 57 konglomerat mengajak untuk mempertahankan rupiah. Menurut

⁴² Lihat, Wawancara Indria Sarnego : " 1997 : Simbiosis Mutualisme Antara Penguasa dengan Pengusaha", *Tempo Interaktif*, Edisi 43/II, 25 Desember 1997, Vol. VI Desember 1997 – Februari 1998, h. 116 – 117.

⁴³ Lihat, Wawancara Tatang Setiawan, "Konglomerat Datang, Merekapun Terpinggirkan", *Tempo Interaktif*, Edisi 46/I, 11 Januari 1997, Vol.II, September 1996 – Februari 1997, h.440-441.

Indonesia yang terjadi karena berlangsungnya pelarian modal. Fundamental ekonomi juga disebabkan oleh banyaknya distorsi ekonomi sektor riil. Hal ini tidak dapat dielakkan berasal dari budaya yang kurang percaya kepada rencana dan prinsip dasar teori dalam bentuk kebijakan dan implementasi yang tidak mengacu kepada prinsip dasar ekonomi.⁴⁶

Kendati ABRI telah memiliki pandangan tersebut, Jenderal (purn.) Rudini, melihat ABRI belum siap menghadapi krisis maupun pasar global. Karena itu, ABRI harus mawas diri jangan sampai berprinsip bahwa ABRI itu serba bisa, dapat mengerti dan memahami semua hal. Sebab di era pasar bebas, kita harus punya spesialisasi agar *survive*. Masih menurut Rudini, terus terang ABRI saat ini belum mampu menghadapi ancaman modal asing, entah dari spekulasi macam Soros, atau dari suatu negara. ABRI harus mendidik calon pemimpinnya tidak hanya masalah Henkam saja, tetapi juga disiplin ilmu yang berguna di masyarakat, khususnya ekonomi, untuk menyongsong era pasar bebas nanti. Saat ini belum ada pakar ekonomi moneter di ABRI, jadi belum bisa ikut ngomong menghadapi krisis ini.⁴⁷

⁴⁶ Mabas ABRI, *Pokok-Pokok Pikiran ABRI.....*, h.9-10.

⁴⁷ Lihat, Wawancara Jenderal (purn.) Rudini, "Sebaiknya ABRI di DPR Dihapuskan, dan dalam Pemilu Bebas Memilih", *Tempo Interaktif*, Edisi 50/II, 14 Februari 1998, Vol. VI, Desember 1997 -- Februari 1998, h. 462.

Partisipasi Politik Arus Bawah : Investasi dan Kekuatan Demokratisasi

Memasuki tahun 1990-an diperlihatkan maraknya unjuk rasa baik yang dilakukan mahasiswa, maupun kaum buruh. Unjuk rasa yang dilakukan kaum buruh: tahun 1990, 71 kali, tahun 1991, 132 kali, tahun 1992, 344 kali dan 1993, 323 kali. Antara 1990 sampai 1993 (November 1993) terjadi rata-rata 217 kali unjuk rasa setiap tahunnya. Tuntutan yang berkembang berkisar pada masalah upah, tunjangan hari raya, syarat-syarat kerja, tuntutan serikat buruh, jaminan sosial, kesepakatan kerja bersama, dan lembur. Sedangkan demonstrasi mahasiswa sepanjang tahun 1993, terjadi 47 kali. Isu-isu yang diangkat aksi-aksi mahasiswa: anti kebijakan NKK/BKK, Golput, aksi anti kekerasan, pembelaan terhadap mahasiswa yang dikenai pasal subversi, kasus penggusuran tanah rakyat, kasus Kedung Ombo, kritik terhadap parlemen, insiden Dilli, pelarangan jilbab di sekolah, UU LAJR, kasus Rancamaya, kasus Cimacan, kenaikan tarif listrik, usulan GBHN tentang penataan lembaga Kepresidenan, insiden Nipah, kasus SDSB. Aksi mahasiswa juga mengangkat isu internasional, seperti: solidaritas Afganistan, Bosnia dan Palestina.⁴⁸

Pada kalangan intelektual, Daniel Sparringa melihat berkembangnya pemikiran oposisi. Wawancara yang dilakukan Daniel sepanjang akhir 91 sampai akhir 1993, menunjukkan adanya perkembangan tersebut (lihat, Bagan 2).

⁴⁸ Lihat, R.Eep Saefullah Fatah, "Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi : Potret Pergeseran Politik Orde Baru", *Prisma* 4, April 1994, h. 12 - 14.

Bagan 3 : Themes Constituting the Four Main Discourses Representing the Two Extreme Poles

Discourse	The 'Orthodox'	The 'Oppositionists'
Development	'Economic Growth' 'Trickle Down Effect' 'National Cake/Pie' 'Inequality is Natural'	'Social Justice' 'Distribution' 'Local misery' 'Inequality is avoidable'
National Unity	'Tunggal Ika' (unity) 'Wawasan Nasional' 'National Threats' 'Unitary State' 'Assimilation'	'Bhineka' (diversity) 'Javanese Hegemony' 'Internal Dynamics'/potency 'Federal State' 'Multiculturalisme'
Pancasila Democracy	'Democracy is Particular' 'Integrity of Nation-State' 'State as the Guardian' 'Hierarchy-Family-ism' 'Deliberation & Concensus' 'People are ignorant' 'Segmented and Gradual'	'Democracy is Universal' 'Empowering Civil Society' 'ROL'/Supremacy of the Law 'One Man, One Vote' 'Conflict and Voting' 'The Elite are Authoritarian' 'Democracy for All and Now'
Dwi Fungsi	'Military in Politics' 'Military is the Cement' 'Historical Specificity' 'Dwifungsi' (dualfunction) 'It is Calling' 'The Guardian'/Protector' 'Kekaryaan'	'Back to Barracks' 'Military is the Obstacle' 'The Creation of his story' 'Multifungsi' (multi-function) 'It is domination' 'Fascism'/Repressor' 'Job-placement Machinery'

Sumber : Daniel Sparringa, Dari Sebuah 'Panggilan' ke 'Kembali ke Barak Sekarang': Sebuah Taksonomi Paradigma Intelektual Indonesia tentang Dwifungsi ABRI, Makalah, Disampaikan dalam acara Dialog Nasional dengan tema " Aktualisasi Arah dan Tujuan Reformasi Pembangunan Bangsa", yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Jakarta 2 November 1998, h. 12-15.

Bagan disusun dengan menggunakan hierarki yang terdapat dalam *discursive field* kelompok Ortodoks, bukan Oposisi. Diskursus yang dikembangkan intelektual Oposisi tidak saja merupakan kontras terhadap diskursus resmi Orde Baru (intelektual Ortodoks), namun juga berperan sebagai

diskursus alternatif yang memiliki *discursive field* yang di dalamnya mengandung hierarki yang berbeda secara mendasar. Apabila diskursus Orde Baru menempatkan "Development" sebagai ideologi sentral, maka kelompok Oposisi menempatkan "Individualisme/Pluralisme" sebagai nilai terpenting. Yang pertama memproklamasikan basis fundamental masyarakat adalah usaha bersama secara kolektif, dalam arti pemenuhan eksistensi individu sebagai manusia hanya dalam konteks "pembangunan" pada tingkat masyarakat. Sebaliknya yang kedua memandang bahwa individu sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Sehingga pendekatan Oposisi melihat pembangunan untuk menumbuhkan *social justice*, demokrasi yang dikembangkan adalah *secular democracy* dan berdasarkan *rule of law*. Diantara dua kutub itu, merupakan kelompok intelektual Revisionis. *Range* konstruksi kelompok ini amatlah besar mulai dari mereka yang dekat dengan Ortodoks sampai dengan mereka yang lebih dekat ke Oposisi. Misalnya kelompok ini lebih konservatif ketika membicarakan peluang bagi Timor Timur atau kelompok etnik Cina di Indonesia untuk memperoleh hak-hak budaya maupun politik yang lebih luas. Ketika mereka berbicara tentang masa depan Indonesia, misalnya tentang nasionalisme dalam era globalisasi atau tentang demokrasi, hampir separuh dari mereka menjadi intelektual Oposisi.

Sampai tahun 1996 Arief Budiman,⁴⁹ melihat telah terjadi investasi besar-

⁴⁹ "Prospek Demokrasi Indonesia : Negara Kuat, Arus Bawah Juga Semakin Sukar Dibendung", Rekaman Orasi Arief Budiman dalam perpisahan dari UKSW untuk menjadi Guru Besar pada Studi Indonesia di Melbourne University, yang diselenggarakan ISAI di Hotel Paragon, Jakarta 15 Januari 1997, *Tempo Interaktif*, Edisi 47/1, 18 Januari 1997, Vol. VI September 1996 s/d Februari 1997, h. 480-481.

besarkan bagi PT Demokrasi di Indonesia. Ia menunjukkan investasi dimaknakan antara lain, pertama, ketika arus bawah mendukung Megawati dengan keras, kemudian akhirnya Megawati diterima dan dikompromikan. Hal ini merupakan separuh langkah ke arah demokrasi, langkah kompromi ini merupakan aset demokrasi. Kedua, peristiwa dibredelnya Tempo, Editor dan Detik. Pembredelan ini memunculkan lembaga alternatif pers semisal AJI yang menandingi PWI, ISAI sebagai media alternatif dan Tempo Interaktif sebagai media elektronik di internet. Internet juga merupakan proses teknologi dalam mengkampanyekan demokrasi. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah, meski ABRI mencoba mengcounternya dengan membentuk ABRI-net. Tapi ternyata Bayonet tetap yang lebih efektif. Ketiga, klaim PUII dan PRD sebagai kekuatan oposisi, dan program pertamanya adalah menggulingkan pemerintah. Statemen-statemen ini merupakan perintisian mental yang juga investasi demokrasi. Keempat, dukungan yang kuat dari proses internasional. Misalnya, kasus penembakan di Santa Cruz, maka citra militer Indonesia di Barat, tidak berbeda dengan yang lain, yaitu bisa menombaki demonstrasi-demonstrasi yang damai. Kasus ini membuat Indonesia ditekan untuk melakukan proses demokratisasi. Kasus Mobnas, merupakan hambatan bagi penciptaan rezim kapitalisme global, Amerika, Jepang dan Eropa Barat sangat concern terhadap hal ini. Bersamaan dengan kasus tersebut, juga terjadi gerakan hak asasi manusia yang semakin di dunia.

Setelah peristiwa 27 Juli 1996, rezim Orde Baru melakukan represi, akibatnya gerakan oposisi, termasuk mahasiswa tiarap. Namun tidak lama

kemudian gerakan mahasiswa di berbagai daerah bangkit kembali. Di Yogyakarta pada Oktober 1996 KAPP (Komite Anti Penindasan Pers) menggelar aksi memprotes ditangkapnya aktivis Suara Independen dan digrebegnya kantor percetakan media tersebut, Kemudian pada tanggal 1 April 1997 KPDI (Komite Perjuangan Demokrasi Indonesia), menyerukan boikot Pemilu 1997. Kedua aksi tersebut, berlangsung di UGM dan diakhiri dengan penangkapan. Aksi lain pada 21 Mei 1997 dilakukan PPPY (Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta) dengan nama Gema Golput (Gerakan Mahasiswa Golongan Putih). Di Solo, dibentuk KMKD (Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi). Di Semarang dibentuk AMS (Alinasi Mahasiswa Semarang), yang melakukan aksi pertamanya tepat setelah enam hari peristiwa 27 Juli, memprotes pemberitaan pers yang dianggap mendukung rezim Orba. Di luar Jawa, misalnya muncul PMPL (Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Lampung), melakukan pengorganisasian dan aksi massa memboikot Pemilu 1997. Di Medan aktivis mahasiswa membentuk FAD (Forum Aksi untuk Demokrasi). Mereka hanya sempat melakukan diskusi satu kali menjelang Pemilu 1997, dan setelah itu para aktivisnya di tangkap.⁵⁰

Ketika krisis ekonomi pada pertengahan Juli 1997 semakin parah dan tidak terkendali, kepercayaan kepada pemerintah semakin melemah. Tuntutan – tuntutan yang berkembang di kalangan arus bawah tampak mengkrystal pada suksesi kepemimpinan nasional. Hal ini tampak pada tuntutan arus bawah pada Januari 1998.

⁵⁰ Budiman Sudjatmiko, "Gerakan Mahasiswa Kini Bersama Rakyat Tuntaskan Reformasi Total", Kompas, *Demokrasi, Kebebasan, Disintegrasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 151 – 152.

Tabel 3 : Aksi Penolakan Pencalonan Kembali Soeharto sebagai Presiden Periode 1998 – 2003 dan Tuntutan Dilakukan Berbagai Perubahan (Per- Januari 1998)

Organisasi/Kelompok	Pernyataan/Sikap
<p>Forum Kebangsaan dan Pemuda Indonesia terdiri dari sembilan ormas (GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, GAMKI, Pemuda Demokrat, IPPNU, IPNU, KMHD) dan tujuh LSM (KIPP, LBHN Jakarta, PUSPIPAN, PUAR Indonesia, APUD, FKOMNU, PIPHAM).</p>	<p>Mengampaikan sikap kepada MPR, menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dan meminta agar suksesi dilakukan secara terbuka dan transparans. Pernyataan ini diterima oleh Kafrawi Ridwan (FKP MPR).</p>
<p>Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat)</p>	<p>Mengajukan empat tuntutan: pertama, mendesak DPR/MPR untuk tidak lagi mencalonkan Pak Harto sebagai presiden. Kedua, mendukung pencalonan Megawati sebagai presiden RI. Ketiga, mendukung aliansi nasional di bawah Megawati, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid. Keempat, dilaksanakannya reformasi politik dan ekonomi untuk mengatasi krisis.</p>
<p>MPD (Masyarakat Profesi Untuk demokrasi)</p>	<p>Menggelar aksi di DPR, menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, meminta SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban mandataris MPR atas berlatutnya krisis ekonomi, menolak pencalonan kembali Pak Harto sebagai presiden, meminta agar birokrat bersih dari korupsi dan kolusi, dan yang terakhir pencabutan berbagai peraturan yang menghambat demokrasi.</p>
<p>FPJ (Forum Pemuda Jabotabek)</p>	<p>Forum yang terdiri dari 10 kampus di Jabotabek dan pemuda dari berbagai organisasi, mengadakan aksi di DPR, mengajukan tuntutan: diturunkannya harga-harga bahan pokok di pasaran, mengusut penyebab kredit macet, menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden, dan menuntut MPR agar membuka diri dan menerima calon-calon presiden alternatif yang berasal dari masyarakat.</p>
<p>Korps Mahasiswa ISTN Jakesel</p>	<p>Melakukan aksi sekitar Kampus menyatakan keprihatinan dan menuntut penjelasan pemerintah atas distribusi bahan pokok yang ada, penurunan harga bahan pokok, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi.</p>

Komite Aksi Mendukung Megawati	Melakukan unjuk rasa di DPR, menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai presiden, mendukung Megawati sebagai calon Presiden, dan mendukung aliansi Amien- Mega serta meminta dukungan dari seluruh rakyat untuk mendukung Megawati sebagai presiden yang ketujuh.
Kelompok Cipayang	Menuntut penurunan harga bahan-bahan pokok, perhatian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil, seperti buruh, sopir PPD dan petani yang benar-benar terkejut akibat krisis ekonomi.
SBSI	Menjukkan unjuk rasa di DPR, yang intinya tuntutan seperti yang diajukan Kelompok Cipayang.
LIPI (19 Peneliti)	Membacakan pernyataan di gedung LIPI, antara lain, disamping menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden, juga menyatakan bahwa pengelola kekuasaan negara telah gagal menjalankan amanat rakyat. Oleh karena itu, kami menganggap perlunya pergantian kepemimpinan nasional.
LSM (15 LSM yang ada di Jakarta dan Jawa Barat)	Mendatangi DPR, mengajukan petisi mendesak pemerintah secepatnya mengatasi krisis moneter, petisi ini diterima BP MPR Poedjono Pranyoto.
Tujuh Kelompok (300 Mahasiswa & Pemuda)	Membanjiri DPR, menuntut agar Pak Harto menolak pencalonan dirinya oleh tiga jalur ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABO) setelah dua hari sebelumnya (20 Januari) Presiden bersedia dicalonkan kembali menjadi Presiden periode 1998 - 2003.
Forum Merah Putih, FAAR (Forum Amanah Aspirasi Rakyat), FKSMI, FKMLI, HMI-Sejahtabek, IA-JTB	Di depan gedung DPR, menggelar aksi dengan spanduk "Ougat pertanggungjawaban rezim atas kesengsaraan rakyat. Tolak mekanisme calon tunggal."
ISMAHI dan QEMPPUR (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Reformasi)	Mendatangi DPR, menyampaikan pesan moral, bahwa reformasi politik merupakan keniscayaan yang pasti terjadi, dan menilai gerakan cinta rupiah tidak tepat, seharusnya diganti menjadi gerakan cinta rakyat.
SIAOA (Solidaritas Indonesia Untuk Amien - Mega)	Siaga yang berjumlah 80 orang yang sangat beragam dari buruh, mahasiswa, karyawan, jurnalis sampai seniman. Di cekal aparat keamanan selangga tidak dapat masuk ke halaman gedung DPR mereka meminta agar MPR memproses Amien Rais dan Megawati menjadi calon Presiden RI periode 1998 - 2003. Menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden.

Sumber : Diolah dari "Soeharto : Didukung Golkar, Ditolak Parlemen Jalanan", *Tempo Interaktif*, Edisi 47/II, 24 Januari 1998, Vol.VI, September 1997 s/d Februari 1998, h. 340 - 341; Babari, "Antara Status Quo dan Perubahan Sidang Umum MPR 1998", *Analisis CSIS*, Tahun XXVII/1998, No.2, h. 189.

Menguatnya arus bawah terutama dimotori oleh Gerakan Mahasiswa '98 (GM'98). Semangat untuk melakukan perubahan dari GM'98, nampak dalam waktu dua bulan, antara 1 Maret sampai 2 Mei 1998 Edward Asnipal mencatat terjadi 14 bentrokan antara mahasiswa dan militer yang terjadi di Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok.⁵¹

Dorongan semakin kuat untuk melakukan perubahan dipicu oleh "Peristiwa Tri Sakti 12 Mei 1998". Peristiwa diawali demonstrasi yang dilakukan lebih kurang 5000 mahasiswa melakukan aksi keprihatinan. Ribuan mahasiswa memaksa turun ke jalan untuk melakukan "long march" ke gedung DPR/MPR, namun dihadang aparat keamanan. Kapolres Jakber meminta mahasiswa untuk kembali ke kampus dan disetujui mahasiswa. Setelah bernegosiasi akhirnya disepakati, baik mahasiswa maupun aparat keamanan akan sama-sama mundur. Tapi tiba-tiba terjadi penembakan dari arah belakang barisan mahasiswa oleh aparat keamanan yang mengakibatkan 4 mahasiswa tewas.⁵² Kemudian pada 13-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan yang tampaknya merupakan kelanjutan dari insiden Trisakti 12 Mei 1998. Massa yang emosional melakukan perusakan di banyak tempat di Jakarta. Selain itu kerusuhan yang terjadi juga bernuansakan SARA. Dimana massa perusuh melakukan penyerangan terhadap warga keturunan Tionghoa. Ada dugaan pula telah terjadi perkosaan massal terhadap warga keturunan. Kerugian fisik diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah. Diperkirakan lebih dari 1000 orang tewasbakar di dalam

⁵¹ Budiman Sudjetmiko,

⁵² Linat, Saurip Kadi, *TNI-AD: Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*, (Jakarta: Grafiti, 2000).

pertokoan yang dijarah dan kemudian di bakar. Kerusakan ini menjalar ke wilayah Jabotabek. Ada dugaan kerusakan ini sudah direkayasa sedemikian rupa. Karena pada saat kejadian, pihak aparat keamanan bisa dikatakan lambat dalam mengambil tindakan. Sehingga kerusakan meluas begitu cepat.⁵³

Tentang gambaran sikap aparat keamanan pada kasus kerusakan 14 Mei, Dewi Loveard dari *Asiaweek* menggambarkan, bahwa banyak tentara secara diam-diam bersimpati kepada orang-orang yang mengamuk itu, tetapi tidak dapat mengungkapkan perasannya. Banyak tentara hanya diam berdiri dan mengawasi aksi massa tersebut. Pasukan keamanan yang diminta untuk mengamankan pusat distribusi Indofood Jakarta bahkan membantu para penjarah. Manager pemasaran perusahaan tersebut, Lukman, mengamati dari kantornya di lantai dua ketika tentara-tentara meminta para perusuh untuk antre mendapatkan barang-barang. Di salah satu cabang BCA milik Liem, pasukan keamanan tiba setelah massa membakar mesin ATM, mereka hanya mengingatkan agar orang-orang itu tidak berdiri dekat kobaran api.⁵⁴

Gerakan arus bawah yang dimotori mahasiswa, merupakan investasi dan sebagai kekuatan dominan yang menghantarkan perubahan ke arah demokratisasi dari rezim otoriter Orde Baru. Organisasi-organisasi mahasiswa yang secara terus menerus tanpa lelah melakukan demonstrasi sampai lengsernya Presiden Soeharto,

h. 29-31.

⁵³ Lihat, Saurip, *TNI-AD*....., h.31.

⁵⁴ Lihat, "People Power, Amuk Massa : Hari – hari Terakhir di Tempuk Kekusasan", Laporan Dewi Loveard dari *Asia week*, 29 Mei 1998, dalam Imam Baihaqi (Penyunting), *Soeharto Lengser : Perspektif Luar Negeri*, h.24-25.

antara lain :⁵⁵ Aktivis-aktivis kampus ITB, Unpad, STT Telkom (Bandung), KMPRRL (Lampung), KPRP, SOMMASI, ARMY, FAMERA (Yogyakarta), DRMS (Solo), FAMPR (Purwokerto), APR, ASPR (Surabaya), FKMM (Malaang), AGRESU, DEMUD (Medan), FKSMJ, FORKOT, FAMRED, GEMPUR (Jakarta).

Respon Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi

Respon militer terhadap gerakan prodemokrasi mencakup respon terhadap pembangkang elite, partai politik non-pemerintah, intelektual/cendekiawan, LSM prodemokrasi dan HAM, aktivis mahasiswa, dan perpolitikan kelas bawah (kaum petani dan kaum buruh).

Respon Militer terhadap Pembangkang Elite

Pembangkang elite merupakan pejabat tinggi dan politisi yang kecewa terhadap pemerintahan Soeharto, dan membentuk sejenis oposisi.⁵⁶ Kekecewaan itu, bisa berupa disebabkan disingkirkan oleh Soeharto karena perselisihan pribadi, dinilai telah melangkah jauh dalam menggapai ambisi politik mereka. Juga dapat berupa perselisihan terhadap masalah kebijakan dan bisnis keluarga Soeharto serta

⁵⁵ Lihat, Budiman Sudjatmiko, "Gerakan Mahasiswa.....", h. 152-153.

⁵⁶ Ulin Anders, *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Celombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 94.

tidak adanya aturan hukum dan kebebasan sipil. Yang dapat dikategorikan dalam pembangkang elite adalah Petisi 50 dan Petisi 96.

Respon terhadap Petisi 50

Petisi 50 didirikan pada tahun 1980. Tokoh terkemuka Petisi 50 adalah Jenderal Ali Sadikin. Jenderal (purn) Nasution, merupakan salah seorang penanda tangan Petisi 50, dan Jenderal H.R. Dharsono, dikaitkan secara erat dengan kelompok ini. Sejak berdirinya telah menulis lebih dari 170 surat kepada parlemen, pemerintah, dan lain-lain guna menyerukan reformasi politik.⁵⁷ Pernyataan perlunya reformasi politik, dinyatakan Ali Sadikin pada Agustus 1990,⁵⁸ bahwa setelah Perang Dingin dan kecenderungan dunia untuk menerima kedaulatan rakyat, pluralisme dan hak asasi manusia, seharusnya memperbolehkan rakyat untuk menguji kembali periode 1950-59 dalam pandangan baru. Ia beralasan, konflik internal partai pada saat sekarang bukan merupakan indikasi ketidaktepatan demokrasi liberal untuk Indonesia, tetapi agaknya dikarenakan tidak berpengalamannya para politisi sekarang ini dan karena akibat polarisasi Perang Dingin. Sadikin juga mengajukan alasan bahwa setelah 45 tahun merdeka bangsa Indonesia telah cukup matang untuk mengembangkan pluralisme.

Rezim Orde Baru memberlakukan cekal serta kematian perdata kelompok Petisi 50, karena kekritisannya. Ali Sadikin, merasakan adanya pencekalan itu. Ia

⁵⁷ Ulin, *Oposisi*..., h.94.

⁵⁸ David Bourchier, "The 1950-an in New Order Ideology and Politics", dalam Bourchier, David and Legge, John, ed., *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Australia: Center of Soutes Asian Studies Monas University), h.5.

menyatakan bahwa kedutaan negara sahabatpun diminta supaya nama kami dicoret dari daftar yang akan diundang".⁵⁹

Ketika Menristek B.J. Habibie (dengan izin Pak Harto) mengajak Kelompok Petisi 50 berkunjung ke PT PAL Surabaya (awal Juni 1993), ada rasa optimisme bahwa rekonsiliasi politik antara pemerintah dengan kelompok Petisi 50 akan segera terjadi. Tetapi dua pimpinan teras militer (Menhankan Jenderal Edy Sudrajat dan Pangab Jenderal Feisal Tanjung) kala melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR (Medio Juni 1993) menegaskan, tak ada rekonsialisasi politik. Dan, Kelompok Petisi 50 tetap dicekal.⁶⁰ Namun pernyataan politik MABES ABRI lewat Kapuspen ABRI Brigjen Syarwan Hamid (10 Juli 1993), sehari setelah Rapim ABRI (8-9 Juli) sudah bernada lain. Jenderal (purn) A.H. Nasution, katanya tidak dicekal lagi. Pernyataan ini, tampak terkait dengan penegasan Presiden Soeharto pada waktu menerima hasil Rapim ABRI, agar ABRI melapangkan jalan untuk mewujudkan aspirasi rakyat.⁶¹

Praktek pengekalan menurut A.H. Nasution, merupakan bagian dan praktek kekuasaan Orde Baru. Ketentuan-ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kopkamtib, sebagai badan ekstrakonstitusional.⁶² Dan Panglima ABRI menurut UU Keemigrasian No.IX tahun 1992 memiliki kewenangan untuk melakukan pengekalan sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakkan keamanan dan pertahanan negara.

Nasution, dalam menanggapi pernyataan Kapuspen ABRI bahwa secara yuridis

⁵⁹ "Rangkulan Untuk Para Jenderal Tua", Tabloid Berita Mingguan *Adil*, No.39, Th. Ke 35, 9-15 Juli 1997, h. 4.

⁶⁰ "Pendulum Politik Mulai Bergeser", *Majalah Editor*, No.43/Thn. VI/ Juli 1993, h. 17.

⁶¹ *Majalah Editor* No.43/Thn.VI/24 Juli 1993, h.17.

⁶² *Editor*, No.43.....h.21.

formal sejak berlakunya UU No.9 Tahun 1992 dirinya tidak pernah dicekal, menyatakan bahwa memang selama tahun 1992 saya tidak mengalami pencekalan secara formal maupun informal. Di dekade-dekade yang lalu sering. Dengan lisan atau secara informal. Terutama, dilapangan, jika ada pernikahan atau melayat yang juga didatangi Presiden atau Wapres, saat itulah saya dicekal. Atau kalau ada undangan khotbah atau dakwah, ceramah ke kampus atau wawancara pers. Nasution, juga belum melihat terobosan Habiebie dengan mengundang Ali Sadikin dkk., baik di PT PAL maupun IPTN Bandung atau pengobatan Ton Dharsono, Hoegeng dan dirinya yang pembiayaannya dibantu negara serta pidato Jenderal Soeharto di Kaltim tentang penobusan dosa-dosa Angkatan '45, sebagai *trend* akomodatif Nasution, melihat bahwa sesungguhnya yang terjadi selama kekuasaan Orde Baru, lebih kurang 27 tahun, ruang gerak masyarakat selalu dibawah bayangan Intel.⁶³

Begitu pula Ali Sadikin, merasa hal yang sama dengan Nasution. Sadikin menyatakan, para tokoh dan masyarakat menduga kehadiran saya di PAL dan IPTN sebagai pertanda akan ada rehabilitasi. Tapi Pangab langsung membantah. Kemudian tahun 1994 kita minta diadakan dialog antara Pak Harto dengan Pak Nas. Itu juga tidak jalan lalu mau apa?⁶⁴

Adanya pencekalan oleh Pangab memang diakui Kapuspen ABRI Brigjen Syarwan Hamid, sehari setelah kunjungan Ali Sadikin dkk., bahwa yang dicekal oleh Pangab tinggal 11 orang dari 41 orang yang dicekal.⁶⁵

⁶³ Lihat Wawancara *Editor*, No.43.....h.22-23.

⁶⁴ Wawancara Ali Sadikin, Tokoh Petisi 50, "Ada Perubahan Tetapi Tidak Jelas", Tabloid Mingguan *ADIL*, No. 39, Th. Ke-65, 9-15 Juli 1997, h. 4.

⁶⁵ *Editor*, No.43.....h.21.

Ramlan Surbakti juga melihat keterbukaan yang berkembang belum menyentuh substansi demokratisasi. Ramlan menyatakan keterbukaan pada tahun 1993 berarti, penguasa bertemu dan berbicara dengan tokoh yang selama ini dianggap *political dissident* dan mengalami "kematian" perdata, tetapi tanpa membahas substansi kritik yang selama ini disampaikan. Keterbukaan berarti melonggarkan peraturan hukuman penjara, sehingga tahanan politik dapat bebas lebih cepat, tetapi juga tanpa mempersoalkan sebab mereka dijadikan tahanan politik. Dalam pengamatan Ramlan, keterbukaan yang dikembangkan sejak akhir 1980-an digunakan untuk mendapatkan legitimasi terhadap kekuasaan hegemonik, dan bukan merupakan isu utama bagi demokratisasi. Isu utama demokratisasi adalah pertanggungjawaban kekuasaan (*accountability*) baik secara politis kepada rakyat maupun secara hukum (*rule of law*). Keterbukaan yang dikembangkan juga dipertanyakan kaitannya dengan demokratisasi, dengan menunjukkan adanya fakta bahwa anggota DPR 1987-1992 dari F-KP dan F-ABRI yang vokal-kritis, tidak lagi ditampilkan pada periode berikutnya, sedangkan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat yang vokal mendukung kekuasaan diberi kesempatan yang lebih besar.⁶⁶

Petisi 96

"Pernyataan 1 Juli 1996" atau "Petisi 96" dipicu oleh kasus 27 Juli 1996. Letjen TNI (Purn.) Bambang Triantoro mantan Kasospol ABRI (1985-1987) sebagai motor dan penandatangan yang pertama. Tokoh lain yang ikut menandatangani, antara

⁶⁶ Ramlan Surbakti, "Diskursus-diskursus Demokratik", Kompas 4 Oktober 1993, h.4.

lain Ketua PBNU Gus Dur, mantan menteri Frans Seda, Pendeta Eka Dharmaputera, dan bekas Ketua DPR/MPR Kharis Suhud. Petisi ini ditujukan bagi para pemuka dan penyelenggara negara serta seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya antara lain intinya dinyatakan bahwa pola kekuasaan sejuakin terpusat. Meskipun UUD memang memberikan peluang pemusatan kekuasaan. Namun ada lembaga yang mendampingi (DPR, BPK dan MA) agar tidak kekuasaan semata-mata yang dijalankan. Pendamping-pendamping itu tidak efektif lagi. Dalam pernyataan itu juga disampaikan keprihatinan tentang bangsa ini kembali terkotak-kotak. Seperti kembali lagi pada pendekatan agama, kesukuan, pendekatan paham politik dalam melihat Pancasila, dan sebagainya. Seperti terjadinya terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat meresahkan persatuan bangsa, misal pembakaran gereja di Surabaya atau pembakaran mesjid di Timtim. Padahal selama ini tidak ada persoalan lagi, dan dulu hal itu tidak ada.⁶⁷

Dalam konteks ini Arief Budiman, menyatakan bahwa kondisi HAM kita makin buruk, pemerintah pun makin kepepet. Kekerasan makin mudah dilakukan dan pakai bohong segala. Jadi saya setuju dengan pernyataan yang dibuat Gus Dur dan Bambang Triantoro, mengenai "Pernyataan Keprihatinan 1996".⁶⁸ Hal serupa dinyatakan Arbi Sanit, bahwa dipandang dari sisi rakyat yang begitu lemah, teralienasi, terkooptasi sehingga tak berdaya untuk membela kepentingan apalagi memperjuangkan perluasan kepentingannya, imbauan yang diketengahkan pendukung petisi itu punya nilai strategis dan karenanya mengandung kekuatan tertentu. Gerakan

⁶⁷ Lihat, Wawancara Letjen TNI (Purn.) Bambang Triantoro, "Kalau Rakyat Ngamuk, Itu Karena Mereka 'Buta' Politik", *Forum Keadilan*, No.8, Tahun V, 29 Juli 1996, h. 94 - 95.

⁶⁸ Wawancara Arief Budiman, "Semua Sudah Berlebihan", *Forum Keadilan*, No.9, Tahun V, 12 Agustus 1996, h. 20.

rakyat itu telah memperkaya jajaran gerakan masyarakat prodemokrasi, sekalipun banyak aspek yang masih perlu dipertanyakan.⁶⁹

Karena imbauan Petisi 96 sangat halus dan tidak tampak konfrontatif, media menyindirnya sebagai imbauan "setengah hati". Pihak militer pun tampak tidak antusias. Menurut Arbi Sanit, negara Indonesia Orde Baru yang amat kuat dan mendominasi segenap aspek kehidupan rakyat (masyarakat), "Petisi 96" yang antara lain digerakan YKPK (Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan) tentu bisa disepelekan sebagai hal lemah, pernyataan orang tersingkir dan tidak puas, mencari perhatian, dan sebagainya.⁷⁰

Respon terhadap Partai Politik Nonpemerintah

Respon terhadap PPP

Respon militer terhadap PPP (Partai Persatuan Pembangunan), tampak dalam menanggapi pernyataan dua anggota PPP, yaitu K.H. Zaenal Abidin dan K.H. Amin Imron tentang hubungan ABRI dengan rakyat dan organisasi sosial politik peserta pemilu, yang dinilai belum utuh dan hanya menjalin hubungan dengan sebagian masyarakat atau golongan. Letnan Jenderal Mutojib (Gubernur Lemhanas), menjawab serangan itu dengan menyatakan ABRI tetap berada di atas semua golongan. Tapi bukan perbuatan yang salah, jika KBA (Keluarga Besar ABRI) diarahkan menyalurkan aspirasi politiknya ke Golkar, karena perjalanan sejarah dan sejarah

⁶⁹ Lihat, Arbi Sanit, "Gerakan Imbauan Morai", *Forum Keadilan*, No.8, Tahun V, 29 Juli 1996, h. 20.

⁷⁰ Sanit, "Gerakan Imbauan....", h.20.

pembentukan Golkar, dan hal itu dinilai tetap demokratis.⁷¹ Letnan Jenderal (Purnawirawan) Soebijakto Prawirasoebrata (Mantan Gubernur Lemhanas) mengenai pemihakan ABRI ke Golkar menyatakan, bahwa selama belum ada strategi lain, ya , akan cenderung kesana. Dan yang membikin menang Golkar hingga sekarang adalah kedudukannya di MPR ditambah ABRI. Dan aparat teritorial yang ikut membantu karena pendekatan keamanan untuk mencapai stabilitas keamanan. Tapi Kasospol ABRI bilang, dalam pemilu ABRI tidak akan memihak.⁷²

Bahkan pada tahun 1996 Jenderal Hartono secara terbuka menyatakan bahwa anggota ABRI adalah kader Golkar. Pernyataan tersebut dikemukakan di Karanganyar, Jawa Tengah, dan sehari kemudian ditegaskan lagi di Jawa Timur. Banyak kalangan yang melihat langkah “tidak biasa” yang dilakukan Hartono tidak terlepas dari rasa khawatir ABRI akan kekalahan Golkar pada pemilu 1992. Dugaan adanya kekhawatiran semacam ini dikemukakan oleh Ketua DPP PPP Buya Ismail Motarum pada peringatan hari lahir PPP ke - 23 di Sleman, Yogyakarta 17 Maret 1996. Kata Buya, Pernyataan KSAD bisa juga menyiratkan adanya kekecewaan Golkar dalam kancah politik nasional. “Itu lebih merupakan pengayem-ayem (penenang) bahwa Golkar tidak usah cemas karena masih ada ABRI dibelakangnya”. Sikap Kasospol Letjen TNI Syarwan Hamid menguatkan analisa Buya Ismail. Syarwan mengakui bahwa kemenangan Golkar sebagai *single majority* tetap diperlukan untuk kesinambungan pembangunan. Namun, Syarwan menjelaskan bahwa ucapan KSAD itu

⁷¹ Majalah *GATRA*, 8 Juli 1995, h.22.

⁷² Wawancara Soebijakto Prawirasoebrata, “Tagih Janji? Jawabannya Harus Datang dari Pak Harto”, *Tempo Interaktif*, Edisi 35/1, 26 Oktober 1996, Vol. II : September 1996 s/d Februari 1997, h. 231.

adalah pernyataan pribadi, dan ABRI bukanlah sedang memasang kuda-kuda untuk menghantam yang lain.⁷³ Sedangkan Menhankam Jenderal Edy Sudrajat, menanggapi dengan menunjuk pasal 28, bab IV UU no. 2 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Bahwa "Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama -- sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyelesaikan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia". Masih menurut Jenderal Edy Sudrajat, kalau UU itu mengalami penyimpangan dalam penjabarannya harus diuruskan.⁷⁴

Tentang adanya pandangan yang berbeda dikalangan petinggi militer Angkatan Darat mengenai pernyataan KSAD Jenderal R.Hartono tersebut, digambarkan oleh Letjen Soejono (mantan Kasum ABRI), Pak Ma'ruf (Mayjen Muhammad Ma'ruf) sebagai Kassospol pernah hadir dalam sebuah rapat kerja Golkar. Di situ, ia berpidato bahwa ABRI sebaiknya mengarah ke sikap netral. Panglima (Feisal Tanjung) yang saat itu sedang melakukan tur bersama presiden setuju dengan teks pidato tersebut. Tapi KSAD Jenderal R. Hartono kemudian melaporkan begitu sehingga Ma'ruf tersingkir. Hal itu juga menimpa pada Mayjen Syamsir Siregar, Kepala BAIS (Badan Intelijen Strategis). Syamsir mengkonfirmasi kepada TEMPO bahwa "Kami sudah mengingatkan Jenderal Feisal Tanjung tentang adanya ABRI kuning yang bisa

⁷³ Ikrar Nusa Bhakti (Koordinator), *ABRI dan Partai Politik : Pasang Surut Keterlibatan Militer Dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*, Laporan Penelitian, (Jakarta : PPW - LIPI, 1999), h.90.

⁷⁴ "Menhankam Soal Peran Sosial ABRI", H.U. Republika, 26 Maret 1996, h. 11.

menimbulkan bahaya. Jadi kami mengajaknya ketemu Pak Harto untuk menyampaikan hal ini. Tapi ia menjawab, Maunya apa? Kamu mau berontak?⁷⁵ Letjen (Purn.) Soebijakto Prawirasoebrata, mantan Gubernur Lemhanas menanggapi pemihakan ABRI ke Golkar, meyakini selama belum ada strategi lain, ya akan cenderung kesana. Dan yang membikin menang Golkar hingga sekarang adalah kedudukannya di MPR ditambah ABRI. Dan aparat teritorial yang ikut membantu karena pendekatan keamanan untuk mencapai stabilitas keamanan. Tapi Kasospol ABRI bilang dalam pemihu ABRI tidak akan memihak.⁷⁶

Kemudian pada SU MPR 1998, FPP memberikan pandangan umum terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden melalui juru bicaranya H.M. Alfian Dharmawan dan Hj. Khofifah Indar Parawansa (4 Maret), menguliti berbagai kelemahan pemerintah tak termuat dalam pertanggungjawaban Presiden. Alfian Dharmawan, menyatakan FPP menggugat *political courage* atau keberanian politis pemerintah untuk melaksanakan restrukturisasi dan reformasi struktural di bidang ekonomi, hukum dan terutama disektor politik. Reformasi politik haruslah mengacu pada kebijakan yang tidak diskriminatif atas kekuatan sosial politik yang ada. Khofifah menyatakan dalam semua pemilu yang lewat, pihak birokrasi yang mestinya bertindak netral malah kerap bertindak sewenang-wenang terhadap warga PPP. Akibatnya, PPP selalu kalah dalam pemilu. Disamping itu, masih menurut Khofifah FPP menuntut pengkajian ulang Paket

⁷⁵ Lihat, Wawancara Soeyono, "Ada Duplikasi Komando antara Feisal dan Hartono", *Tempo*, 20 Februari 2000, h. 35.

⁷⁶ Wawancara Soebijakto Prawirasoebrata, "Tagih Janji? Jawabannya Harus Datang dari Pak Harto...", *Tempo Interaktif*, Edisi 35/1, 26 Oktober 1996, Vol II, Agustus 1996 s/d Februari 1997, h. 231.

Lima UU Politik, dan mendesak agar sistem mengambang ditiadakan. Sehingga parpol dan Golkar bisa menempatkan pengurusnya hingga ke desa-desa. Ketua FABRI di MPR Letjen TNI Yunus Yosfiah, dalam konteks ini menyatakan dalam kondisi seperti sekarang ini, tak mungkin membuat reformasi politik. Tapi, ABRI mendukung reformasi yang gradual.⁷⁷ Sementara itu Suhardiman (Tokoh SOKSI) kritik-kritik dan tuntutan reformasi dari kalangan parpol itu cuma *manuever* dan seni politik belaka. Misalnya sikap FPP yang “menggantung” pada tanggapan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden. Itu hanya seni permainan saja. Akhirnya nanti juga menerima.⁷⁸

Tentang tidak disetujuinya tuntutan kepengurusan orsospol di tingkat desa, Jenderal (Purn) R. Hartono sebagai Ketua Komisi A (GBHN) SU MPR, menyatakan alasannya agar masyarakat solid dan tidak terkotak-kotak, ketiga fraksi (F-ABRI, FKP dan FUD, pen.) tak setuju kalau organisasi politik ada di tingkat desa. Berbahaya. Masyarakat kita di pedesaan belum siap menerima situasi seperti itu. Masih menurut Hartono, jika bicara reformasi politik, ekonomi, sosial budaya, sampai bagaimana peran wanita dan kaum lanjut usia, lihat GBHN 1998.⁷⁹

Respon terhadap PDI

Respon militer terhadap elite PDI, terutama tampak pada perilaku politik

⁷⁷ “Rapat yang Sarat Tuntutan Reformasi Politik”, *Forum Keadilan*, No.25, Tahun VI, 23 Maret 1998, h.12.

⁷⁸ “Rapat yang Sarat.....”, h. 12.

⁷⁹ Wawancara Jenderal (Purn) R.Hartono, “Bicara Reformasi Lihat GBHN 1998”, *Forum Keadilan*, No. 25, Tahun VI, 23 Maret 1998, h. 13.

Soerjadi dan kemelut penentuan DPP PDI ketika Megawati secara serius bersedia dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum PDI 1993-1998. Bagaimana respon militer tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.⁸⁰

Dalam kampanye pemilu 1992, Soerjadi (Ketua DPP PDI) menginginkan agar adanya pembatasan masa jabatan presiden, namun ditanggapi oleh Presiden Soeharto sebagai upaya pengebirian UUD 1945. Juga sikap kritis Soerjadi dalam menanggapi berbagai kecurangan pemilihan umum, telah membuat pemerintah, ABRI dan Presiden Soeharto gerah. Sejumlah daftar dosa Soerjadi tampaknya memang digunakan oleh pemerintah, ABRI dan pejabat-pejabatnya untuk menggusurnya. Dipanggilnya Soerjadi sebagai saksi dalam tindakan kriminal, yakni penculikan dan penyiksaan aktivis PDI yang menentang kepemimpinannya. Pihak ABRI membuat sejumlah kriteria tentang kepemimpinan partai banteng ini, dan menjurus ke Soerjadi dengan mengatakan hendaknya tidak cacat hukum. Pangab Jenderal Faisal Tanjung setelah diterima oleh Presiden Soeharto juga mengatakan hal yang senada, "agar kongres PDI tidak memilih ketua yang cacat hukum, misalnya tiba-tiba yang bersangkutan terlibat dalam kasus penculikan aktivis PDI yang menentangnya. Kongres PDI di Medan kisruh dan tidak menghasilkan keputusan, karena ruang sidangnya diambil alih kelompok 17 lawan Soerjadi. Baku hantam antara kedua kelompok tidak dapat dihindarkan, meskipun sempat mencuat bahwa secara aklamasi Soerjadi terpilih pada tanggal 22 Juli 1993 tetapi Mendagri Yogie S. Memet mengatakan bahwa Kongres IV PDI gagal dan pemilihan tidak sah. Untuk mengatasi

⁸⁰ Ikra, ABRI dan, h.74-79.

gagalnya Kongres IV PDI, dibentuklah Carataker dalam rangka persiapan Kongres Luar Biasa (KLB). KLB terbentuk di Surabaya dan Latief Pudjosakti ditunjuk sebagai ketuanya, karena dianggap dekat dengan pemerintah

Sekitar 70 orang yang berasal dari DPC PDI mendatangi Megawati agar bersedia dicalonkan sebagai ketua umum PDI. Dalam acara ulang tahunnya, Megawati mengeluarkan buku Bendera Saya Kibarkan sebagai bukti atas keseriusan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PDI. Melihat keseriusan Megawati, beberapa DPC PDI di daerah-daerah mendapat tekanan mulai dari Sospol, Kodim, hingga Pangdam, agar mereka tidak mencalonkan dan mendukung Megawati. Di Solo misalnya, R.M. Makyo Sumaryo gagal sebagai utusan ke KLB. Keanehan ini semakin terlihat, dengan dikeluarkannya surat durat permohonan maaf Makyo ke Pangdam IV Diponegoro atas dukungannya terhadap Megawati. Keinginan untuk membendung Megawati sebagai calon Ketua Umum PDI, disebabkan oleh (1) Megawati merupakan pewaris dan putra dari Sukarno, sehingga dikhawatirkan akan munculnya Soekarnoisme; (2) bila Mega lolos ke KLB, tidak menutup kemungkinan PDI akan mengancam *status quo* kekuasaan.

Seperti telah diramalkan banyak pihak, KLB yang diselenggarakan 1-5 Desember 1994 di Surabaya mengalami *deadlock*, karena alotnya pembahasan mekanisme pemilihan ketua antara yang menghendaki formatur (7 suara) dan voting (73 suara). Padahal dalam acara pandangan umum, Megawati secara aklamasi terpilih, Mega dicalonkan oleh 256 DPC, sementara Budiharjono hanya 33 DPC dan Soetarjo Soerjoguritno mendapat dukungan kurang lebih 15 DPC. Secara nyata sebagian besar

DPC mencalonkan Megawati, sehingga secara *de facto* Mega telah terpilih sebagai ketua. Sementara itu di Jakarta, pada siang hari (4 Desember) Mendagri dipanggil oleh Presiden, dan menyatakan pemerintah tidak berkeberatan dan tidak menghalangi Mega. Sore harinya, para Kaditsospol sudah tak terlihat di arena KLB. Pada pukul 24.00 (5 Desember) KLB dibubarkan oleh polisi, beberapa menit sebelumnya Megawati menyatakan secara *de facto* sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998. Akhirnya acara dilanjutkan pada Munas PDI 22-23 Desember di Jakarta dan Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum PDI.

Namun Mega tidak diakui sebagai ketua oleh Mendagri. Pemerintah, ABRI dan pejabatnya menginginkan agar PDI melakukan kongres di Medan pada tahun 1996. Kongres yang dilakukan bulan Juni diprakarsai oleh salah satunya adalah ABRI. Soerjadi kembali diusulkan untuk menjadi ketua PDI. Dengan campur tangan ABRI, akhirnya Soejadi terpilih sebagai ketua umum. Terpilihnya Soerjadi menjadi ketua, menurut Kastorius Sinaga,⁸¹ karena kelompok Soerjadi memanfaatkan kekuatan riil yang dimiliki pendukungnya yaitu pemerintah dan ABRI pada waktu yang sangat tepat, yaitu ketika Megawati es, lawan utama politiknya dipandang berpotensi menjadi "faktor pengganjal" bagi kesuksesan skenario dan stabilitas politik berjangka pendek. Megawati berpotensi sebagai faktor pengganjal, karena ia telah menjadi "simbol" yang tertindas, sekaligus "ratu adil" yang diharapkan mampu membawa angin perubahan yang berarti kedepan. Karenanya tak mengherankan bila tingkat radikalisasi, massa pendukung Mega berkembang, dari semula sekedar kekecewaan emosional,

⁸¹ Kastorius Sinaga, "PDI Pascakongres", *Gatra*, 13 Juli 1996, h.10.

berubah menjadi perlawanan politik. Disamping itu sumber basis massa pendukung pro-Megawati telah begitu meluas, tak lagi terbatas dikalangan "kader dan satuan" partai, melainkan juga meliputi barisan LSM yang selama ini sudah lama menanti pemertapan dan perubahan.

Melihat kepengurusan baru PDI pimpinan Soerjadi diakui pemerintah, pendukung Megawati melakukan kegiatan mimbar bebas. Menurut Pangab Faisal Tanjung (22/7) kegiatan mimbar bebas yang berlangsung setiap hari di markas DPP PDI yang dikuasai kubu Megawati, sudah menjurus makar dan ditunggangi PKI. Mimbar itu dinilai telah menyudutkan ABRI, pemerintah dan negara.⁸² Kasum ABRI Letjen Soeyono,⁸³ memberikan penjelasan pernyataan Pangab tersebut. Yang pertama (menyudutkan ABRI) mereka menuntut pertanggungjawaban Pangab dan Kasum terhadap peristiwa apa saja yang berkaitan dengan ABRI. Peristiwa yang terjadi di daerah-daerah beberapa waktu yang lalu diungkit-ungkit lagi, seperti kasus Tanjungpriok, Lampung, Ujung Pandang, sampai peristiwa pembunuhan orang-orang PKI pada tahun 1965. Jadi mereka menuntut pertanggungjawaban Pangab atas semua peristiwa itu. Setelah Pangab, mereka juga menuntut pertanggungjawaban. Siapa panglima tertinggi? Pak Harto. Yang kedua (menyudutkan pemerintah), semua kasus yang terjadi dilingkungan kabinet diungkit-ungkit. Mendagri, Menparpostel, Menhub, Menkeh, dan beberapa menteri lainnya terus mereka sudutkan. Macam-macam saja kasusnya, pokoknya semua dimintai pertanggungjawaban. Terus akhirnya yang disudutkan adalah kepala pemerintahan. Siapa? Pak Harto lagi.

⁸² Majalah *Forum Keadilan*, No.9, Thn. V, 12 Agustus 1996, h.16.

⁸³ Wawancara Wartawan *Forum Keadilan*, No.9,....., h.16.

Terus yang ketiga (menyudutkan negara), semua lembaga tinggi negara mereka jelek-jelekan. Misalnya dalam kasus Eddy Tansil, Pak Sudomo dan Pak Sunerlin diserang. Siapa mereka? Ketua DPA dan Ketua BPK. Lalu dalam kasus Andi Andjojo, Ketua MA juga terus diserang. DPR, dianggap tak berfungsi mereka mendiskreditkan semua lembaga tinggi negara yang ada. Akhirnya mereka meminta pertanggungjawaban terhadap kepala negaranya. Siapa? Pak Harto. Nah, dari upaya-upaya itu jelas sasaran utama mereka. Apa lagi kalau bukan makar?

Suhardiman, sebagai mantan perwira tinggi ABRI yang juga Ketua SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), memberikan komentar tentang pernyataan Pangab tentang makar, dengan menyatakan " Saya baru mengkonstatir bahwa masyarakat tertentu mau menggalang kelompok-kelompok "pelangi" menjadi *people power*. Baru sampai disitu. Nah pernyataan Pangab itu lebih jauh lagi sehingga saya ketinggalan. Jika mau makar, omong kosong kalau tidak ada unsur ABRI. Kalau begitu, ABRI-nya yang dicurigai itu, ditindak saja daripada nanti terlanjur. Itu, scandainya demikian".⁸⁴

Mimbar bebas itu, kemudian berakhir dengan lahirnya kasus 27 Juli 1996. Terhadap kasus 27 Juli Letnan Jenderal Syarwan Hamid (Wakil Ketua DPR) berpendapat, tidak arif bila secara hitam putih melihat kasus kerusuhan 27 Juli 1996, sebagai potret yang membenarkan bahwa ruang dan sarana penyaduran aspirasi politik yang mampat atau kurang berfungsi.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara Forum Keadilan, No. 9, Tahun V, 19 Agustus 1996, h. 24.

⁸⁵ Syarwan Hamid, "Mewadahi Peran Serta Politik Masyarakat", dalam Syarofin Arba MF, ed., *Demitologi Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1998), h. 272.

Untuk mengamankan Jakarta setelah Kasus 27 Juli 1996 Pangdam Jaya meminta bantuan logistik Rp. 1,5 milyar, untuk kebutuhan pasukan selama satu bulan. Kasum ABRI (Letjen Soeyono) menyetujui Rp. 500 juta, alasannya operasi ini bisa dilakukan bertahap. Kejadian ini, memunculkan kabar dirinya tidak mau membiayai operasi 27 Juli. Untuk menutup kekurangan dana tersebut, rupaya ada permintaan dana langsung ke pengusaha Sudwikatmono dan beberapa pengusaha lain. Masih menurut Soejono, ketika ditanya mengapa harus meminta kekurangan uang dari pengusaha, padahal ABRI sendiri masih ada uang. Sutyoso mengatakan ditawari oleh AD, namun makin lama jawabannya makin melebar. Sutyoso, kini Gubernur DKI ketika dikonfirmasi TEMPO membantah. Ia menyatakan "Enggak benar ada permintaan dana kepada para pengusaha. Dana logistik pasukan yang banyak itu didapat dari AD dan Mabes ABRI".⁸⁶ Namun konfirmasi Sutyoso tersebut, masih dipertanyakan karena urusan AD hanya menyangkut operasional, tidak sampai pada penyediaan logistik. Dalam hal ini Letjen Soeyono (mantan Kasum ABRI 1995-1996) memberikan komentar, memang aneh, saya merasakan ada duplikasi komando antara Feisal dan R.Hartono. Jadi saya mempertanyakan secara prosedural mengapa AD menawari, sebab disini menurut saya ada keganjilan. Soeyono juga merasakan adanya friksi sejak 1995 ketika menjadi Kasum. Ada kejadian-kejadian bersamaan yang khusus, ketika adanya friksi. Misalnya kedekatan hartono dengan Tutut sehingga ia memiliki link khusus dengan Pak Harto. Atau hubungan Prabowo dengan Pak Harto. *Bypass* dalam

⁸⁶ Lihat, Wawancara Soeyono, "Ada Duplikasi Komando antara Feisal dan Hartono", *Tempo*, 20 Februari 2000, h.34 - 35.

komando dan hubungan-hubungan langsung yang tidak jelas ini adalah sumber terpuruknya TNI.⁸⁷ Setelah kasus 27 Juli Letjen Soeyono diganti dengan Letjen Tarub.

Respon terhadap PRD

PRD (Partai Rakyat Demokratik), pada awalnya merupakan organisasi gerakan mahasiswa. Ia lahir 2 Mei 1994 dengan nama Persatuan Rakyat Demokratik. Sebagai ketua Sugeng Bahagijo, dibantu Aris Arief Mundayat, dosen antropologi UGM yang juga sebagai Ketua Litbang PRD dan ideolog PRD pada awal kelahirannya. Setahun kemudian, mulai timbul perbedaan dalam penerapan ideologi perubahan, sehingga membawa perpecahan di dalam. Sugeng yang dinilai terlalu lamban disingkirkan. Kemudian muncullah KPO (Komite Penyelamatan Organisasi) PRD. Terpilih Budiman Sudjatmiko sebagai Ketua Presidium KPO-PRD. Sugeng tak tinggal diam, ia kemudian mendirikan embrio partai PADI (Persatuan Rakyat Demokratik Indonesia). Pada kongres luar biasa 15 April 1996, di Kabupaten Sleman Yogyakarta, PRD diproklamasikan sebagai partai politik, yang berasaskan "sosial demokrasi kerakyatan". Sebagai ketua terpilih Budiman Sudjatmiko, dan Petrus H.Hariyanto yang drop out dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro sebagai sekjen.⁸⁸

Budiman⁸⁹, menyatakan landasan perubahan PRD dari persatuan menjadi partai: pertama sebagai jembatan yang menggabungkan sektor-sektor masyarakat

⁸⁷ Wawancara Soeyono, "Ada Duplikasi.....", h. 35.

⁸⁸ *Forum Keadilan*, No.9....., h.18.

⁸⁹ Wawancara Wartawan *Forum Keadilan*, No.9....., h.20.

(organisasi gerakan mahasiswa, buruh, atau petani yang terpisah), sehingga dapat menentukan program secara bersama. Dalam perjalanannya kita tidak sekedar membutuhkan suatu forum dialog, melainkan suatu forum koordinasi yang lebih rapi dan lebih terarah, agar gerakan ini lebih terpinpin, bukan hanya spontan dan sporadis. Yang kedua, kita sudah merasa siap, dalam arti program politik, ekonomi, dan budaya alternatif yang akan kita tawarkan untuk Indonesia di masa depan.

Sebagai gerakan prodemokrasi tampak wacana, metode dan aktivitasnya bagi upaya demokratisasi sebagai tujuan PRD. Sebagaimana selanjutnya dinyatakan Budiman bahwa dalam demokratisasi perlu adanya iklim kebebasan rakyat untuk berorganisasi, kebebasan pers, parlemen yang lebih kuat, kekuasaan yudikatif yang lebih mandiri, adanya partai politik baru yang lebih aspiratif, serta dihilangkannya massa mengambang. PRD dalam perjuangannya disamping menggunakan selebaran dan terbitan, juga menggunakan metode gerakan massa.

Aktivitas - aktivis PRD,⁹⁰ banyak bermain dalam demonstrasi buruh, petani, dan mahasiswa radikal. Mereka berusaha memikat massa dengan jargon "satu perlawanan, satu perubahan, dan lima tuntutan; upah Rp.7.000, turunkan harga, awasi pemilu, partai baru, presiden baru, dan referendum untuk rakyat Maubere". Aktivitas anggota-anggota PRD juga bekerjasama dengan beberapa organisasi lain, misalnya PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia), MARI (Majlis Rakyat Indonesia), KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), Oposisi Indonesia, dan GMNU (GerakanMuda

⁹⁰ *Forum Keadilan*, No.9,...., h.19.

NU). Mereka terlibat juga dalam demo-demo YLBHI, kasus Ujungpandang, Pasuruan dan sebagainya.

Keterlibatan PRD, dalam menggerakkan aksi massa, juga dinyatakan Kasum ABRI Letjen Soeyono⁹¹, ia menunjuk aksi unjuk rasa PDI di Solo, salah seorang tokoh PKI muncul (seorang anggota Committee Central PKI). Siapa yang menggerakkan aksi unjuk rasa ketika itu ? PRD. Kemudian aksi unjuk rasa buruh di Surabaya, yang menggerakkan juga PRD. Nah, di DPP PDI, aktivis PRD juga muncul menjadi penggeraknya. Faktanya begitu. Namun Letjen Syarwan Hamid, Kassospol ABRI, melihat PRD bukan dalang Kerusuhan 27 Juli 1996. Ia menyatakan PRD mengarah sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996, hanya indikasi. Jika melihat manifesto PRD, memang dapat dikatakan sebagai metamorfosa dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Apalagi manifesto PRD mirip sekali dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga PKI.⁹²

Terhadap tuduhan oleh ABRI bahwa aksi-aksi PRD mirip cara PKI, Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko menyatakan, bahwa itu cuma tradisi ABRI yang sudah terbiasa membuat tuduhan semacam itu, yang maksudnya sekedar mengungkit trauma politik atau memojokkan orpol yang tidak disukai. Kami minta bukti, fakta, dan data, bahwa organisasi kami adalah komunis. Tujuan dan program kami adalah demokratisasi multipartai, demokrasi parlementer. Buktikan bahwa itu adalah program komunis.⁹³

⁹¹ *Forum Keadilan*, No. 9, ..., h. 17.

⁹² Wawancara Syarwan Hamid, "PRD Bukan Dalang Kerusuhan 27 Juli", *Tempo Interaktif*, Edisi, 42/1, 14 Desember 1996, Vol. II, September 1996 - Februari 1997, h. 385.

⁹³ Wawancara Budiman Sudjatmiko, *Forum Keadilan*, No. 9, Th. V, ..., h. 20.

Tentang penilaian bahwa model pengerahan massa dicap PKI, Riswanda Imawan menyatakan sangat keterlaluan jika model aksi saja sebuah ormas langsung dicap PKI. Model pengerahan massa (people power) dimana saja sama. Arbi Sanit dalam hal ini menyatakan, cara menguji ke PKI-an ormas bisa melalui ciri-ciri organisasi PKI. Ciri ideologi PKI tentu Sosialis-Marxisme, pola organisasi yang sentralistis, aksinya mengahafalkan segala cara, dan melalui aksi massa. Tiga ciri yang pertama tidak ada pada ormas dan LSM prodemokrasi yang kini acap diberi label "bergaya PKI". Yang mirip hanya pola aksi massa, Namun banyak berbeda. Pola aksi PKI selalu ditujukan untuk mendukung permainan elite politiknya, sementara pola aksi massa ormas dan LSM di sini bertujuan untuk mengkritik penguasa. Sanit menduga ABRI ingin kembali membangkitkan kebencian masyarakat terhadap komunis, dengan harapan masyarakat tidak akan mendukung gerakan prodemokrasi.⁹⁴

Meskipun PRD menolak bahwa aksi-aksinya mirip dengan PKI, tetapi pada 12 Desember 1996 Ketua PRD Budiman Sudjatmiko, Ketua SMID Jabotabek Garda Sembiring, dan tiga rekan lainnya Yakobus Eko Kurniawan, Suroso dan Ignatius Kurniawan diadili di PN Jakarta Pusat. Dakwaan berkaitan dengan serangkaian kegiatan demonstrasi yang dilakukan PRD sejak 18 Juli 1995 hingga 27 Juli 1996., yang dinilai pihak Kejaksaan sebagai tindakan subversif. Dalam dakwaan itu antara lain, disebutkan bahwa PRD membikin dan menyebarkan manifesto PRD yang dianggap berbau komunis. Juga dipersalahkan telah memberikan PRD Award kepada orang-orang yang nyata-nyata menentang pemerintah. Antara lain Xanana Gusmao,

⁹⁴ "Menyoal Kuda Troya dan Hantu Politik", *Forum Keadilan*, No.9, Th.V....., h.14.

Pramodya Ananta Toor, Goenawan Muhammad, Thomas Wanggay, Sri Bintang Pamungkas dan George Aditjondro.⁹⁵ Dalam proses pengadilan selanjutnya Ketua PRD divonis hukuman penjara.

Respon terhadap PUDI

PUDI (Partai Uni Demokrasi) didaftarkan oleh Sri Bintang Pamungkas, pada 29 Mei 1996. Karena ceramahnya pada 9 April 1995 di Technische Universitas Berlin, Bintang didakwa telah melakukan penghinaan secara sengaja terhadap Presiden Soeharto. Ucapan yang dinyatakan dalam tanya jawab yang dinilai sebagai penghinaan, antara lain, bahwa Soeharto dan Soekarno semuanya sebenarnya menyeleweng dari UUD 1945, dan keduanya diktator.⁹⁶ Dakwaan ini kemudian yang membawanya ke Pengadilan dan divonis penjara 34 bulan. Baru kemudian dibebaskan bersama Muhtar Pakpahan, pada 1998 ketika pemerintahan B.J. Habibie.

Lewat penjara Bintang tetap aktif melakukan kegiatan sebagai Pemimpin Partai, seperti pencalonan dirinya dan Sekjenya (Yulius Usman) pada 11 Oktober 1996, sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 1998 – 2003. Pemilihan Presiden menurutnya harus dipilih langsung. Pencalonan ini dimaksudkan untuk menghindari calon tunggal, agar setiap calon memilih calonnya sendiri. Dalam menghadapi tahun

⁹⁵ Lihat, Wawancara Budiman Sudjatmiko, "Mereka Tak Pernah Bisa Membuddikan Kani Mekar", *Tempo Interaktif*, Edisi 42/L, 14 Desember 1996, Vol. II, September 1996 – Februari 1997, h. 383.

⁹⁶ "Bintang di Pengadilan", *Gatra*, 15 Nopember 1995, h. 80.

1997, PUDI menyusun tiga agenda. Pertama, menolak Pemilu, karena pemilu dipakai oleh pemerintah untuk dijadikan suatu alat supaya berkuasa terus menerus. Kedua, meminta agar Pak Harto tidak dicalonkan lagi pada tahun 1998. Ketiga, menyiapkan tatanan baru pasca Soeharto. Agenda itu, akan disebarakan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, lewat kartu ucapan selamat tahun baru, selamat puasa dan Idul Fitri.⁹⁷

PUDI dalam pandangan rezim Orde Baru, merupakan partai di luar sistem. Oleh karena itu, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari PUDI juga dinilai di luar sistem. Dalam konteks ini Mayjen Z.A. Maulani, mantan Pangdam VI Tanjungpura, menyatakan "saya tidak bisa mengatakan lebih setuju sipil atau militer. Tapi syarat-syarat calon pengganti Pak Harto harus ada dalam sistem politik kita sekarang. Yang pasti, kalau masih ada Pak Harto, calon presidennya tidak akan orang yang tidak direstui dan dipercaya Pak Harto. Tidak akan Pak Harto membiarkan orang yang tidak dipercayainya naik".⁹⁸

Respon terhadap Intelektual

Intelektual atau cendekiawan, menurut Lewis Coser, adalah orang-orang yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya.

⁹⁷ Lihat, Wawancara Sri Bintang Parungkas, "Saya Menolak Pemilu 1997", *Tempo Interaktif*, Edisi 46/I, 11 Januari 1997, Vol. II, September 1996 - Februari 1997, h. 452 - 454.

⁹⁸ Wawancara Z.A. Maulani, "Proses Demokratisasi Bukan Lari Sprint 100 Meter", *Tempo Interaktif*, Edisi 35/I, 26 Oktober 1996, Vol. II Agustus 1996 - Februari 1997, h.237.

Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.⁹⁹

Pada tahun 1990-an, kaum intelektual mulai berani mengembangkan wacana demokrasi, mengajukan perlunya dilakukan perubahan politik maupun perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Mereka melakukan aktivitas baik secara individual maupun secara teorganisir/kolektif. Berikut ini merupakan deskripsi bagaimana militer merespon wacana, sikap dan perilaku kaum intelektual prodemokrasi.

Unsur-unsur elite intelektual pada April 1991 membentuk kelompok prodemokrasi Forum Demokrasi (Fordem). Pimpinan Fordem adalah Abdurrahman Wahid, tokoh muslim berpengaruh yang juga Ketua NU. Menurut Wahid, anggota Fordem ingin mendiskusikan dan merenungkan parameter – parameter demokrasi, batas-batas kekuasaan, dan bagaimana kita dapat memajukan proses demokratisasi dengan cara memuaskan.¹⁰⁰

Kekritisan Forum Demokrasi, tampak pada perbedaan yang tajam dengan Jenderal Try Sutrisno mengenai Pemilu 1992. Menurut Sutrisno pemilihan bukan merupakan pegangan bagi rakyat untuk memilih orang yang akan memformulasi *prinsip negara baru*. Pemilihan bukan digunakan untuk perubahan, tetapi untuk memilih mereka yang memperkuat *status – quo*. Pada waktu yang sama Ketua

⁹⁹ Diteliti dikutip Arief Budiman, "Peranan Mahasiswa sebagai Intelektual", Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Penyunting), *Cerdikawan dan Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1984), h. 143.

¹⁰⁰ Jhlin, *Oposisi*....., h. 96.

Fordem Abdurrahman Wahid, menyatakan bahwa Pemilu 1992 merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menghasilkan perubahan.¹⁰¹

Terhadap kekritisan Petisi 50 dan Forum Demokrasi. Pangdam Jaya Hendropriyono, menyatakan jika Petisi 50 dan Forum Demokrasi mengkritisi tingkah laku individu birokrasi dapat diterima. Bagaimanapun apabila (mereka mengkritisi) kebijakan nasional dan program – program yang telah disetujui oleh pemerintah dan tujuannya sudah jelas untuk memelihara stabilitas, persatuan dan kesatuan rakyat, kebijakan itu tidak dapat diganggu atau dirusak. Dan jika misinya menghasut atau menyerang, tidak dapat ditolerir.¹⁰² Meskipun Fordem bersikap sangat moderat dalam kritisismenya terhadap pemerintah, kelompok ini telah mendapat tekanan dari otoritas, pertemuan dengan Fordem dilarang selama kampanye pemilihan umum Mei 1992.¹⁰³

Perkembangan kekritisan kaum intelektual tampak pada tahun 1996 antara lain mengenai Golput dan berbagai kerusuhan sosial. Intelektual Arief Budiman, dikenal sebagai juru bicara Golput sejak Pemilu 1971. Pada tahun 1996, Arief Budiman kembali melontarkan kritik yang tajam terhadap Pemerintah tentang persoalan Golput. Menurut Arief, Golput merupakan individu dalam sistem (IDS). Karena pertama, menurut UU yang berlaku adalah sebuah hak (hak untuk tidak memilih). Kedua, Golput jadi berjaya karena praktek-praktek orang – orang

¹⁰¹ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia : Democracy, Islam and Ideology of Tolérance*, (London : Routledge, 1995), h. 147.

¹⁰² Douglas, *Politics in.....*, h. 146.

¹⁰³ Uhin, *Oposisi.....*, h. 97.

pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Memang pemerintah diidentifikasi dengan Golkar. Tapi rakyat nampaknya tahu sebenarnya orang – orang yang ada di PPP maupun PDI merupakan juga orang-orang pemerintah. Lihat saja Soerjadi yang oleh pemerintah dianggap sebagai Ketua PDI yang sah. Kalau dia tidak dijagai aparat keamanan, setiap dia turun ke bawah, dia akan difimpuki batu oleh massa rakyat. Kalau sudah begini, rakyatpun ramai-ramai menjadi Golput. Oleh karena itu , kalau Golput mau ditumpas, basmilah para pejabat yang korup, yang ingkar janji, yang jadi alat penguasa untuk mempertebal kocknya dengan mengurbankan hak – hak rakyat. Kalau orang-orang seperti ini bisa dihilangkan, saya yakin Golput akan bisa ditumpas. Jenderal Try Sutrisno, sebaliknya menilai Golput adalah individu di luar sistem.¹⁰⁴

Tentang kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai tempat sepanjang tahun 1996, seperti kasus Freefort, Universitas Muslim Ujung Pandang, kasus Nabire dan lain-lain. Amin Rais memberikan opini bahwa kerusuhan sosial diakibatkan oleh faktor kesenjangan sosial dan ekonomi. Opini ini mendapat tanggapan dari Kasospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid. Syarwan menyatakan isu kesenjangan dan keadilan sosial merupakan tema yang pas untuk memicu kerusuhan. Kedua isu tersebut, sebenarnya merupakan kemasam.¹⁰⁵ Opini Amin, sesungguhnya merupakan pendapat yang umumnya berkembang dikalangan intelektual lain. Menurut

¹⁰⁴ Lihat, Arief Budiman, "Dua Kiat Menumpas Golput", *Tempo Interaktif*, Edisi 44/I, 28 Desember 1996, Vol. II, September – 1996 – Februari 1997, h. 405 – 407.

¹⁰⁵ "Amin Rais Terganjel Rumput Kering?", *Tempo Interaktif*, Edisi 52/I, 22 Februari 1997, Vol. II, September 1996 – Februari 1997, h. 621.

Nazaruddin Syamsuddin, akar masalah yang dapat memicu potensi konflik yang mengarah pada munculnya kerusuhan SARA, tak lain adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁰⁶ LIPI yang mengadakan penelitian di tiga daerah kerusuhan yaitu Pekalongan, Tasikmalaya dan Situbondo pada kurun waktu 1996 – 1997. Hasilnya juga menunjukkan penyebab yang sama. Yaitu disebabkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Selain itu, memang ada soal yang menyangkut etnis, dan agama, serta akibat arogansi aparat pemerintah, termasuk penegak hukum. Kesenjangan itu, berasal dari diskriminasi dan monopoli politik, demikian antara lain yang dikemukakan Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Wilayah (PPW) LIPI, Mochtar Pabottingi.¹⁰⁷

Kemudian pada tahun 1997, kekritisian juga muncul dari kalangan intelektual LIPI pada diskusi hasil penelitian LIPI “Peranan Sosial Politik ABRI, Masalah dan Prospeknya”, yang didiskusikan pada 25-27 Februari 1997, antara lain mengungkap eksistensi peran sosial politik (sospol) ABRI dan pengajuan beberapa rekomendasi. Eksistensi peran sospol ABRI, misalnya banyak kepala daerah yang ABRI justru menghambat perkembangan daerah. “Keterlibatan” ABRI dalam Kasus PDI 1995-1996, dan “keperpihakan” ABRI pada Golkar dapat menghambat demokrasi. Sedangkan rekomendasi yang diajukan antara lain peran sosial politik ABRI hanya di MPR. Mayjen (Purn) Z.A. Maulani yang juga hadir pada acara diskusi tersebut,

¹⁰⁶ “SARA sebagai Alat dan Karnibing Hitam”, *Forum Keadilan*, Edisi Khusus 17 Agustus 1998, h. 19.

¹⁰⁷ “Sara sebagai Alat.....”, h. 18.

menolak "ekses" penerapan peran sospol ABRI dalam penelitian ini dijadikan bukti bahwa peran itu berbahaya, apalagi mengancam proses demokratisasi. Masih menurut Maulani, "ekses" bisa terjadi di lembaga mana saja. Ekses penerapan peran sospol ABRI mungkin memang ada, tetapi tak perlu menghapus peran itu. Sementara itu Pangab Jenderal Feisal Tanjung, menanggapi tentang saran peran sospol ABRI di MPR saja, Pangab mengembalikannya pada ketentuan undang-undang. Undang-undang adalah kehendak rakyat. Maka kita kembalikan kepada wakil-wakil rakyat. Apakah wakil-wakil rakyat menganggap bila saran itu dijalankan, stabilitas keamanan dan stabilitas politik bisa dijamin.¹⁰⁸

Sedangkan Mayor Jenderal Hari Sabarno, Wakil Ketua F-ABRI, menanggapi usulan LIPI agar peran sospol ABRI sudah waktunya dikurangi memberikan tanggapan sebagai berikut. Tanpa mengubah substansi Dwifungsi ABRI, peran sospol ABRI perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. ABRI memang perlu mengevaluasi kembali sikap tutwuri handayani. Artinya memberi kesempatan lebih banyak kepada jajaran sipil agar mengaktualisasikan lebih eksis lagi. Namun ada persyaratan yang perlu disosialisasikan. Pertama, kalangan di luar ABRI, jangan bersikap primordialistik, harus tetap dalam konteks nasionalisme. Kedua, kalangan sipil harus menghindari konflik intern. Selama ini kalau ada seseorang tokoh yang muncul, teman atau kelompok lain tak mendukung. Yang terjadi, malah dirongrong

¹⁰⁸ "Gugatan Baru Untuk Dwifungsi ABRI", *Gatra*, 8 Maret 1997, h. 23 - 25.

atau dijegal dan difitnah. Kalau itu dilaksanakan dengan baik saya kira peran sospel ABRI secara alamiah akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.¹⁰⁹

Memasuki tahun 1998, menjelang SU MPR, antara lain muncul pemikiran perhunya pembaharuan politik, seperti dinyatakan intelektual Nurcholis Madjid dalam diskusi terbatas dengan Forum Keadilan. Ia mengatakan bahwa pembaharuan yang diperlukan sekarang bukanlah revolusi atau menggantikan UUD dan Pancasila, tetapi cukup *overhaul* atau turun mesin dan Presiden mendatang harus mempunyai visi tentang negara modern yang transparan dan *accountable*.¹¹⁰ Dalam rangka menyambut gagasan adanya pembaharuan yang tampak mulai menyentuh kepemimpinan nasional, kelompok masyarakat intelektual yang dimotori oleh Sumitro Djojohadikusumo dan dikoordinasikan oleh Gema (Gerakan Masyarakat) Mariani mengajukan nama Emil Salim sebagai calon Wakil Presiden. Pencalonan tersebut disampaikan kepada FUD (Fraksi Utusan Daerah) dan diterima Mayor Jenderal Sutiyo, Gubernur DKI Jaya. Menanggapi hal ini Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet selaku Koordinator Umum FUD menyatakan bahwa FUD mencalonkan BJ. Habibie. Fraksi ABRI melalui Pangab Jenderal Faisal Tanjung tanggal 18 Februari 1998 atau dua hari sebelum serah terima jabatan Pangab mengumumkan bahwa ABRI mendukung pencalonan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi HM Soeharto sebagai Presiden 1998 – 2003.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara Mayor Jenderal Hari Sabarno, *Gatra*, 8 Maret 1997, h. 30.

¹¹⁰ Babari, "Antara *Status Quo* dan Pembaruan Menjelang Sidang Umum MPR 1998", *Analisis CSIS*, Th. XXVII/1998, No.2, h. 189.

¹¹¹ Babari, "Antara *Status Quo*.....", h. 187.

Tentang pencalonan Emil Salim oleh Gema Madani, Letjen Hari Sabarno, Ketua Fraksi ABRI DPR RI antara lain menyatakan, jangan membuat saluran sendiri. Lebih baik memfungsikan saluran yang ada dan membuatnya lebih representatif dan lebih berkualitas.¹¹²

Dalam SU MPR 1998, Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden untuk periode 1998 – 2003. Sementara itu, krisis yang dimulai pada pertengahan 1997 tidak tampak menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan secara cepat. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat semakin menguat, dan terutama diekspresikan dalam bentuk unjuk rasa. Dalam perkembangan berikutnya, menghadapi suara-suara kritis yang semakin tajam dan keras terutama dari kalangan intelektual aktivis kampus tentang penyelesaian krisis yang melanda sejak Juli 1997, baru pada Maret 1998 militer sebagai kekuatan politik dominan berupaya untuk mengadakan dialog. Usul dialog bermula dari usulan wartawan ketika jumpa pers dengan Pangab Jenderal Wiranto di Markas Besar ABRI pada 12 Maret 1998. Kemudian dialog dilakukan di Bandung (25 Maret), Yogyakarta (27 Maret) dan di Surabaya (30 Maret).¹¹³ Di Bandung dialog dilakukan Kasospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yodhoyono, Kepala BIA (Badan Intelejen ABRI) Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Djamari Chaniago, dengan 25 pejabat daerah, cendekiawan Kampus dan tokoh masyarakat. Dari dialog

¹¹² Wawancara Letjen Hari Sabarno, "Yang Interupsi Calon Wapres Akan Di-Recall", *Tempo Interaktif*, Edisi 52/1, 28 Februari, Vol. VI, Desember 1997 s/d Februari 1998, h. 537.

¹¹³ Lihat, "Suara-Suara Kritis yang Mulai Didengar", *Forum Keadilan*, No.1, Tahun VII....., h. 16 – 17.

tersebut, menurut Mayjen Djamaris disimpulkan bahwa dialog tokoh masyarakat dan ABRI memang dibutuhkan. Tak hanya ABRI yang butuh dialog, masyarakat juga butuh.

Di Yogyakarta dialog dilakukan di Hotel Sheraton Mustika, dihadiri sekitar 30 tokoh sipil. Antara lain Amin Rais (UGM), Teuku Yakob (Mantan Rektor UGM), Kunto Wibisono (mantan Rektor UNS), Rubiyanto Miswan (Rektor UNSOED), J.O.I Ihalau (Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga) dan Prof. Eko Budihardjo (UNDIP). Amin Rais menginginkan adanya desentralisasi kekuasaan, agar tidak terjadi *one man show politic*, perbaikan proses rekrutmen politik supaya tidak muncul nepotisme dan pembaharuan lima paket undang-undang politik. Namun menurut Amin dalam hal ini belum ada kesepakatan antara tokoh ABRI dengan kalangan sipil. Kasosopri ABRI Yudhoyono dalam hal ini menyatakan, memang selalu ada hal-hal yang mapan yang perlu dipertahankan, ada kesinambungan, dan juga pembaharuan. Akan tetapi pembaharuan itu harus konstitusional, harus konseptual, gradual, dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar aspirasi kalangan kampus disampaikan dengan tertib dan sopan, lewat saluran politik yang ada. Sedangkan Mayjen Zacky, memberikan penjelasan sekitar penyebab krisis ekonomi. Menurutnya, musibah itu terjadi gara-gara operasi intelejen ekonomi asing George Soros bukan sekedar spekulasi valuta asing, tapi juga kepanjangan tangan negara asing untuk menyerang Indonesia. Tak ada kata lain, kecuali kita harus bersatu padu melawannya.

Di Surabaya, forum di gelar di Hotel Shangri-La. Kasospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, ditemani Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen Djaja Suparman, dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mardiyanto. Sekitar 50 tokoh cendekiawan, kalangan LSM dan Ulama hadir dalam pertemuan tersebut. Dari kalangan cendekiawan antara lain Prof. Dr. Soedarto (Rektor Universitas Airlangga), Prof. Ir. Soegiono (Rektor Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya), Drs. Abdul Jabal Adlan (Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), Prof. Dr. Marselio Donoseputro (mantan Rektor Universitas Airlangga) dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. (guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga). Prof. Sahetapy melukiskan bahwa suara mereka miring semua. Kecuali satu orang dari Angkatan 66. Sahetapy mempersoalkan reformasi ekonomi dan politik. Dalam ekonomi dipersoalkan praktek monopoli, oligopoli, dan kartel yang masih berlangsung. Hal itu perlu dirubah, karena UUD 1945 tidak membenarkan hal itu. Dalam soal politik dinyatakan perlunya sistem kepartaian dibuka lagi. Karena tiga organisasi sosial politik yang ada sekarang tak bisa menampung aspirasi seluruh rakyat. Namun, menurut Sahetapy Kasospol ABRI tak menjawabnya secara transparan. Dia menjawab hanya secara umum.

Meskipun telah dilakukan dialog, kritik terhadap militer maupun pemerintah tetap berlangsung. Seperti yang dilakukan Amin Rais. Amin mengkritik tindakan aparat keamanan terhadap demonstran di Yogyakarta (30 Maret dan 2 April 1998) bahwa penguasa sudah mata gelap, dan hal itu akan berujung pada runtuhnya kekuasaan sendiri. Yang disuarakan mahasiswa adalah suara rakyat, dan

mengimbau agar ABRI tidak salah menilai. Tetapi menurut Kapuspen ABRI Brigjen Abdullah Wahab Mokodongan, pihaknya terpaksa bersikap keras karena mahasiswa berusaha melakukan aksi keluar kampus. ABRI menghawatirkan aksi itu akan merambat ke pembakaran toko-toko dan merusakkan sarana umum. ABRI sebenarnya tidak ingin represif, tapi kalau terpaksa, 'mau apa lagi?'.¹¹⁴

Suara – suara kritis berkembang semakin meluas dan semakin konkrit terhadap tuntutan perubahan politik. Peneliti LIPI Dewi Fortuna Anwar, menyatakan bahwa reformasi tidak terbatas pada perubahan UU Pemilu, tetapi juga UU yang lain seperti UU yang membelenggu kebebasan pers, UU yang membatasi gerak LSM, Ormas, dan masih banyak lagi harus segera mendapat perhatian. Tetapi Ketua Fraksi ABRI Letjen TNI Hari Sabarno, menyatakan baru menyetujui perubahan sebatas lima paket UU politik.¹¹⁵ Bahkan peneliti LIPI lain, Hermawan Sulistyio dalam wawancara dengan Jakarta Post, bahwa tujuan utama reformasi yang dikehendaki adalah pergantian kepemimpinan nasional. Pernyataan ini, mendapat tanggapan Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprojo. Sayidiman mengatakan bahwa yang dikatakan Hermawan Sulistyio tidak dengan sendirinya mewakili kehendak semua mahasiswa yang berdemonstrasi. Dapat diperkirakan yang sungguh – sungguh mempunyai kehendak seperti itu adalah mereka yang mempunyai motivasi politik yang kuat. ABRI sebagai organisasi dan mayoritas keluarga ABRI tidak akan bersedia mendukung begitu saja kehendak politik yang begitu jauh dan radikal.

¹¹⁴ "Bentrokan Setelah Menolak Dialog", *Forum Keadilan*, No.1, Tahun VII, 20 April 1998, h. 15.

¹¹⁵ "Reformasi Konstitusional Ala Presiden Soeharto", *Jawa Pos*, 4 Mei 1998, h. 3.

Sebaliknya ABRI dan mayoritas keluarga ABRI mendukung setiap usaha perbaikan agar korupsi, kolusi, dan nepotisme makin hilang dari kehidupan bangsa, demokrasi Pancasila makin menjadi kenyataan dan kedaulatan rakyat yang dilandasi kekuasaan hukum benar-benar terwujud.¹¹⁶ Apa yang dikemukakan Sullistyo, sesungguhnya tidak sekeras yang dinyatakan intelektual Daniel Sparringa. Menurut Daniel, era Soeharto akan segera berakhir tatkala ia menandatangani *letter of intent* dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Itulah akhir dari episode Soeharto tatkala ia tunduk pada kekuatan luar. Harapan saya Soeharto mau berbesar hati untuk mengundurkan diri. Dan kalau tidak mau, maka harus ada kekuatan massal yang memaksanya untuk turun.¹¹⁷

Tuntutan agar Soeharto mundur, meskipun secara konstitusional lewat SI MPR, dikalangan militer tampak direspon dengan sangat hati-hati. Seperti pernyataan Kasospol ABRI Susito Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan pokok pikiran KBG-A pada kesempatan diskusi sehari "Golkar Memasuki Abad XXI" di Kantor DPP Golkar, Jakarta. Ia menyatakan seluruh komponen bangsa hendaknya memikirkan secara matang adakah fakta, logika, dan kesepakatan bangsa secara menyeluruh bahwa sidang istimewa MPR harus dilaksanakan segera.¹¹⁸

¹¹⁶ Lihat, Sayidiman Suryohadiprojo, "Sikap ABRI", *Forum Keadilan*, Edisi Khusus Ulang Tahun 1998, h. 30.

¹¹⁷ Lihat, Wawancara Daniel Sparringa, "Soeharto Akan Ditekan Oleh Kekuatan Massal untuk Mundur", *Tempo Interaktif*, Edisi 47/IL, 24 Januari 1998, Vol. VI, Desember 1997 – Februari 1998, h. 333.

¹¹⁸ - Kasospol ABRI Soal Sidang Istimewa MPR Harus Dipertimbangkan Secara Matang", *Kompas*, 8 Mei 1998, h. 1.

Pada pertengahan Mei , satu minggu sebelum lengsernya Soeharto, Indria Samego dan Nurcholis Majid masing-masing secara terpisah mengajukan proposal reformasi. Samego mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2002, pembubaran parlemen, parpol bebas mengorganisir kampanye dan Pemilu dijalankan dengan bersih dan adil. Sedangkan proposal Nurcholis mengusulkan Pemilu dilaksanakan pada tahun 2000, Soeharto harus mundur sekali reformasi telah berjalan, seluruh kekayaan keluarga Soeharto harus diserahkan kepada negara. Kedua proposal tersebut diterima Ketua Tim Reformasi ABRI yang dibentuk Pangab Jenderal Wiranto, yakni Letjen Susilo Bambang Yudhoyono , dengan catatan tuntutan berupa penyerahan harta Soeharto dihilangkan, selain itu pencatuman batas waktu Pemilu dihapus.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil *investigating report* Washington Post "Seven Day That Toppled a Titan", seperti dikutip dalam "Di Balik Mundurnya HM Soeharto : Tutut Menangis Saat Bawa Pesan Gus Dur", Kedaulatan Rakyat, Edisi, 28 Mei 1998, h. 1 & 8.

Respon terhadap Aktivis Mahasiswa

Aspinal menggambarkan gerakan mahasiswa pada akhir 1980-an dan awal 1990-an berkonsentrasi pada isu-isu lokal. Mahasiswa memihak rakyat miskin yang dipaksa meninggalkan tanah mereka, dan memproses kasus-kasus lokal dalam hal korupsi dan kerusakan lingkungan.¹²⁰

Bonar Tiger Naipospos, tokoh mahasiswa terkemuka yang aktif dalam kelompok-kelompok studi di Yogyakarta dan editor sebuah penerbitan *Human Rights Register* yang pada tahun 1990 dihukum delapan tahun enam bulan penjara, dan diberi pembebasan bersyarat pada Mei 1994, menggambarkan gerakan mahasiswa 90-an lebih rinci. Bonar, mengemukakan sampai pertengahan 1990-an aksi protes mahasiswa secara beruntun tetap muncul dan isu yang diangkat secara umum berada dalam dua tataran. Pertama, mengenai demokratisasi dan hak asasi manusia. Isu ini berkaitan dengan persoalan kelas menengah perkotaan yang menginginkan terciptanya *good governance*, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya kepastian hukum, serta kelancaran pembangunan. Kedua, mengenai tanah, lingkungan hidup, dan perubahan. Yang terakhir ini lebih terkait dengan kepentingan konkret rakyat bawah, khususnya kaum marginal perkotaan dan petani pedesaan, massa rakyat yang menginginkan untuk membangun blok perlawanan bersama. Masih menurut Bonar, idealisasi gerakan mahasiswa tahun 1990-an adalah berjuang bersama rakyat. Bagi mahasiswa rakyatlah yang paling

¹²⁰ Uhlin, *Oposisi...*, h. 109.

berhak menjadi aktor dan penentu perubahan. Dalam pengorganisasian aksi, mahasiswa berada di belakang dan sekedar "mitra" atau pendukung. Tujuannya adalah untuk memulihkan dan membangkitkan kepercayaan diri rakyat yang porak poranda akibat depolitisasi dan deideologisasi agar dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak individu dan sosialnya.¹²¹

Sedangkan Eko Prasetyo, aktivis GM 98 (Gerakan Mahasiswa 1998) menggambarkan jika awal - awal 90-an aktivis mahasiswa dalam GM senantiasa bersikap "menjemput bola" terhadap isu - isu di sektor bawah, dengan pembentukan komite advokasi dan organisasi independen, justru fase - fase belakangan lebih aktif dan cepat menangkap serta memahami isu, kemudian meresponnya. Perkembangan dinamika politik medium 90-an mengalami akselerasi luar biasa. Peristiwa 27 Juli 1996 menunjukkan bangkitnya perlawanan rakyat, koalisi demokratik mahasiswa dengan LSM serta kelompok oposisi radikal. Eko juga melihat organisasi - organisasi mahasiswa 1990-an berkembang dengan semangat mendekonstruksi korporatisme Orde Baru dalam komite seperti SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), dan dalam bentuk organisasi prodemokrasi seperti FAMI, AJI, SBSI dan ALDERA¹²²

¹²¹ Bonar Tigor Naipospos, "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik : Kearah Gerakan Rakyat?", *Prisma* 7, Juli 1996, h. 32.

¹²² Eko Prasetyo, "Elitisme Menuju Populisme : Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Indonesia Era 90 - 98", Epilog dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta : Kerjasama Pustaka Pelajar dengan INSIST, 1999), h. 182 - 183.

Arief Budiman, melihat bintang lapangan gerakan mahasiswa 90-an adalah gerakan mahasiswa tahun 1998. Gerakan mahasiswa 1998 merupakan “bintang lapangan “ bagi terjadinya proses reformasi dan tergulingnya diktatur yang berkuasa lebih dari 30 tahun, yang lebih memiliki keberanian dan lebih mandiri, ketimbang gerakan mahasiswa tahun 1966. Arief lebih lanjut menggambarkan, gerakan mahasiswa tahun 1998 ketika harus menghadapi militer sendirian, dan pada saat itu militer masih relatif bersatu dibawah pimpinan Jenderal Wiranto. Memang katanya Korps Marinir bersimpati pada mahasiswa, tapi simpati ini sangat berbeda jauh ketimbang perlindungan langsung yang diberikan RPKAD dan Kostrad terhadap mahasiswa tahun 1966. Korps Marinir tidak terbukti membela mahasiswa ketika mereka ditembaki pada Mei, dan juga kemudian pada bulan Nopember 1998.¹²³

Bagaimana respon militer terhadap aktivis mahasiswa tahun 1990-an, khususnya gerakan mahasiswa tahun 1998, berikut beberapa contoh yang cukup menonjol atau bersifat nasional.

Pada 14 Desember 1993 sekitar 200 aktivis mahasiswa yang tergabung dalam jaringan FAMI berdemonstrasi di depan parlemen. Mereka menuntut diakhirinya “pendekatan keamanan” bagi masalah-masalah sosial, dan berpendapat Presiden Soeharto bertanggung jawab atas berbagai penyelewengan hak asasi manusia. Salah satu slogan mereka berbunyi “Seret Presiden ke hadapan sidang

¹²³ Arbi, *Pergolakan Melawan.....*, h. Pengantar vii – xi.

Istimewa MPR". Demonstrasi ini berlangsung selama beberapa jam, tetapi secara tiba-tiba dan dengan kasar dibubarkan oleh militer. Beberapa mahasiswa terluka dan dua puluh satu orang ditangkap. Selama pengadilan terhadap dua puluh satu mahasiswa itu, terjadi demonstrasi di pengadilan maupun di banyak kampus di seluruh Indonesia. Kedua puluh satu mahasiswa itu di hukum masing-masing enam bulan penjara, hukuman yang belakangan meningkat menjadi antara delapan dan empat bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta.¹²⁴

Aktivistis mahasiswa yang sering menjadi sorotan militer pada pertengahan 1990-an, adalah SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi). SMID misalnya menjadi motor utama aksi demonstrasi di Solo. Kemudian bergandengan-tangan dengan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) menggerakkan unjuk rasa menyambut Hari Buruh 1 Mei 1995 di Semarang.¹²⁵

Meskipun Kasim ABRI Letjen TNI Soeyono, tidak menuduh secara tegas bahwa SMID termasuk OTB, karena masalah OTB dimaksudkan untuk menekankan perlunya kewaspadaan terhadap bahaya laten PKI, namun dari pernyataan tentang indikatornya sulit dibantah mengarah pada SMID dan organisasi lain, seperti PPBI dan KPO-PRD. Soeyono menyatakan bahwa diantara OTB adalah organisasi yang memakai kedok mahasiswa dengan dalih solidaritas. Mereka tergabung dalam organisasi massa pemuda dan mahasiswa yang berbau kekiri-kirian, radikal, dan menampung anak-anak eks PKI. Mereka kemudian bereaksi dan satu diantaranya

¹²⁴ Ulin, *Opisii*....., h.111.

¹²⁵ "Di Sini Anak Eks PKI Diterima", *Gatra*, 28 Oktober 1995, h. 24.

adalah menyiapkan sebuah deklarasi oposisi.¹²⁶ Ketua SMID Pusat, Andi Arif pada Agustus 1996, seperti dituturkan Ketua Bakorstanasda Lampung Kol. Inf. A. Sanusi telah ditangkap aparat keamanan di Yogyakarta.¹²⁷ Andi Arif termasuk korban penculikan terhadap para aktivis.

Pada akhir 90-an (1998) gerakan mahasiswa meningkat tidak hanya karena krisis ekonomi tak kunjung berakhir, tetapi juga adanya keinginan kuat perlunya perubahan politik termasuk suksesi kepemimpinan nasional. Disamping itu, pada tahun sebelumnya (1997) memang banyak terjadi kerusuhan, baik yang terkait dengan pesta pemilu (Kerusuhan di Banjarmasin), perlawanan terhadap pemerintah (Tanah Abang) maupun yang bebau SARA (Kerusuhan Rengasdengklok). Oleh karena itu, pihak militer tampak telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Misalnya, adanya pengerahan aparat keamanan untuk mengamankan SU MPR 1998 (1 Maret – 11 Maret), yang berjumlah sekitar 25 ribu personil ABRI atau 2 kali lipat dari SU MPR 1993. Dan SU MPR 1998 memang berjalan tertib, karena Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, selaku Panglima Komando Operasi Pengamanan SU MPR, tak hanya mempersiapkan pasukannya, tapi ia juga melarang segala bentuk unjuk rasa di jalan.¹²⁸

Ketika SU berlangsung (5 Maret) 20 mahasiswa UI mendatangi Fraksi ABRI di MPR. Ketika itu, Kassospol ABRI Letjen TNI Yunus Yosfiah, menyatakan diterimanya saudara-saudara oleh Fraksi ABRI dalam situasi SU MPR ini

¹²⁶ "Di Sini Anak....", h. 24 -25.

¹²⁷ "Dita Akui Dua Kali ke Australia", *Republika*, 1 Agustus 1996, h. 20.

merupakan langkah maju. Kalau dulu belum tentu saudara-saudara di terima di ruangan ini.¹²⁹ Namun pada hari yang sama setelah demo berlangsung di Kampus UI Depok dan Salemba, dua satuan setingkat kompi (SSK) Komando Operasi Jaya diterjunkan disekitar dua lokasi. Menurut Kasdam Jaya, Brigjen Sudi Silalahi, penerjunan pasukan itu merupakan latihan untuk memelihara ketrampilan prajurit. Sedangkan Pangab Jenderal Wiranto menyatakan "Pokoknya, sepanjang dilakukan secara santun, apalagi di dalam kampus, maka aksi itu silakan saja".¹³⁰

Pasca SU MPR, kalangan militer memberikan reaksi dan tanggapan yang beraneka ragam terhadap aksi yang dilakukan aktivis mahasiswa secara umum. Ketika dialog yang dilakukan di PRI (18 April 1998), Mendagri Jenderal TNI R. Hartono, masih mempermasalahkan penggunaan istilah reformasi. Hartono menyatakan :

Saya ingin menanggapi masalah reformasi. Mari kita perjelas dulu kata reformasi. Saya membacanya dari kamus Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan yang radikal. Kalau menggunakan kata radikal dan mendasar maka akan sampai pada hal-hal yang prinsip. Kalau kita mengerti apa arti kata reformasi, tentu kita akan berhati-hati menggunakan kata ini. Karena itu dalam arti ini berarti perubahan yang prinsip bisa juga menyentuh hal-hal yang menjadi pegangan kita. Tetapi kalau yang dimaksud perbaikan dan penyempurnaan, mari kita gunakan kata ini sehingga kita tidak terjebak pada sifat yang emosional.¹³¹

Pernyataan Hartono tersebut, tampaknya mengundang pertanyaan dan komentar Deden Suparjo, SMPT Unair. Ia menyatakan, saya tidak habis pikir ketika

¹²⁸ *Forum Keadilan*, No. 25, Th.VI, 23 Maret 1998, h. 10.

¹²⁹ "Demo Marak Kampus Bergerak", *Forum Keadilan*, No.25, Th.VI, 23 Maret 1998, h. 20.

¹³⁰ "Demo Marak....", h.20.

¹³¹ Lihat, "Mulailah dengan Mengaku Dosa-dosa Politik", *Tajuk*, No.5, Th.I, 30 April 1998, h. 3.

ada yang menyatakan bahwa reformasi tidak perlu dilaksanakan. Memang dalam reformasi ada bagian yang radikal, tapi itu dilakukan oleh pemerintah. Sementara kalau revolusi arahnya dari rakyat. Kami mahasiswa memandang bahwa saat ini perubahan harus dilakukan oleh pemerintah. Menanggapi pernyataan ini, Menhankam /Pangab Jenderal TNI Wiranto, sebenarnya ABRI dan pemerintah tidak menolak adanya reformasi, tapi reformasi yang bagaimana dulu. Di sini yang perlu penyamaan persepsi. Kalau reformasi itu dilakukan secara radikal, jelas itu tidak konstitusional. Itu memang kita tidak sependapat. Tetapi kalau reformasi itu secara gradual dan konstitusional itu kita sangat sependapat. Bahkan ABRI berani memeloporinya, Karena itu memang suatu keharusan.¹³²

Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, melihat penggunaan istilah reformasi masih menimbulkan polemik. Ia lebih senang menggunakan kata pembaharuan ekonomi dan politik. Keduanya harus dilihat secara utuh, dan jangan kita lihat masalah ini dengan nuansa emosional. Mari kita dekati persoalan dengan pandangan yang rasional, proporsional dan kontekstual.¹³³ Sedangkan menurut Jenderal (Purn.) Soemitro, tuntutan reformasi sebaiknya ekonomi dulu, baru politik agar kita semua lepas dari penderitaan krisis moneter, setelah itu, baru kita tawur.¹³⁴

Sikap ragu-ragu tentang keberhasilan reformasi dinyatakan Letjen TNI

¹³² Lihat, "Mulailah dengan.....", h. 6-7.

¹³³ "Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono : Perwira Intelektual di Medan Sospol", *Tajak*, No.5, Th.I, 30 April 1998, h. 37.

¹³⁴ "Pak Mitro dan Pemikiran Politikny", *Kompas*, 12 Mei 1998, h. 1.

Syarwan Hamid, Wakil Ketua MPR/DPR, ketika menerima delegasi mahasiswa Universitas Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan (15 Mei 1998). Syarwan menyatakan tidak menjanjikan keberhasilan reformasi, Sebab perjuangan untuk mewujudkan reformasi tidak mudah. Perjuangan ini masih panjang, penuh onak dan duri. Bukan jalan tol yang rata dan mulus. Lebih lanjut Syarwan, menyatakan langkah untuk melakukan perubahan dapat dimulai dari mana saja. Pusat-pusat perubahan bukan hanya pada suprastruktur, tapi juga oleh intelektual, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Perubahan bisa dimulai dari Pemilu.¹³⁵

Terhadap pemikiran yang muncul dalam berbagai unjuk rasa, Mendagri Jenderal TNI R. Hartono, menyatakan pertama, meminta masyarakat untuk tidak mengutik - ngutik kepemimpinan nasional sebagaimana telah ditetapkan SU MPR, yaitu mengangkat Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden masa bakti 1998 - 2003. Kedua, ada pihak tertentu memanfaatkan krisis moneter untuk kepentingan kelompok dengan mendeskreditkan pemerintah, karena dianggap kurang tanggap dan bersungguh - sungguh menangani hal tersebut. Ketiga, mereka mengangkat kelemahan dan kondisi rawan sebagai isu sentral serta menuntut secara radikal reformasi di bidang ekonomi - politik.¹³⁶ Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafri Sjamsuddin, menanggapi dari cara kerja aksi. Sjafri menyatakan, kita temukan semacam jaringan yang menyebutkan dirinya sebagai jaringan Aksi Perlawanan

¹³⁵ "Syarwan Hamid : Kalau Perlu Mundur Jika Reformasi Gagal", *Kompas*, 16 Mei 1998, h.3.

¹³⁶ "Jangan Utik - Utik Kepemimpinan Nasional", *Harian Umum Media Indonesia*, 18 April 1998, h. 16.

Oposisi Indonesia. Dari namanya, bentuk organisasinya dan caranya, jelas jaringan itu menghendaki cara kekerasan yang ingin memanfaatkan aktivitas mahasiswa tertentu sebagai obyek.¹³⁷ Lain halnya dengan Jenderal Besar A.H. Nasution, yang melihat tuntutan reformasi merupakan hak dan kewajiban dari mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu, menurut Pak Nas mereka itu jangan dihalangi.¹³⁸

Meskipun terhadap upaya untuk mengutik –mengutik kepemimpinan nasional, merupakan sesuatu yang tidak disukai seperti dikemukakan Jenderal R.Hartono di atas, namun aktivis mahasiswa tampak menuntut suksesi kepemimpinan nasional. Misalnya, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Wacana UI, mengajukan empat gugatan rakyat. Pertama, menuntut MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa, guna mengatasi krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir. Kedua, menuntut aliansi ABRI dan Rakyat. Ketiga, penurunan harga sehingga terjangkau rakyat. Keempat, pengembalian harta kekayaan kepada rakyat. Begitu pula Fampera (Forum Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat) Yogyakarta, juga menuntut segera diselenggarakan sidang istimewa MPR. Selain itu, menolak dialog yang diupayakan pemerintah, menuntut reformasi total, dan menolak seluruh hasil Sidang Umum MPR 1998.¹³⁹

Terhadap tuntutan Sidang Istimewa MPR Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan seluruh komponen bangsa hendaknya

¹³⁷ "Pangdam Jaya : Jaringan Oposisi Berusaha Masuk Kampus Para Rektor Diminta Waspada", *Media Indonesia*, 18 April 1998, h. 16, lihat juga, *Tyzak*, No.5, Th.I, 20 April 1998, h. 14.

¹³⁸ "A.H. Nasution : Tuntutan Reformasi Tak Bolch Dilarang", *Harian Bisnis Indonesia*, 18 April 1998, h. 12.

¹³⁹ "Mahasiswa Tuntut Sidang Istimewa", *Harian Suara Merdeka*, 24 April 1998, h. 1.

memikirkan secara matang adakah fakta, logika, dan kesepakatan bangsa secara menyeluruh bahwa sidang istimewa MPR harus dilaksanakan segera.¹⁴⁰

Dalam hal sikap ABRI terhadap tuntutan aliansi, dapat disimak pada pernyataan Pangab Jenderal TNI Wiranto, dalam makalah yang dibacakan Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono ketika acara dialog TMI (25 April 1998). Wiranto menyatakan bahwa ABRI akan mendukung pembaharuan, sepanjang pembaharuan ini demi kepentingan bangsa. Sebaliknya, ABRI akan turut mempertahankan keamanan dan kesinambungan, sepanjang hal itu masih diperlukan oleh kita semua.¹⁴¹ Sikap ABRI yang tidak jelas mengenai aliansi, dalam hal ini dapat dipahami dari pendapat Afan dan Crouch. Afan Gafar tidak melihat kemungkinan terjadinya aliansi ABRI – mahasiswa-massa akibat trauma yang timbul di kalangan mahasiswa karena pecahnya bentrokan di kampus-kampus selama ini. Sementara itu, sikap pimpinan ABRI saat ini, adalah mengantarkan Presiden Soeharto sampai ke akhir masa jabatannya.¹⁴² Crouch, juga melihat hal yang sama. Menurut Crouch, ABRI akan selalu loyal kepada pemerintah. Mereka mengagumi Presiden Soeharto, menghormati dan merasa, ia amat berjasa bagi Indonesia.¹⁴³

Dialog tampaknya tidak efektif, karena pada perkembangan berikutnya justru terjadi Tragedi Trisakti (12 Mei 1998). Mahasiswa yang berkeinginan mengadakan “*long march*” ke gedung DPR/MPR, dihadang aparat keamanan. Setelah

¹⁴⁰ “Kassospol ABRI Soal Sidang Istimewa MPR Harus Dipertimbangkan Secara Matang”, *Harian Umum Kompas*, 8 Mei 1998, h. 1.

¹⁴¹ “Akhir Demo Di Tangan ABRI”, *Tajuk*, No.5, Th.1, 30 April 1998, h. 14.

¹⁴² “Akhir Demo”, h. 15.

¹⁴³ “Pandangan Amerika tentang ABRI”, *Kompas*, 17 Mei 1998, h.3.

terjadi negoisasi akhirnya disepakati akan sama-sama mundur. Tapi tiba-tiba terjadi penembakan oleh aparat yang menewaskan 4 mahasiswa.¹⁴⁴ Ketika Raker dengan Komisi I DPR, Pangab Jenderal Wiranto tentang kasus aksi mahasiswa Trisakti menyatakan, peluru yang menyebabkan kematian mahasiswa itu adalah peluru tajam, bukan peluru karet. Itu berarti ada kesalahan prosedur. ABRI sudah mengetahui seluruh posisi pasukan pada saat aksi demo berlangsung dan hasil dari penyelidikan intensif bisa segera diumumkan.¹⁴⁵

Aksi mahasiswa turun kejalan dalam upaya melengserkan Presiden Soeharto, yang secara khusus mendapat kecaman yang tajam dari pihak militer adalah Forkot. Pangab Jenderal TNI Wiranto, menilai gerakan Forkot (Forum Kota) pola-polanya mempunyai kesamaan dengan pola-pola yang dilakukan oleh kaum komunis.¹⁴⁶

Berbagai aksi mahasiswa yang menuntut dilakukan reformasi, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mengelompokkan ada tiga sikap dan pandangan di kalangan kampus. Pertama, sebagian ada yang logis dan tepat, sehingga bisa diterima. Kedua, sebagian lagi agak logis tapi masalahnya terlalu kompleks dan tidak sederhana sehingga perlu didialogkan lebih lanjut untuk menyikapinya. Ketiga, ada juga yang terlalu didramatisir, digeneralisasi, bahkan kadang-kadang dimanipulasi, sehingga harus diluruskan. Masih menurut Yudhoyono, ada kelompok

¹⁴⁴ Lihat, Saurip, *TNI AD*....., h.29-31.

¹⁴⁵ "Pandangan Amerika.....", h.3.

¹⁴⁶ "Langkah Wiranto", *Ummat*, No.18, Th, IV, 9 November 1998/19 Rajab 1419 H, h.18.

Yang mengatakan reformasi harus dibawa pimpinan nasional harus turun dan kabinet harus diresuffle. Yang pertama, ABRI tidak sependapat, karena jika ditolerir ide untuk menurunkan pimpinan nasional, menurut ABRI itu inskonstitusional. Kemudian dalam menghadapi gerakan mahasiswa, Yudhoyono lebih lanjut menyatakan, meskipun tetap persuasif, dialogis, dan terus bernegosiasi dengan para rektor dan pembantu rektor, ABRI tidak akan mentolerir kalau gerakan mahasiswa keluar kampus atau turun kejalan – jalan. Sebab kalau itu terjadi, hampir pasti akan menimbulkan kerusuhan yang sulit dikendalikan.¹⁴⁷

Respon terhadap LSM Prodemokrasi dan HAM

Diantara LSM yang berperan dalam proses politik “arus bawah” adalah Yayasan Pijar (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi) pada 1993 yang lalu telah muncul dan dipandang sebagai “pusat pergerakan”. LSM ini berdiri pada 3 September 1989, oleh 20 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Bandung, Yogyakarta dan Jakarta. LSM ini masuk dalam kategori model advokasi, yang terutama bergerak dalam dataran politis, yang membedakannya dengan model pengembangan masyarakat yang bergerak dalam upaya penguatan keswadayaan masyarakat. Nuku Sulaiman, Ketua Pengurus Yayasan Pijar pada 24 Nopember 1993, tertangkap di halaman Gedung DPR tatkala mengedarkan stiker yang dinilai “menghina Kepala Negara”. Nuku menjadi tokoh LSM yang bersama sejumlah

¹⁴⁷ Lihat, Wawancara Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal TNI S. Bambang Yudhoyono, “Kami Tidak Ingin Berperan Overdosis”, *Forum Keadilan*, Edisi Khusus “Ulang Tahun” 1998, h. 74-

tokoh mahasiswa harus berhadapan dengan pengadilan karena urusan politik. Nuku Solernan sendiri menyatakan, yang kami lakukan sebenarnya membawa agar persoalan politik di negara ini menjadi sehat. Pada Peristiwa Periook misalnya, tidak pernah ada tim *pact finding* yang ditugasi menyelidiki berapa jumlah korban dan sebagainya. Saya pikir disitu persoalannya. Persoalan politik sebenarnya tidak bisa dipidanakan kecuali penyampaian aspirasi itu dengan cara kekerasan atau membunuh orang. Sedangkan yang ini kan cuma membawa stiker.¹⁴⁸ Yang dilakukan Nuku, membuat plesetan SDSB = Suharto Dalang Segala Bencana, PN Jakarta Pusat memvonis 4 tahun penjara, dan Nuku menyatakan banding. Kemudian pada pemerintahan B.J. Habibie, Nuku mendapatkan amnesti pada 28 Mei 1998. Pada tahun yang sama (Februari 1993) Letjen Harsudiono Hartas, memperingatkan bahwa ancaman yang sangat tinggi terhadap disintegrasi nasional dari orang-orang yang dalam perjuangannya menggunakan alasan untuk kepentingan lingkungan, kebebasan, demokrasi atau hak asasi manusia.¹⁴⁹

Pada 2 Oktober 1995, Letjen TNI Soejono Kasum ABRI yang juga sebagai Kepala Sekretaris Bakorstanas (Badan Koordinasi Pemulihan Stabilitas Nasional), mengumumkan bahwa menurut analisis Bakorstanas, perlu mewaspadaai bangkitnya PKI. Indikasinya, adanya agitprop (agitasi dan propaganda) melalui pers, selebaran,

75.

¹⁴⁸ Lihat, Adi Sasono, "LSM dan Politik Arus Bawah", dalam Syarifin Arba MF, Editor, *Damitologisasi Politik Indonesia*, (Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 1998), h. 296-297.

¹⁴⁹ Ramage, *Democracy*....., h. 148.

bahkan di internet. Sekarang ini mereka melakukan perang informasi.¹⁵⁰ Imbauan Bakorstanas itu dilengkapi “buku kuning” yang berisi 18 metode agitprop. ABRI mencermati kemunculan kembali PKI melalui pemakaian agitprop dalam sosialisasi isu prodemokrasi, atau memakai isu kesenjangan, hak asasi, atau tema demokrasi lainnya. Selebaran yang bisa memicu kerusuhan sosial. Penerbitan memoar beberapa orang yang terkait PKI, untuk menghapus jejak dan mengaburkan sejarah, misalnya buku Oei Tjoe Tat dan Hario Kecik. Demikian pula polemik tentang penghargaan Magsaysay atas sastrawan dan tokoh Lekra Pramoedya Ananta Toer.¹⁵¹

Kecurigaan Bakorstanas tersebut, secara tidak langsung juga ditujukan kepada LSM. Karena ada beberapa LSM yang sangat vokal terhadap pemerintah, terutama YLBHI yang dikomandani Adnan Buyung Nasution. Sejak Abang pulang dari Belanda, orientasi YLBHI (LBH) pun berubah sebagai “lokomotif demokrasi”. Dengan perubahan ini, LBH tidak lagi ikut membantu rakyat kecil dalam persoalan perceraian atau gugatan perdata, yang ditangani hanyalah kasus-kasus bernuansa politik. Sebagai patron lokomotif demokrasi merupakan pemikiran yang secara fisik harus menjadi kekuatan bersama, berupa aliansi nasional dari kekuatan prodemokrasi, mahasiswa, cendekiawan, buruh, LSM, dan lain-lain. Selain itu, LBH

¹⁵⁰ “Kebangkitan PKI antara Agitasi dan Selebaran”, *Forum Keadilan*, No. 14, Th. IV, 23 Oktober 1995, h. 12.

¹⁵¹ Memoar Oei Tjoe Tat yang terbit pada April 1995, tepat ulang tahun perkawinannya, dilarang Kejaksaan Agung pertengahan September 1995, karena dinilai menggelapkan sejumlah fakta. Misalnya Oei terkesan menampilkan diri sebagai nasionalis tulus, padahal ia mempropagandakan komunisme. Memoar itu juga berkisah seakan Orde Baru sebagai kup terhadap Bung Karno. Gugatan terhadap memoar Suhario Padmodiwirjo alias Hario Kecik, yang telah diterbitkan Yayasan Obor, Juli 1995, dilakukan oleh Legiun Veteran Kalimantan Selatan. Buku itu mengungkap misalnya, dukungan mantan Pangdam Mulawarman terhadap PKI serta pengungkapan tokoh anti-PKI, seperti Sultan Kutai dan keluarga Sultan Bulungan. Lihat, “Kebangkitan PKI....”, h. 12 & 15

juga aktif menyuarakan pelbagai bentuk tindakan pemerintah yang dianggap merusak atau tak mengindahkan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kasus yang diterima LBH bukan asal kasus, tetapi yang punya nilai strategis. Artinya mempunyai *entry point* untuk membangkitkan kesadaran rakyat.¹⁵² Pola sebagai lokomotif demokrasi dengan aliansi cendekiawan dengan buruh tampaknya dicurigai sebagai pola gerakan PKI. Banyak kasus yang ditangani LBH langsung/tidak langsung berhadapan dengan aparat militer. Diantaranya, melalui LBH Ujung Pandang, Adnan Buyung Nasution, bersama Harjono Tjitrosoebono dan Nasiruddin Pasigai (Direktur LBH Ujungpandang) dan pengacara lain menjadi tim pengacara Akbar Endra aktivis AMPD (Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi) di Ujungpandang. Tim pengacara Akbar hendak memperadilan Kodam VII/Wirabuana ke Pengadilan Negeri Ujungpandang. Alasannya, Akbar ditahan dan diinterogasi selama tiga hari tiga malam, tanpa status yang jelas. Haknya sebagai manusia diinjak-injak.¹⁵³

Pada kasus Timika (10-12 Maret 1996), LSM menjadi sorotan pihak militer terutama WALHI dan YLBHL. Kasus Timika dipicu oleh adanya berita bahwa salah seorang warga setempat ditabrak oleh kendaraan Freefort dan dua orang warga setempat ditangkap oleh *security*, sehingga menimbulkan amarah warga setempat. Lalu kerusuhan pun pecah. Yang terjadi adalah warga berhadapan dengan pihak

¹⁵² Lihat, 'Menabur Tuduhan Memetik Kritik', *Forum Keadilan*, No.14, Th.IV, 23 Oktober 1995, h. 18.

¹⁵³ "Soal Partai Baru atau Mimbar Bebas FDI?", *Tempo Interaktif*, Edisi, 34/1, 19 Oktober 1996, Vol. II Agustus 1996 - Februari 1997, h. 211.

Freeport yang dibantu oleh aparat keamanan setempat. Kerusuhan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di pihak warga masyarakat.¹⁵⁴

Menurut Koordinator Program Khusus WALHI Emmy Hafid, yang dilakukan WALHI menyalurkan frustrasi masyarakat, misalnya dengan membantu temuan Uskup kepada Komnas HAM, sehingga Komnas HAM datang. Kasus Timika, sebenarnya bertitik tolak dari kehadiran Freeport yang oleh suku Amungme dirasakan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu untuk mengatasinya, mereka mau berunding dengan Freeport dengan ada pendamping dan mediator. Untuk kasus Amungme ini, WALHI pernah berkirim surat ke Pangab bulan Februari 1995 ketika mendapat laporan adanya pembakaran kampung Tsinga. Surat permohonan terakhir ditayangkan beberapa hari yang lalu, tapi juga belum terealisasi. Kemudian terhadap kasus Timika, Kasum ABRI Letjen Soejono, menuduh keterlibatan LSM sebagai pemicu kerusuhan.¹⁵⁵ Tentang LSM mana yang terlibat Soejono tidak menegaskan. Tetapi yang jelas paling tidak tercatat lima LSM yang menyuarakan nasib warga Amungme. Yakni WALHI, Infid, YLBHI, Elsam (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat).¹⁵⁶

Terhadap tuduhan Kasum ABRI tersebut, Ketua Pengurus Harian YLBHI Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa, "kita perlu mengusut latar belakang peristiwa itu dari sudut sosial - ekonomi. Masyarakat setempat merasa tersingkir dari

¹⁵⁴ Saurip, *TNIAD*....., h.26.

¹⁵⁵ Wawancara Emmy Hafid, "Kami Sudah Biasa Dituduh", *Gatra*, 23 Maret 1996, h. 30.

¹⁵⁶ "Handy Talkie dalam Kerusuhan", *Gatra*, 23 Maret 1996, h. 27.

proses industri yang berlangsung amat cepat. Mereka tertinggal jauh di belakang, sehingga mudah bereaksi karena pemicu yang sederhana". Hal ini dibenarkan oleh Tom Beanal, Ketua Lemasa Amungme, "bahwa kerusuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan LSM atau OPM. Ini murni keributan antara orang Irian dengan Freefort."¹⁵⁷

Namun pada kasus lain di Irian Jaya, Pangab Jenderal Feisal Tanjung menyebut WALHI sebagai pihak yang terlibat dalam penculikan 13 karyawan Djeyanti Grup di Mimika, Irian Jaya.¹⁵⁸

Kalangan LSM kembali dicurigai. Pada 31 Oktober 1996, Menkopolkam Soesilo Soedarma, mengumumkan ada 32 LSM "bermasalah". Alasannya, pertama tidak mencantumkan asas Pancasila. Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan keberadaan mereka. Mendagri Yogie S. Memet, meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk menertibkan LSM dan Ormas yang dianggap bermasalah itu. Tuduhan itu, merupakan keempat kalinya sepanjang tahun 1996. Sebelumnya LSM yang dituduh bermasalah, adalah konsorsium pembaruan agraria, aliansi LSM yang menghendaki perubahan UU Agraria yang melibatkan 60 LSM pada pertengahan September 1996. Kemudian tuduhan terhadap 30 LSM ketika tergabung dengan MARI (Majlis Rakyat Indonesia), gabungan LSM pendukung Megawati, pada bulan Juni 1996. Selanjutnya, 13 LSM yang kemudian diikuti tuduhan berada di belakang

¹⁵⁷ Lihat, "Handy Talkie.....", h. 28.

¹⁵⁸ "Ketika Musim Tuduhan Tiba", *Tempo Interaktif*, Edisi 28/1, 7 September 1996, Vol. II, September 1996 s/d Februari 1997, h. 42.

penculikan tim peneliti Unas, yang kemudian diikuti kerusuhan di Irian Jaya, pada April 1996.¹⁵⁹ Ketua Dewan Pengurus YLBHI, Bambang Widjojanto menduga tuduhan itu karena situasi politiknya tinggi menjelang Pemilu. Sehingga semua orang yang berpikiran kritis perlu dikendalikan. Selain itu, menunjukkan adanya ketakutan berlebihan dari pemerintah. Dan ini lazim dilakukan oleh pemerintah untuk menghalau kegiatan LSM.¹⁶⁰

Kemudian setelah insiden 27 Juli, pemerintah melakukan penyelidikan, pengejaran, pengledahan dan penangkapan terhadap berbagai pihak yang dianggap terlibat dalam insiden itu, yang merambah ke wilayah kerja LSM – LSM yang aktif dalam kegiatan sosial, HAM, bahkan lingkungan. Mereka dituduh dan dicurigai sebagai kelompok “kiri” atau “kekiri-kirian”, yang bertentangan dengan pemerintah. Misalnya, Kantor PIPHAM (Pusat Informasi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia) pada 2 Agustus 1996 dikepung tiga regu polisi, dan melakukan bongkar – membongkar dan mengambil sejumlah dokumen dan menangkap dua orang yang sedang berada di tempat kejadian. Polisi juga menanyakan seseorang yang diduga terlibat dalam Insiden 27 Juli.¹⁶¹ Karena perlakuan aparat yang dinilai bertentangan dengan etika politik yang berasaskan “adil dan beradab”, maka para wakil sejumlah LSM datang melapor ke Komnas HAM (16 September 1996). Dalam pernyataan pers yang ditandatangani 24 LSM, disebutkan bahwa mereka menjadi perhatian dan

¹⁵⁹ Lihat, Wawancara Bambang Widjojanto, “LSM Dituduh Bermasalah? Ah... Itu Sudah Biasa”, *Tempo Interaktif*, Edisi 37/I, 09 Nopember 1996, Vol.II, September 1996 – Februari 1997, h. 264.

¹⁶⁰ Wawancara Bambang Widjojanto, “LSM Dituduh.....”, h. 265.

¹⁶¹ “Ketika Musim.....”, h. 41 –42.

obyek perlakuan aktor-aktor penyelenggara kekuasaan. Maria Pakpahan, dari INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*), yang menjadi juru bicara pengaduan ke Komnas HAM menjelaskan bahwa perlakuan itu bisa dalam bentuk penggrebagan kantor, penahanan dan interogasi yang tidak syah, penyiksaan fisik dan mental”¹⁶².

Kemudian bersamaan terjadinya, insiden Trisdakti (12 Mei 1998), dikantor YLBHI, Desmond J. Mahesa, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Cabang Jakarta, menuturkan pengalamannya selama “hilang” di depan pers, praktisi hukum, termasuk sesama YLBHI Adnan Buyung Nasution, T. Mulya Lubis, dan Haryono Tjitraoebano, anggota Komnas HAM Albert Hasibuan, dan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir. Desmon antara lain menceritakan, ia diculik sejak 3 Februari 1998, dalam kondisi diborgol dan ditutup matanya diinterogasi, kemudian dimasukkan dalam “bilik” selama 2 bulan, sambil terpaksa mendengarkan siaran radio yang distel keras-keras. Ia sempat bercakap – cakap dengan aktivis lain. Sebelum dilepas seperti Pius, Desmond, disuruh berjanji tidak menceritakan pengalamannya itu sebelum 1 Mei 1998.¹⁶³

Militer merasa tersudutkan oleh kasus penculikan aktivis tersebut. Karena

¹⁶² “Ketika Musim...”, h. 41.

¹⁶³ Aktivis lain, yakni: Haryanto Taslam, Rahardja Waluyo Djati, Yani Afri, Sonny, Herman Hendrawan, dan Paisol Reza. Menurut Kontras dari sekitar 14 aktivis yang lenyap, yang belum kembali bukan cuma Hendrawan dan Djati, tapi juga Bimo Petrus, Suyat, Yani Afri, Sonny, Noval, dan seorang aktivis PMII cabang Garut, yang oleh orang tuanya tak boleh disebutkan namanya, lihat, “Perlu Komisi, Bukan Tim Kecil”, *Forum Keadilan*, No.4, Th. VII, 1 Juni 1998, h. 23.

itu kemudian membentuk tim kecil yang terdiri dari Komandan Polisi Militer dan dua Asisten Kepala Staf Umum ABRI : Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Bidang Intelijen. Dalam hal ini Pangab Jenderal Wiranto, menyampaikan pernyataan yang tegas, bahwa tak ada kebijakan ABRI untuk menghilangkan orang karena resikonya yang luar biasa berat.¹⁶⁴ Kasum ABRI Letjen TNI Fachrul Rozi, menyatakan memang informasi yang berkembang seakan-akan mereka diculik oknum atau satuan ABRI Tapi kemungkinan ini sangat kecil sogaobok itu ABRI melakukan penculikan dalam situasi seperti ini?¹⁶⁵ Hal senada dikemukakan Robik Mukav, Mantan Kepala Dinas Penerangan AD, bahwa salah satu teknik intelijen dasar adalah tahanan tidak boleh dikumpulkan di satu tempat. Karena itu dalam mengorek informasi dari tahanan, adalah hal yang sangat mustahil bila tahanan yang satu dan yang lainnya dipertemukan dan dikumpulkan di satu tempat.¹⁶⁶ Namun kemudian keterlibatan militer dalam penculikan aktivis dapat terungkap setelah dibentuknya DKM dan pengadilan anggota Kopassus yang diduga terlibat.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Lihat, Robik Mukav, "ABRI dan Orang Hilang", *Forum Keadilan*, No.4, Th. VII, 1 Juni 1998, h.25.

¹⁶⁵ "Perlu Komisi....", h.23.

¹⁶⁶ Lihat, Robik Mukav, "ABRI dan....", h.25.

¹⁶⁷ Salah satu korban DKM adalah Letjen TNI Subianto, yang kemudian dipecat dan 11 anggota Kopassus divonis 12-22 bulan dan beberapa dipecat, lihat, "Mahkamah Militer Belum Mampu Tangkap Rasa Keadilan Rakyat", *Kompas*, 24 Nopember 1999, juga lihat, M.Riefqi Muna, "Persepsi Militer dan sipil tentang Dwifungsi : Mengukur Dua Kategori Ganda", dalam Rizal Sukma dan J.Krictadi (Penyunting), *Hubungan Sipil - Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer*, (Jakarta : CSIS, 1999), h. 37.

Respon terhadap Perpolitikan Kelas Bawah

Perpolitikan kelas bawah merupakan kegiatan politik yang dilakukan kelompok buruh dan petani, sebagai bentuk perlawanan terhadap arus atas (penguasa) maupun sebagai upaya memperjuangkan hak-haknya. Pada awal perjuangan mereka banyak ditopang oleh kelompok LSM dan mahasiswa. Namun dalam perkembangannya kemudian mereka berjuang melalui organisasi-organisasi mereka sendiri.

Beberapa kasus gerakan politik kelas bawah dari kaum buruh antara lain, kasus Marsinah yang telah menjadi simbol bagi gerakan buruh Indonesia, kasus pendirian SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), kasus demonstrasi buruh Medan, dan pendirian PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Dari kaum petani, misalnya kasus Nipah dan kasus Jenggawah.

Gerakan Kaum Buruh

Pada masa rezim Orde Baru, organisasi buruh dimonopoli SPSP yang didukung oleh pemerintah. Upaya pertama untuk membentuk organisasi buruh independen pada masa Orde Baru dilakukan pada Nopember 1990, ketika didirikannya serikat buruh bebas Setiakawan atas inisiatif kelompok aktivis hak asasi manusia dan Infight. Setiakawan dibawah pimpinan H.J.C. Princen, tidak pernah diakui oleh otoritas dan para aktivisnya diintimidasi. Karena adanya konflik internal dan tekanan dari pemerintah, serikat ini berhenti berfungsi. Sebagai penggantinya didirikan sebuah serikat buruh baru, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada April 1992. Pada Juli 1993, otoritas keamanan melarang

serikat ini mengadakan kongresnya yang pertama. Banyak anggota SBSI dikasari, dipecat dari pekerjaannya, atau bahkan ditangkap tanpa alasan. Pada Maret 1994, SBSI mengklaim memiliki 250.000 anggota dari seluruh Indonesia. Namun perlakuan kasar oleh otoritas telah melemahkan serikat ini. Sekitar 5000 anggota SBSI telah dipecat antara 1992 dan 1996.¹⁶⁸ Diantara berbagai kasus perburuhan yang menonjol adalah kasus Marsinah dan demontasi buruh di Medan dan aksi buruh di Surabaya.

Kasus Marsinah, 5 Mei 1993. Kasus ini merupakan peristiwa pembunuhan aktifis buruh Marsinah, yang diduga terjadi antara tanggal 5-9 Mei 1993. Pada 3-4 Mei 1993, buruh PT. CPS mengadakan unjuk rasa dan pemogokan. Aksi tersebut berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya.¹⁶⁹ Pada Mei 5 Mei 1993 Marsinah 'menghilang'. Dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini menghasilkan keterlibatan 6 anggota TNI-AD dari kesatuan Denintel Kodam, Kopassus, 20 Polri serta 1 orang Kejaksaan.¹⁷⁰ Namun perlakuan Kodim tidak

¹⁶⁸ Uhlin, *Oposisi*..., h. 121.

¹⁶⁹ Tuntutan pencabutan, dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan yang tidak akan melakukan PHK. Karena PHK itu dikenai oleh Kodim, seperti dinyatakan Direktur PT.CPS Judi Astono, ketika hendak berpisah sesuai pemberian uang pesangon, "Ini bukan kemauan saya. Saya sendiri terkejut mendengar kalian mengundurkan diri. Sebenarnya kami merasa berat hendak melepas kalian. Tapi bagaimana lagi. Ini kehendak Kodim. Saya juga takut". Mengetahui kawan-kawannya di kenai PHK oleh Kodim, Marsinah hendak mengadakan Kodim yang membuat surat pemanggilan itu ke pengadilan. Lihat, "Jam-jam Marsinah Menghilang: Represi dan Resistensi", *Prisma4*, April 1994, h.71-72.

¹⁷⁰ Saurip Kadi, *TNI-AD: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, (Jakarta:Graffiti, 2000), h. 24.

berhenti pada PHK 13 orang dan matinya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 orang buruh PT .CPS di PHK oleh Kodim di markas Kodim.¹⁷¹

Dalam kasus Marsinah keterlibatan BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang sekarang sudah berganti BIA (Badan Intelejen ABRI), diakui oleh Letjen TNI (Purn.) Ari Sudewo, mantan Wakil Kepala BAIS dan Letjen TNI (Purn.) Farid Zaenuddin, mantan Kasdam V Brawijaya, di depan komisi A DPRD Jawa Timur (16 Juni 2000). Ada tiga alasan yang mendorong BAIS terlibat. Pertama, kasus Marsinah merupakan kasus kriminal murni. Namun setelah lima bulan penyidikan berjalan, polisi masih belum berhasil mengungkapkan pelakunya. Sementara kasus ini telah menjadi isu nasional dan internasional, bahkan ada tekanan terhadap Indonesia dari komunitas internasional. Kedua, Presiden Soeharto akan menghadiri konferensi APEC di Seattle Amerika Serikat pada bulan Nopember 1993. Ada kemungkinan dalam forum tersebut, Presiden akan ditanya mengenai penyelesaian kasus tersebut. Ketiga, dugaan adanya keterlibatan militer dalam kasus tersebut sangat kuat terasa, sehingga ada kemungkinan polisi sebagai penyidik menemui hambatan struktural maupun kultural. BAIS terjun kesana untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini, agar penyidikan bisa berjalan lancar. Sementara itu, Letjen Farid Zainuddin, menyuntakan keterlibatannya dalam mengungkap kasus Marsinah dalam fungsinya sebagai Kasdam, bukan sebagai Satgas Intel BAIS. Zainuddin juga membantah ,

¹⁷¹ Menanggapi keluhan 8 buruh tersebut, pihak DPC SPSP, dari segi politik kelemahan kalian cuma satu yaitu tuntutan dibubarkannya SPSP. Meskipun telah dijelaskan oleh mereka bahwa yang dimaksud adalah pembubaran pengurusnya bukan lembaganya, tetapi DPC mengingatkan bahwa kalau kalian bicara dengan orang lain (tampaknya yang dimaksud Kodim) bisa dikira koranus. "Jam-jam Marsinah....", h. 72-73.

tuduhan mantan Pomdam V Brawijaya Kolonel CPM (Purn.) Nurhana, bahwa dirinya telah mengorbankan Danramil Porong Kapten Kusaeri demi meraih nama baik.¹⁷²

Kasus lain dari gerakan kaum buruh yang menonjol adalah demonstrasi buruh besar-besaran di Medan 14 April 1994. Demonstrasi buruh ini, menuntut kenaikan upah minimum regional dari Rp.3.100 menjadi Rp.7000,- per- hari. Juga menuntut pencabutan SK Menaker No.1 tahun 1994 karena dinilai menghambat kebebasan berserikat bagi buruh. Delegasi buruh diterima Inspektur Bakorstanda Sumatera Bagian Utara Kolonel Latmono yang menyatakan semua tuntutan ditampung. Penyelesaiannya akan segera dituntaskan. Namun janji itu tak membuat para buruh puas, maka terjadilah pengrusakan terutama toko-toko milik WNI keturunan Cina. Akibatnya tak kurang dari 150 toko dan rumah penduduk rusak, dan beberapa mobil dan sepeda motor yang diparkir di depan toko rusak. Hampir semuanya milik WNI keturunan Cina.¹⁷³

Demonstrasi ini mendapat reaksi dari Panglima Kodam I/Bukit Barisan/Ketua Bakorstanada Mayjen A.Pranowo, yang menilai aksi unjuk rasa itu sudah tidak proporsional karena mengarah ke masalah SARA. Kenapa yang diserang orang bermata sipit ? . Juga menilai aksi itu sudah ditunggangi kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan politik. Itu bisa dilihat dari pola demonstrasi yang

¹⁷² "Kasus Marsinah : BAKS Terlibat demi Citra Bangsa", *Kompas*, 17 Juni 2000, h. 25.

¹⁷³ *Forum Keadilan*, No.2, Tahun III Mei 1994, h.12, lihat juga, "Mahkamah Militer Belum Mampu Tangkap Rasa Keadilan Rakyat", *Kompas*, 24 November 1999, Kapten Kusaeri, dituntut 18 bulan, namun vonis yang dijatuhkan 9 bulan atas tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah pada tahun 1994.

terorganisasi. Reaksi itu, segera dilanjutkan pihak aparat keamanan dengan memeriksa tak kurang 80 pengunjung rasa yang diduga sebagai penggerak demonstrasi, 18 diantaranya akan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum dan perusakan. Termasuk dalam kelompok ini aktivis DPC SBSI Medan, Riswan Lubis (sekretaris DPC) dan Hayati (bendahara DPC).¹⁷⁴ Tentang isu SARA, Ketua SBSI Muchtar Pakpahan, menyatakan adanya indikasi orang-orang susupan dengan beredarnya selebaran gelap yang mengajak masyarakat mengganyang WNI keturunan Cina. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa SBSI bukan organisasi yang berorientasi rasialisme.¹⁷⁵

Tentang mengapa kerusuhan itu terjadi di Medan, Muchtar menyatakan "Medan itu wilayah istimewa. Saya sebut sebagai Sisilia di Indonesia. Preman, militer, dan pengusaha melakukan kolusi".¹⁷⁶ Dalam hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia Medan, Almaria Abas menyatakan bahwa 30 % dari biaya produksi digunakan untuk biaya siluman yang bersifat kolusif dan faktor itulah yang kemudian menekan kesejahteraan buruh.¹⁷⁷ Pungutan tidak hanya menimpa pengusaha, tetapi juga pada buruh, seperti dikemukakan Vedi R. Hadiz, bahwa buruh dalam Hubungan Industrial Pancasila masih harus menyeter pada SPSI sejumlah sebesar 30% dari gaji mereka. Dana-dana itulah, melalui sistem yang disebut sebagai

¹⁷⁴ *Forum Keadilan*, No.2, Tahun III,....., h. 13.

¹⁷⁵ *Forum Keadilan*, No.2, Tahun III,....., h. 14.

¹⁷⁶ Wawancara Muchtar Pakpahan, dalam *Forum Keadilan*, No.2, Tahun III,....., h.18.

¹⁷⁷ *Detik*, No.060 Th.XVII/4-10 Mei 1994 seperti dikutip Iswandi, *Business Militer Orde Baru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 99.

anemer, kemudian masuk ke tangan para penguasa militer.¹⁷⁸ Sedangkan Mayjen Pranowo, menilai bahwa seringnya terjadi kerusuhan di Medan, masyarakat Sumut itu dinamis, militan, keras. Itu merupakan lahan yang mudah untuk berkembang ke hal-hal itu.¹⁷⁹

Mayjen A. Pranowo juga menyatakan bahwa aksi kerusuhan Medan, didalangi oleh PKI. Ia menunjuk Muchtar Pakpahan sebagai anak Djohan Pakpahan tokoh BTI (Buruh Tani Indonesia, salah satu anak organisasi PKI), sebagai penggerak Peristiwa Bandar Betsy yang terjadi di Kampung Jawa, Simalungun. Dengan demikian Muchtar dinilai tidak bersih. Oleh karena itu menurutnya lebih bagus SBSI dilarang saja.¹⁸⁰ Tentang tuduhan PKI ini, Muchtar menyatakan tuduhan seperti itu bukan pertama kali. Ketika saya membela kasus HKBP Februari 1993, juga muncul tuduhan serupa. Tapi tak pernah ada tuduhan resmi dari pemerintah.¹⁸¹

Namun Muchtar dalam kaitannya dengan aksi buruh di Medan di hukum tiga tahun, tetapi dilepaskan setelah adanya kritisisme asing. Dia kemudian dibebaskan oleh Kejaksaan Agung, tetapi ditangkap kembali menyusul terjadinya kerusuhan sekaitan dengan serangan militer terhadap kantor pusat PDI di Jakarta pada Juli 1996.¹⁸²

¹⁷⁸ Irawandi, *Bisnis Militer*....., h.99. lihat juga, "Tak Lama, Usia Kepentingan Politik dalam Gerakan Buruh", Kompas, 24 Juni 2001, h. 25, Bomer Pearibu pernah menyatakan angka pungutan resmi dan tidak resmi kini mencapai tak kurang dari 40 persen karena harus menyisihkan anggaran untuk preman, militer, organisasi keagamaan, dan partai.

¹⁷⁹ Wawancara Mayjen A. Pranowo, dalam *Forum Keadilan*, No.2, Tahun III,....., h.20.

¹⁸⁰ Wawancara Mayjen A. Pranowo, dalam *Forum Keadilan*.....,h.20.

¹⁸¹ Wawancara Muchtar Pakpahan, dalam *Forum Keadilan*,.....,h.18.

¹⁸² Uhin, *Oposisi*.....,h.121.

Muchtar, baru dibebaskan setelah mendapat amnesti, pada 25 Mei 1998 ketika pemerintahan di bawah Presiden B.J. Habibie.

Kasus aksi buruh yang juga mendapat perhatian dari pihak militer adalah aksi buruh di Surabaya pada 8 Juli 1996. Aksi buruh tersebut melibatkan sebanyak 20.000 buruh pabrik melancarkan aksi selama dua hari penuh menghadapi represasi tentara.¹⁸³ Kahumas Bakorstanasda Jatim Letkol CHB S. Soebagio mengatakan kegiatan Diah Indah Sari (Ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), Moh Soleh (Ketua Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi Surabaya), dan Coen Husein Pontoh (Anggota Serikat Tani Nasional) dalam aksi buruh di Surabaya tidak lagi kriminal biasa, tapi sudah merupakan kejahatan politik. Para aktivis PRD ditahan polisi Surabaya dengan tuduhan menggerakkan aksi buruh pada 8 Juli 1996. Masih menurut Soebagio, pihaknya akan mengusut keterkaitan Dita dengan Partai Buruh Australia, karena diduga kegiatannya di danai partai ini. Dita sendiri menolak tuduhan ini.¹⁸⁴

Gerakan Kaum Tani.

Protes petani pada era Orde Baru berlangsung di tengah intensifnya pembangunan fisik. Pemerintah melalui berbagai proyek berbantuan luar negeri ataupun dibiayai APBN membutuhkan sejumlah tanah, begitu pula kapital asing atau kapital domestik dalam mereakumulasi modalnya (juga dalam label "pembangunan")

¹⁸³ Max Lane, "Politik Massa dan Perubahan Politik di Indonesia", dalam Arief Budiman, Hartley, Barbara, Kingsbury, Damien (Penyunting), *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Terj. Endi Haryono, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2000), h. 149.

¹⁸⁴ Lihat, "Dita Akui Dua Kali ke Australia", *Republika*, 1 Agustus 1996, h. 20.

juga membutuhkan sejumlah tanah. Petani sebagai "pemakai tradisional" tanah berada pada pihak harus "menyerahkan" tanah demi pembangunan dan re akumulasi kapital tersebut, dan ganti rugi adalah instrumen pokok alih pemakain.¹⁸⁵

Protes petani dalam kasus Nipah dan Jenggawah, menjadi pertanda adanya keberanian petani dalam memperjuangkan hak-haknya secara otonom tanpa terlebih dulu memanfaatkan jasa advokasi dari LSM, maupun menyalurkan tuntutananya melalui DPRD/DPR.

Kasus Nipah, terjadi bermula dari rencana pemerintah untuk membangun waduk Nipah di daerah Sampang, Madura ditolak oleh warga Sampang Madura. Insiden terjadi ketika pada 25 September 1993 petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang melakukan pengukuran diprotes oleh warga Sampang dengan melakukan aksi massa. Aparat keamanan menyikapinya dengan tembakan yang memakan 4 orang korban jiwa.¹⁸⁶

Sebanyak 20 Kiai Sampang pada 27 September, menandatangani pernyataan protes terbuka. Para kiai menyebut kasus nipah yang berdarah itu sebagai "Peristiwa *Black September*". Inti surat protes, pernyataan keprihatinan dan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas penembakan yang dilakukan oknum keamanan terhadap warga Kecamatan Banyuates, Sampang. Kami ulama Sampang minta agar pelaku

¹⁸⁵ Darmawan Salman, "Protes Petani dan Integrasi Pedesaan : Tinjauan Umum Era Orde Baru", *Prisma* 7, Juli 1996, h. 60.

¹⁸⁶ Sawip, *TNI-AD*,.....h. 25.

penembakan diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat terbuka, ditandatangani antara lain oleh K.H. Alawy Muhammad, K.H. Bushiri Nawawi. Surat itu ditembuskan pada beberapa instansi penting, mislanya Menko Polkam, Menhankam, dan Pangab Jenderal Feisal Tanjung. Pangdam V Brawijaya bersama pimpinan ABRI Jatim (29 September) mengunjungi rumah korban insiden Sampang, dan memberikan santunan terhadap keluarga korban, masing-masing Rp. 500.000. Tapi salah seorang keluarga korban menolaknya dengan alasan tak diperbolehkan oleh kiai panutannya. Menko Polkam menanggapi, dengan menyatakan Hari ini (30 September) Pangab telah memerintahkan Pangdam dan Kapolda Jatim meneliti dan menindak aparat yang dinilai bersalah.¹⁸⁷

Terhadap kasus Nipah kalangan purnawirawan, seperti yang ditunjukkan hasil survey Kusnanto Anggoro berpendapat, seharusnya farksi TNI (ABRI) di DPRD Jawa Timur mampu mengantisipasi secara dini kemungkinan gejolak dan keresahan politik. Seandainya pada kasus Nipah itu ABRI mampu menonjolkan kemampuan dwifungsi, baik fungsi militer maupun sospol, ABRI pada waktu itu akan mampu mencegah dan mengelola konflik secara persuasif. Tetapi yang terjadi instrumentalisasi militer hanya menjalankan keputusan birokrasi pemerintahan dan kepentingan tertentu.¹⁸⁸

¹⁸⁷ "Kronologi Black September", *Editor*, No.3/Thn.VII/14 Oktober 1993, h. 35.

¹⁸⁸ Kasus-kasus lain yang disebut dalam konteks ini, antara lain, Timika Berdarah, pembajakan pesawat Woyla di Bangkok, kasus Lampung, Tanjung Priok dan Timor Timur, lihat: Kusnanto Anggoro, "Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Transisi Demokratik", dalam Rizal Sukma, J. Kristiadi (Penyunting), *Hubungan Sipil - Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer*, (Jakarta: CSIS, 1999), h. 26.

Kasus Jenggawah. Kerusuhan Jenggawah terjadi pada 3 Januari 1996. Penyebabnya adalah keberadaan PTP XXVII yang tidak jelas. Sebagai protes rakyat membakar sebuah gudang tembakau milik PTP XXVII Jember di Dawhan, Lengkong, Umbul Sari. Rumah dinas administrator, delapan unit sepeda motor, toko koperasi, kantor arsip dibakar. Kantor BPN Jember diobrak-abrik, bahkan kepala kantornya dipukuli. Aparat keamanan tanpa bukti dan alasan yang jelas menangkap enam petani Jenggawah dan memaksa mereka untuk mengaku sebagai pelaku pembakaran tersebut.¹⁸⁹ Hotman Siahaan, melihat terjadinya "anarki" di pedesaan seperti yang dialami petani Jenggawah Jember, selain akibat dari runtuhnya keamanan ekonomi petani dan melemahnya dasar – dasar kehidupan masyarakat pedesaan yang memicu terjadinya radikalisme, juga di dorong pertumbuhan pasar dan kekuatan negara lewat perkebunan untuk mengekstraksi surplus dari petani – petani miskin. Tingginya derajat eksploitasi sedemikian itulah yang mendorong lapisan petani miskin untuk melakukan klaim atas tanah yang mereka anggap sebagai miliknya namun "dijarah" oleh Rezim Orde Baru.¹⁹⁰

Keadaan kemudian bisa ditenangkan dengan pencanangan status-quo oleh Pangdam dan keterlibatan beberapa ulama NU sebagai penengah. Pihak BPN menegaskan bahwa tanah itu, milik Departemen Pertanian (Deptan), oleh karena itu

¹⁸⁹ Saurip, *TNI-AD*....., h. 27, lihat juga, Darmawan, "Protes Petani.....", h. 59.

¹⁹⁰ Hotman Siahaan, "Anarki" sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan", Makalah pada Seminar : Anarki, Represi dan Demokrasi : Reformasi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Dies Fisipol UGM, Yogyakarta 19 September 1998, h. 9.

jika hendak diizinkan kepada para petani harus dibicarakan lebih dahulu dengan Deputi. Kemudian ketika anggota F-PDI-DPR RI yang ingin menemui petani, dicukupkan untuk berbicara dengan Pemda saja untuk menjaga kondisi yang sudah tercipta (*cooling down*). Tim meditasi (ulama) masih sulit mempertemukan pihak bertikai, terutama pihak PTP XXVII.¹⁹¹

¹⁹¹ Darmawan, "Protes Petani.....", h. 59-60.

BAB VI

RESPON MILITER TERHADAP GERAKAN PRODEMOKRASI: ANALISIS PERSPEKTIF KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI MILITER

Dalam Bab VI ini, akan dianalisis atau diinterpretasi mengenai kecenderungan pola-pola respon militer terhadap gerakan pro-demokrasi. Juga akan dijelaskan mengapa terjadi pola-pola respon seperti itu dari perspektif kepentingan politik dan ekonomi militer.

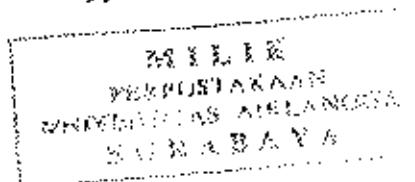
Untuk menganalisis pola-pola respon militer digunakan konsep respon dan bentuk respon sebagai berikut. Respon merupakan sikap, opini, proses interaksi terhadap peristiwa di luar dirinya, konsep ini sebagaimana dikemukakan Kacung Marijan (1991). Sedangkan kategori respon meliputi positif (akomodatif) dan negatif (represif/represi). Represi merupakan salah satu metode dalam operasi pendekatan keamanan. Operasi pendekatan keamanan dibedakan atas metode represi dan metode persuasi fisik. Dalam metode represi tindakan kekerasan fisik oleh alat keamanan sebagai senjata pamungkas. Sedangkan dalam metode persuasi fisik tidak lagi diarahkan untuk melumpuhkan "pengganggu keamanan" secara fisik, melainkan secara psikologis. Maka alat keamanan tidak lagi menggunakan senjata secara langsung, tapi peluru karet atau pentungan. Mereka tidak diperbolehkan lagi aktif menyerang, melainkan mendesak dan memojokkan atau membubarkan aksi massa. Konsep dan penggolongan represi ini dikemukakan Arbi Sanit (1997). Sedangkan bentuk represi bisa langsung (seperti penahanan yang dibuat-buat, intimidasi,

penculikan) maupun yang lebih *subtle* (seperti LITSUS, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada usaha memelihara atau bahkan memperbesar kekuasaan pemerintah), pendapat ini dikemukakan Daniel Sparringa (1998).

Pola respon militer juga akan dianalisis dari kelompok militer aktif dan purnawirawan, faksi merah putih dan faksi hijau atau menurut istilah Harold Crouch (1998) faksi santri dan nonsantri (kaum abangan). Faksi hijau/santri yang dekat dengan Islam Politik dan faksi merah putih/non santri yang nasionalis dan sekuler.

Kemudian untuk menjelaskan mengapa respon militer terhadap gerakan prodemokrasi bersifat negatif (represi), digunakan perspektif ekonomi - politik. Konsep dan perspektif ekonomi - politik yang digunakan sebagai berikut. Konsep ekonomi-politik yang digunakan sebagaimana yang dikemukakan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (1990), bahwa ekonomi-politik menerangkan apa tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan para aktor tertentu pada waktu mereka melakukan kegiatan politik.¹ Konsep ini menunjukkan di belakang kegiatan politik aktor tertentu ada motivasi ekonomi yang mendasari kegiatan itu. Juga digunakan konsep Robert Gilpin (1987) yang menyatakan studi ekonomi - politik *concern* terhadap *the economics of public - policy* tetapi secara hakiki dia mengajukan pertanyaan-

¹ Dorodjatun Kuntjoro Jakti, "Pendekatan Politik Ekonomi (*Political - Economy*) : Jembatan Di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 8, 1990, h. 6.



pertanyaan politis mengenai siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana prosesnya.²

Perspektif ekonomi – politik yang digunakan dalam hal ini untuk menjelaskan bahwa kepentingan politik dan ekonomi militer sebagai sesuatu yang tak terpisahkan satu sama lain dibalik respon negatif (represi) mereka terhadap gerakan prodemokrasi. Dalam hal ini masalah ekonomi akan didekati dengan perspektif politik. Untuk itu perspektif ekonomi-politik yang digunakan adalah perspektif politisisme. Perspektif ekonomi – politik politisisme yang digunakan sebagaimana dikemukakan Martin Staniland (1985) seperti yang dijelaskan Ramlan Surbakti (1992).³ Dalam pandangan perspektif politisisme, struktur politik memiliki dan mengembangkan kepentingan sendiri dan menggunakan kepentingan-kepentingan ini terhadap kegiatan ekonomi tertentu. “Rasionalitas” politik dapat mengatasi rasionalitas ekonomi”. Perspektif politisisme dikenal sebagai model deterministik, dimana menempatkan politik sebagai faktor penentu atau panglima. Mohtar Mas’oed, menjelaskan tipologi politik sebagai panglima (PSP) bercirikan sebagai aktor adalah negara (birokrat), mekanismenya berupa kekuasaan politik dan ideologinya statisme/konservatif.⁴ Kemudian beberapa jenis analisis yang masih dapat dikategorikan dalam perspektif politisisme juga akan digunakan. Diantaranya

² Robert Gilpin (1987), *The Political Economy of International Relations*, seperti dikutip Haryadi, “Ekonomi – Politik Pembangunan : Sebuah Regangan Teoritik”, *Jurnal Ilmu Politik* 8, 1990, h. 14.

³ Lihat juga, Martin Staniland (1985), *What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*, seperti dikutip Haryadi, “Ekonomi – Politik.....”, h.17 – 18.

⁴ Tipologi lain, ekonomi sebagai panglima (ESP), aktor: Pasar (pengusaha), mekanisme: Kekuasaan ekonomi, ideologi : liberal; kemudian tipologi moral sebagai panglima (MSP), aktor : komunitas lokal

analisis *rent-seeking* atau "R-S", yang dikemukakan Guido Ashoff (1989)⁵. Analisis "R-S" berguna untuk memahami politik, peran negara, pembangunan ekonomi (*development*) yang dengan sengaja mendorong /memberikan toleransi meluasnya praktek – praktek yang bertujuan mengekang kompetisi pasar, dengan alasan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Sebagai akibat meluasnya paraktek-praktek tersebut muncullah sejumlah *rent* yang dinikmati oleh negara atau sekelompok aktor ekonomi yang didukung atau berkolusi dengan negara c.q. pemerintah yang berkuasa; ataupun oleh sektor ekonomi yang diupayakan berkembang secara pesat relatif dibandingkan dengan lainnya.

Jenis analisa yang lain adalah mengenai hubungan antara akumulasi kapital dengan kekuasaan. Dalam analisis ini akumulasi kapital terjadi karena mereka memiliki kekuasaan, kekuasaan menjadi modal utama berjalannya suatu bisnis. Analisis ini dikemukakan Chatib Basri (1998).

Konsep, teori/perspektif tersebut di atas, digunakan dalam membaca data dalam penelitian ini dan dipaparkan pada bagian berikut ini.

Pola – Pola Respon Militer terhadap Gerakan Prodemokrasi

Respon militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung bersifat monolitik yaitu dalam bentuk represif. Bentuk represif dari yang bersifat langsung

(rekryut), mekanisme : kekuatan rakyat, ideologi : populis. Lihat, Mohtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), h. 78.

⁵ Guido Ashoff (1989), "Rent-Seeking A New Concept in the Economic Theory of Politics and the Debate on Development Theory", *Economic*, Vol. 40, seperti dikutip Dorodjatan, "Pendekatan Ekonomi -- Politik....", h. 6.

sampai yang bersifat *subtle*. Atau dari metode represi sampai metode persuasi fisik. Bentuk represi langsung mencakup : intimidasi, penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan. Sedangkan bentuk *subtle*, mencakup : konfrontatif, intervensi, pendestruktoran, pelarangan melakukan aktivitas, pencekalan, dan penjagalan.

Respon represi langsung *pertama*, adalah intimidasi. Respon ini dilakukan tidak hanya pada gerakan prodemokrasi dari unsur partai politik nonpemerintah, seperti larangan mendukung atau memilih Mega sebagai ketua PDI. Intimidasi juga dilakukan terhadap aktivis mahasiswa yang melakukan demo, misal akan ditindak tegas. Juga merambah pada gerakan prodemokrasi dari unsur intelektual, misal dengan ancaman tidak akan ditolerir, jika mengkritik kebijakan nasional yang *menyangkut stabilitas nasional dan persatuan*. Hal ini menunjukkan pihak militer memandang berbeda pendapat dinilai sebagai sesuatu yang tabu karena mencerminkan konflik, konflik selalu dipandang sebagai agresi dan destruktif. Konflik sebagai sesuatu yang memiliki nilai lain yang penting bagi demokrasi, yaitu dinamika dan penghargaan terhadap perbedaan tidak diakui. Sehingga dianggap sebagai sesuatu yang akan mengancam stabilitas dan persatuan dan pelakunya diposisikan sebagai pelaku tindak kriminal. Tentunya hal ini, sudah tidak proporsional lagi, kritik mestinya di *counter* dengan wacana.

Kedua, penganiayaan dilakukan terhadap gerakan prodemokrasi aktivis mahasiswa, buruh dan tani dalam memperjuangkan hak-haknya, keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia, terutama ketika melakukan aksi demo. Penganiayaan, dalam

operasionalnya bisa berupa penembakan dengan peluru karet, pentungan dan pemukulan.

Ketiga, penculikan terutama dilakukan terhadap aktivis gerakan pro-demokrasi dari ISM seperti terhadap Desmon Mahaesa dari LBH Nusantara Jakarta, dan Pius dari ALDERA. Penculikan, tampak merupakan kegiatan intelijen, karena dari para korbannya memang diminta memberikan informasi yang sangat penting bagi militer untuk merancang tindakan berikutnya. Baik yang berupa operasi tempur, teritorial dan kamtibmas.

Keempat, represi fisik yang paling meumpuhkan adalah pembunuhan. Ada kecenderungan korban pembunuhan ini terutama dari gerakan prodemokrasi aktivis mahasiswa, buruh dan petani. Dalam operasionalnya penghilangan nyawa merupakan akibat penembakan peluru tajam pihak militer, maupun penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa para aktivis demokrasi. Kasus Tri Sakti, Marsinah, dan Nipah antara lain merupakan contoh-contoh tentang pola represi dengan penghilangan nyawa.

Represi dalam bentuknya yang bersifat *subtle*, yang *pertama*, konfrontatif. Respon ini terutama ditujukan terhadap partai politik nonpemerintah dan aktivis mahasiswa dan intelektual. Misalnya, ketika partai nonpemerintah menghendaki militer bersikap netral terhadap kekuatan partai politik, tetapi justru bersikap sebaliknya. Alasan yang muncul bervariasi, misalnya anggota ABRI adalah kader Golkar, ABRI memang menghendaki *single majority*, yang digiring ke Golkar adalah KBA, bukan ABRI aktif atau sebagai institusi, itu hanya pilihan strategis, dan

perlu diluruskan dengan melihat kembali pada undang-undang yang berlaku. Sikap konfrontatif militer secara konsisten ditunjukkan ketika berbagai tuntutan perubahan politik lain yang substansial dan menyangkut kebijakan. Seperti penolakan : diadakannya kepengurusan orsospol di desa, pemilu sebagai berfungsi melakukan perubahan, penilaian bahwa peran sospol ABRI banyak menimbulkan eksese sehingga perlu dibatasi hanya di MPR saja, dan reformasi total. Tetapi menjadi tidak konsisten , ketika yang dihadapi adalah individu. Misalnya, pada awalnya pencalonan Soerjadi sebagai DPP PDI dihalangi oleh pihak militer, tetapi ketika melihat Mega secara serius bersedia menjadi calon ketua, militer kemudian mendorong Soerjadi menjadi ketua. Begitu pula terhadap Mega yang diberi lampu hijau bagi awal pencalonannya sebagai ketua DPP, dan ketika terpilih secara *de facto*, pihak militer tidak mengakui. Hal itu mengisyaratkan, pihak militer dalam menghadapi berbagai dinamika politik akan selalu berhitung untung rugi bagi kepentingannya. Terhadap masalah kebijakan politik, militer cenderung konservatif, tetapi ketika menyangkut pribadi cenderung pragmatis - oportunistik.

Kedua, intervensi. Intervensi ini terutama dilakukan terhadap gerakan prodemokrasi partai nonpemerintah. Intervensi tidak sekedar terlihat pada seleksi utusan DPC/DPD ke konggres, tetapi terlibatnya aparat ditsospol pada konggres, bahkan pihak militer sampai membuat kriteria pencalonan ketua partai. Hal ini merupakan intervensi yang sangat berlebih - lebihan. Tentunya mudah ditebak agar ketua partai nonpemerintah yang terpilih bersedia dikooptasi dan bekerjasama dengan pihak militer. Dapat juga dimaksudkan untuk mengembangkan konflik

tidak efektifnya saluran formal dinilai sebagai berbau komunis. Pendeskreditan yang tidak rasional dan realistik ini, lebih merupakan upaya membuat opini publik agar masyarakat tidak simpatik terhadap gerakan prodemokrasi. Juga dapat dimaksudkan agar para aktivis prodemokrasi kehilangan keberanian dalam melakukan aktivitasnya. Namun dalam kenyataannya respon militer yang demikian, bersifat kontraproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa militer tidak melihat secara jernih kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam masyarakatnya.

Keempat, larangan untuk melakukan aktivitas. Larangan ini, terutama dikenakan bagi organisasi-organisasi yang berpotensi memiliki pengaruh yang luas karena memiliki basis sosial/dukungan yang besar. Atau bagi seseorang yang pandangan-pandangannya memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pendapat umum. Contoh pertama, larangan yang dikenakan pada Forum Demokrasi, karena pimpinannya Abdurrahman Wahid adalah Ketua PBNU yang merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar. Contoh kedua, larangan bagi Nasution, untuk memberikan ceramah di Kampus, atau datang ketempat di mana Presiden atau Wapres hadir.

Kelima, pencekalan. Pencekalan ini dikenakan bagi elit pembangkang terutama dari kelompok Petisi 50. *Keenam*, penjegalan. Penjegalan, misalnya dilakukan ketika Megawati menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua DPP PDI pada Kongres di Medan. Penjegalan dengan cara mempersulit Mega masuk ruang sidang karena tidak ada ijin, mempersulit keikutsertaan DPC pro-

Mega datang ke arena konggres dan membuat kisruh konggres, sehingga konggres gagal membuat keputusan.

Pola-pola respon represif militer terhadap gerakan prodemokrasi tersebut di atas, secara substansial cenderung sama antara militer yang masih aktif dengan kalangan purnawirawan yang tidak termasuk pembakangan elite, maupun antara faksi ABRI "hijau" dengan faksi ABRI "merah putih". Dalam respon konfrontatif (*subtle*) antara faksi "hijau" dengan faksi "merah - putih" memang ada kesan terdapat perbedaan tetapi sesungguhnya sebatas pada metode bukan pada substansi. Hal ini dapat dilihat dalam respon konfrontatif terhadap tuntutan agar militer bersikap netral tidak berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Militer aktif dalam faksi "hijau" cenderung merespon dengan keras, bahkan vulgar dengan menyatakan ABRI adalah kader Golkar, sekarang masih diperlukan *single majority*. Sedangkan faksi "merah putih" cenderung merespon secara lebih hati-hati sehingga tampak tidak tegas, misalnya dengan menyatakan libatlah peraturan perundang-undangan yang ada. Memang menurut peraturan yang ada militer mestinya bersama-sama dengan kekuatan sosial yang lain memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya tidak ada tanda - tanda militer hendak meninggalkan Golkar sebagai mesin politiknya dan menjalin kerjasama dengan kekuatan sosial lain tanpa diskriminasi. Hal ini bisa ditunjukkan ketika gerakan prodemokrasi mempermasalahkan eksistensi dwifungsi ABRI. Respon konfrontatif yang muncul

dari kalangan militer baik yang aktif-purnawirawan, faksi "hijau" – "merah-putih" adalah sama. Sikap mereka sangat tegas dan jelas bahwa yang boleh berubah dari dwifungsi adalah implementasinya bukan substansinya. Ini berarti, dalam pandangan militer dwifungsi sebagai sesuatu yang *built in*, tidak ada alasan apapun yang dapat diterima untuk menghapusnya atau menggiring militer ke barak. Militer memang tampak tetap ingin berpolitik, tetapi hal ini akan mempersulit militer dapat menjadi netral secara politik. Karena ketika berpolitik kepentinganlah yang menjadi sasaran utamanya, dapat saja melakukan pembenaran terhadap hal – hal yang tidak benar atau menyalahkan hal-hal yang benar demi mencapai kepentingannya. Misalnya hal ini dibuktikan alasan lain dari kalangan militer berpihak kepada Golkar, dikarenakan belum ada aliansi strategis yang lain.

Dengan demikian pengelompokan faksi "hijau" dan "merah-putih" cenderung merupakan wacana ketimbang sebagai fakta. Memang ketika munculnya duet Jenderal Faisal Tanjung (Pangab) dengan Jenderal Hartono (KSAD) yang kebetulan keduanya dekat dengan kalangan pesantren (Islam) yang kemudian dipandang sebagai mewakili simbol faksi "hijau" tidak lepas dari perubahan politik yang terjadi. Presiden Soeharto tampak sedang berusaha untuk mendekati Islam untuk dijadikan basis dukungan baru bagi kekuasaannya agar tidak semata-mata tergantung pada dukungan militer yang tampaknya mulai berusaha melepaskan diri dari kontrol politiknya. Sehingga rasional ketika Soeharto memilih orang – orang dekatnya dalam jabatan strategis militer yang sesuai dengan kepentingan politiknya adalah dari para jenderal yang berlatar belakang Islam/santri atau dekat dengan

ketika menghadapi krisis dan tuntutan reformasi pada tahun 1998. Oleh karena itu respon militer yang bersifat represif sulit dipungkiri senantiasa terkait dengan kepentingan politik militer dalam konstalasi politik nasional.

*Dimensi Kepentingan Politik dan Ekonomi Militer Dalam Merespon Gerakan
Prodemokrasi.*

Seperti dikemukakan pada bagian pengantar bab ini, asumsi yang dijadikan pegangan bahwa kepentingan politik dan ekonomi militer sebagai hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam arti kepentingan politiklah yang menentukan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu dalam dimensi politik sebenarnya didalamnya ada kepentingan ekonomi. Untuk itu perspektif ekonomi – politik politisisme atau PSP dengan teori-teori yang ada dalam lingkungnya terutama “R-S” dan “akumulasi kekuasaan sebagai kapital”, akan digunakan untuk membaca data penelitian. Melalui perspektif ini, maka analisis difokuskan untuk menunjukkan tiga aspek dari perspektif ekonomi – politik yaitu : (1) militer sebagai aktor (birokrat) yang dominan dalam politik juga berperan menentukan dalam ekonomi ; (2) militer dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan /politik ; dan (3) militer beridologi konservatif/statisme ketika menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan politik dan ekonomi.

Keterlibatan militer dalam politik pada 90-an semakin intens, bahkan berusaha keras untuk menjadi penentu dan tetap dominan dalam suksesi pada 1998.

Tes awal yang dilakukan militer dengan mendahului pecatlonan Wapres Pangab Jenderal Try Sutrisno tanpa dikonsultasikan lebih dahulu dengan Presiden Soeharto, maupun FKP dan FUD. Begitu pula ketika Munas Golkar 1993, militer berusaha menguasai DPD/DPC, meskipun akhirnya dari jalur-G yang terpilih (Harmoko). Tetapi hal ini sudah mengindikasikan bahwa militer ingin menguasai Golkar secara penuh, untuk memperluas dan mengembangkan kepentingan politiknya.

Keinginan untuk selalu terlibat dalam politik, tampak sangat kuat seperti terlihat pada respon konfrontatif terhadap pemikiran dari gerakan prodemokrasi yang mempertanyakan dwifungsi ABRI banyak membawa ekses. Bagi militer dwifungsi sebagai sesuatu yang bersifat *built in*, yang bisa dirubah hanya implementasinya bukan substansinya. Bahkan dalam diri militer ada keyakinan yang sangat kuat, bahwa dalam beberapa kejadian kritis dalam perjalanan bangsa terselamatkan karena adanya dwifungsi. Respon negatif ini menunjukkan bahwa militer memiliki dorongan yang sangat kuat untuk melindungi dwifungsi (kekaryaan) daripada melindungi Presiden Soeharto, meski di kalangan militer Soeharto sangat dihormati karena berjasa mengembangkan dwifungsi, sehingga militer memiliki akses yang penting dalam politik dan ekonomi. Hal ini tampak dari sikap militer yang tidak jelas (menggantung) ketika dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan Soeharto atau mendukung kekuatan reformasi yang menghendaki Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden. Dengan sikap tersebut, semakin memperkuat penilaian bahwa militer memang memiliki agenda dan kepentingan mereka sendiri yang tidak mudah dikontrol pihak lain. Hal ini disebabkan militer

Graha). YKEP juga bekerjasama dengan pengusaha bisnis perkayuan terbesar di Indonesia Bob Hasan pemilik PT Nusamba dengan bendera ITC. (*International Timber Corporation*). Alasan utama kerjasama dengan konglomerat untuk meningkatkan profesionalisme. Dari kalangan militer sendiri memang diakui, mereka lebih profesional dalam politik ketimbang mengurus bisnis. Untuk berbisnis secara mandiri mereka merasa harus banyak belajar. Kedekatan militer dengan konglomerat ini, membuktikan bisnis militer lebih berorientasi ke atas sulit diingkari. Melihat kenyataan ini, Pak Nas pada awal pertengahan 1990-an menghimbau perlunya militer mengembangkan kelas menengah untuk soko guru demokrasi dengan mengendalikan konglomerat demi terciptanya perekonomian rakyat. Namun himbauan itu tampak kurang direspon secara antusias, sehingga yang terjadi bisnis militer berkembang dengan pesat dan merambah kemana – mana. Bahkan ada perwira tinggi militer yang menyatakan awalnya bisnis militer hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sekarang sudah keterlaluan. Semua mau dikuasainya. Oleh karena itu bisnis militer lebih banyak berdampak negatif daripada positifnya. Dampak negatifnya seperti terjadinya kelas komprador penompang kapitalisme semu (*Ersatz Capitalisme*), korupsi dan *State Corporation*. Beredarnya 80% uang di Jakarta dan yang menguasainya hanya segelintir orang terjadi karena adanya iklim yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan *simbiosis mutualisme* antara penguasa dengan pengusaha. Penguasaan uang hanya terbatas pada segelintir orang, tergambar pada himbauan Presiden Soeharto kepada 57 konglomerat ketika

terjadi krisis moneter untuk ikut memperkuat rupiah. Kondisi yang demikian menyebabkan iklim usaha sarat kolusi antara penguasa dengan pengusaha .

Bisnis yang dikembangkan militer pada 1990-an adalah dalam iklim yang sarat dengan kolusi tersebut. Oleh karena itu sulit dibantah bisnis yang dijalankan militer yang diakuinya memang piawai dalam politik tetapi tidak profesional dalam ekonomi dan berkembang pesat melalui kerjasama dengan konglomerat dan menjadi kendala bagi pengembangan iklim berusaha yang sehat, merupakan cara bisnis yang lebih mengandalkan pada kekuasaan sebagai kapital. Cara memperoleh keuntungan ekonomi melalui kekuasaan tampak disadari dan dipahami betul oleh para perwira militer. Mereka memilih profesi militer dan mengembangkan karir militer cenderung bermotiv ekonomi. Sehingga di kalangan para perwira militer lebih suka berupaya untuk menduduki jabatan strategis yang mudah mendatangkan keuntungan ekonomi sebagaimana tercermin pada pelaksanaan kekaryaan (jabatan sipil: seperti Menteri, Dirjen, Sekjen, Ditsospol, Gubernur, Bupati, Walikota sampai Kepala Desa/Lurah, MPR, DPR, dan DPRD, Komisaris/Direktur BUMN, dll.). Adanya kecenderungan ini diakui Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah, yang dikenal sebagai petinggi militer yang vokal . Ia menyatakan "Sekarang orang pengingnya jadi komandan kodim, komandan korem, jadi bupati. Susah! Dan ini berpengaruh terhadap profesionalisme ABRI. Karena keadaannya begitu, ya akhirnya dijadikan alat politik, kaa? Nah, penyimpangan-penyimpangan itu yang saya coba bedah".⁶ Sundhaussen,

⁶ Wawancara Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah MPA, dalam Tabloid *Realitas*, Edisi 17, 23 Januari 1999, h. 16.

juga melihat keterlibatan militer dalam politik, menyangkut soal *power*, dan soal duit juga. Duit datang bersamaan dengan kekuasaan. Dan ini bukan cuma soal yang khas Indonesia, puluhan negara berkembang lainnya pun menghadapi hal yang sama. Peralihan kekuasaan ke pihak sipil tidak harus berarti kerugian besar pihak militer.⁷

Fakta di atas menunjukkan militer dalam melaksanakan bisnis mengandalkan kekuasaan sebagai modal. Dalam perspektif ekonomi – politik dikenal sebagai “R-S” atau “akumulasi kekuasaan sebagai modal utama bisnis”. Hal ini berarti mekanisme pelaksanaan bisnis oleh militer dilakukan dengan mekanisme kekuasaan/politik.

Mekanisme kekuasaan juga tampak dilakukan militer ketika menghadapi berbagai pemikiran, sikap maupun tuntutan gerakan prodemokrasi untuk memecahkan berbagai problema politik dan ekonomi. Berbagai penglihatan dari gerakan prodemokrasi tentang timbulnya berbagai kerusuhan sosial merupakan akibat kesenjangan sosial, ekonomi dan deskriminasi politik, justru militer menuding orang yang menghembuskan isu kesenjangan tersebut dinilainya sebagai pemicu kerusuhan. Begitu pula ketika intelektual kampus mempersoalkan masih berkembangnya praktek monopoli, oligopoli dan kartel, pihak militer meresponnya secara tidak jelas /tidak transparan dan secara umum. Respon yang tidak transparan dan secara umum terlihat ketika menanggapi tentang penyebab krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997, di kalangan militer berkembang dua pendapat. Pertama, sebagai akibat operasi intelijen ekonomi asing untuk menyerang Indonesia.

⁷ Wawancara Ulf Saundhaussen, dalam *Tiraz*, No.4/Thn.I/23 Februari 1995, h.48.

Kedua, sebagai akibat kultural, yaitu tidak konsistennya mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi. Pendapat pertama terkesan mencari kambing hitam dan faktor penyebabnya bersifat eksternal, sedangkan yang kedua mengakui karena telah terjadi distorsi prinsip-prinsip ekonomi dan penyebabnya bersifat internal. Pendapat yang kedua yang lebih akurat dan tampak mengakui "rasionalitas politik mengatasi rasionalitas ekonomi".

Tuntutan gerakan prodemokrasi tentang perlunya kenaikan upah buruh dan turunkan harga yang sering diakhiri dengan kerusuhan, militer menghadapinya dengan mengedepankan fungsi keamanan, fungsi sosial – politiknya tidak tampak digunakan. Militer kemudian meresponnya dengan mendeskreditkan sebagai kerusuhan yang mengarah pada SARA, ditanggapi oleh kepentingan politik tertentu. Bahkan dalam kasus Marsinah, Kodim-pun melakukan FHK dan BAIS juga turun tangan untuk ikut mengatasinya. Mekanisme kekuasaan sebagai cara untuk mengatasi masalah politik dan ekonomi diakui oleh Mayjen Agus Wirahadikusumah. Agus menyatakan bahwa permasalahan politik menggunakan tentara. Permasalahan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam yang ditolak rakyat, menggunakan tentara. Persepsi ancaman sesama warga itu sebenarnya tidak ada.⁸ Padahal masalah sulitnya menaikkan upah buruh tidak lepas karena banyak biaya siluman bersifat kolusif yang harus dikeluarkan pengusaha yang besarnya sekitar 30% dari biaya produksi. SPSI juga melakukan pungutan terhadap buruh sebesar 30% melalui sistem *anemer* masuk

⁸ Wawancara Mayjen Agus Wirahadikusumah : "Operasi Naga Hijau Hasil Persepsi Intelijen", *Tempo*, 20 Februari 2000, h. 25.

ke tangan penguasa militer. Muchtar Pakpahan mencontohkan di Medan kolusi terjadi antara preman, militer dan pengusaha. Sehingga sesungguhnya militer dapat merespon secara persuasif melalui fungsi sosial – politiknya dalam upaya mengatasi perburuhan tersebut.

Begitu pula terhadap gerakan prodemokrasi dari kaum petani yang mempertahankan dari ancaman runtuhnya keamanan ekonominya dari akibat pembangunan fisik dan re akumulasi kapital yang banyak membutuhkan tanah, militer meresponnya secara represif dan pada umumnya dalam bentuk kekerasan /penganiayaan bahkan dengan penembakan peluru tajam, seperti pada kasus Nipah. Para purnawirawan menilai kasus Nipah terjadi karena adanya instrumentalisasi militer hanya menjalankan keputusan birokrasi pemerintahan dan kepentingan tertentu. Ini berarti militer menggunakan upaya mengatasi masalah ekonomi petani dengan mekanisme kekuasaan.

Kemudian terhadap tuntutan perubahan politik – ekonomi yang diajukan gerakan prodemokrasi tahun 1990-an, militer tampak merespon secara represif. Tuntutan perubahan politik mencakup perubahan kearah multi partai, demokrasi parlementer, pengawasan terhadap pemilu, pemilu sebagai sarana perubahan, percepatan pemilu, desentralisasi kekuasaan, perubahan lima paket undang-undang politik, peninjauan kembali dwifungsi ABRI karena banyak melahirkan eksekutif bagi demokratisasi, penghapusan *floating mass* sampai pada pergantian kepemimpinan nasional. Sedangkan tuntutan perubahan ekonomi mencakup kenaikan upah buruh, turunkan harga, penghapusan kesenjangan sosial-ekonomi, penghapusan praktek

Mayjen Syamsir Siregar dari BIA dan Letjen Muhammad Ma'ruf dicopot dari jabatannya, karena penilaiannya tentang bahaya ABRI kuning.

Ideologi statisme dikalangan militer juga terlihat ketika Harmoko sebagai Ketua MPR atas desakan mahasiswa menyatakan Presiden Suharto agar mundur, pihak militer memandangnya sebagai inkonstitusional. Bisa saja militer beralasan kalau setuju, khawatir dianggap melakukan kudeta. Tetapi yang jelas militer baru mengambil sikap ketika mereka sudah tidak mampu untuk mengatasi desakan kekuatan reformasi. Militer tampak sangat hati-hati untuk tidak mengambil inisiatif dalam melakukan perubahan, menunggu momentum yang paling menguntungkan, sehingga tidak akan menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Ini terlihat dari sikap militer pada akselerasi perubahan politik lebih pada posisi *wait and see*. Sikap ini tentunya paling menguntungkan untuk melindungi kepentingan mereka. Pandangan yang melihat tidak adanya inisiatif militer dalam peran politiknya menghadapi perubahan politik yang sangat cepat, karena terbiasa didikte oleh Presiden sebagai patron, tampak tidak cukup kuat. Karena militer ketika itu sangat solid.

Statisme juga tampak pada prinsip yang dianut militer agar reformasi dilakukan secara gradual, yang berseberangan dengan kehendak gerakan prodemokrasi yang menghendaki reformasi total, disangsikan akan mampu membawa perubahan politik dan ekonomi yang lebih demokratis. Karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun rezim Orba, sudah mengakar begitu kuat terutama pada aparat pemerintah, termasuk militer maupun mesin politiknya,

ekonomi¹¹, tidak berlaku bagi kasus militer Indonesia. Sebab yang terjadi di Indonesia militerisme sebagai bagian sentral masyarakat karena perannya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengusaha (konglomerat) dan penjamin stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi.

¹¹ Sulowu (Editor), *Masyarakat Pasca Militer.....*, h.63 -64.

problema politik dan ekonomi, militer meresponnya dengan mengedepankan represi. Respon dengan mekanisme ekonomi yang sangat dimungkinkan melalui peran sosial – politiknya (kekaryaan) tidak digunakan. Penggunaan mekanisme kekuasaan baik dalam menjalankan bisnis maupun memecahkan problema ekonomi, menunjukkan kecenderungan kuat bahwa militer melakukan “R-S” dan “akumulasi kekuasaan sebagai modal utama berbisnis”.

Ketiga, militer dalam menghadapi tuntutan gerakan prodemokrasi tentang perlunya perubahan politik dan ekonomi pada 1990-an untuk mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis maupun untuk bisa secara cepat keluar dari krisis ekonomi meresponnya secara represif. Kalangan militer menhendaki perubahan harus secara gradual dan kultural. Respon yang demikian, mencerminkan ideologi militer yang konservatif/statisme dalam menghadapi tuntutan perubahan politik dan ekonomi. Dengan demikian penjelasan dari perspektif ekonomi – politik politisisme tersebut menunjukkan kecenderungan militer melakukan respon negatif terhadap gerakan prodemokrasi karena untuk melindungi kepentingan politik yang berimbas pada terlindunginya kepentingannya ekonominya (bisnisnya).

Implikasi

Temuan sebagaimana dipaparkan pada bagian kesimpulan di atas, yaitu adanya kecenderungan di kalangan militer merespon secara negatif (represif) terhadap gerakan prodemokrasi adalah dalam upaya melindungi kepentingan

menunjukkan militer merupakan bagian sentral bukan disebabkan aspek geopolitik melainkan menjadi bagian sentral karena dalam rangka melindungi kepentingan politik dan ekonominya dan memberikan rasa aman dan nyaman para pengusaha serta karena menjadi penjamin stabilitas politik bagi kelancaran pembangunan ekonomi.

Ketiga, temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya penjelasan alternatif dalam bidang kajian militer dan politik. Sumbangan itu khususnya berupa penjelasan bahwa respon represif terhadap gerakan prodemokrasi karena untuk melindungi kepentingan militer dalam bidang politik dan ekonomi. Pandangan – pandangan yang ada melihat represi militer karena untuk mengamankan hubungan patron-klien (*Neopatrimonial*) atau sebagai konsekuensi dari karakteristik organisasi militer yang hirarkhis dengan sistem komandonya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adiwijoyo, Suwarno, "Mengapa TNI Tidak Kembali Ke Barak?", dalam Kunarto (Penyunting), *Meremung Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1999).
- Anggoro, Kusnanto, "Gagasan Militer mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani, dan Transisi Demokratik", Rizal Sukma, J. Kristadi (Penyunting), *Hubungan Sipil - Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia : Persepsi Sipil dan Militer*, (Jakarta : CSIS, 1999).
- Anwar, Dewi Fortuna, "Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik", Syarofin Arba MF, ed., *Demitologi Politik Indonesia*, (Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 1998).
- Bhakti, Ilvar Nusa, (Koordinator), *ABRI dan Partai Politik : Pasang Surut Keterlibatan Militer dalam Kehidupan Kepartalan di Indonesia*, Laporan Penelitian, (Jakarta : PPW - LIPI, 1999).
- Budiman, Arief, "Peranan Mahasiswa sebagai Intelegensi", Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Penyunting), *Cendekiawan dan Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1984).
- Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan : Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, (Jakarta : Yayasan Padi dan Kapas, 1991).
- Bresnan, John, *Managing Indonesia : The Modern Political Economy*, (New York : Columbia University Press, 1993).
- Brouchier, David, "The 1950-an in New Order Ideologi and Politics", Bourchier, David, dan John Legge, eds., *Democracy In Indonesia 1950s and 1990s*, (Australia : Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994).
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).
- Crouch, Harold, "Dwifungsi ABRI dan Demokratisasi", dalam Selamat Ginting, et.al., (eds.), *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung: Kerjasama Dharmapena Nusantara dengan Mizan, 1997).

- Eko, Sutoro, (Editor), *Masyarakat Pascamiliter : Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*, (Yogyakarta : IRE bekerjasama dengan Pact Indonesia, 2000).
- Farling, Ian Mac, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces: Military Politics in Indonesia*, (Australia: Australian Defence Studies Centre, 1996).
- Fatah, R. Eep Saifulloh , *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Finer, S.E., *Comparative Government*, (New Zealand : Penguin Books, 1985).
- Goodman, Lois W. , "Peran Militer di Masa Lalu dan Sekarang", Diamond, Larry, Plattner, Mare F. (Ed.), *Hubungan Sipil - Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).
- Habib, A. Hasnan , "ABRI dan Demokratisasi Politik", dalam Ginting, Selamat, et al., eds., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung : Dharmapena Nusantara dan Mizan, 1997).
- Hamid, Syarwan , "Peran Sosopol ABRI", dalam Ginting, Selamat, et al., eds., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung : Dharmapena Nusantara dan Mizan, 1997).
- Hamid, Syarwan , "Mewadahi Peran Serta Politik Masyarakat", dalam: Syarofin Arba MF, eds., *Demitologi Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1998).
- Haryanto, Ariel , "Bahasa Dan Kuasa : Tatapan Posmodernisme", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (eds.), *Bahasa Dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung : Mizan, 1996).
- Hikam, Muhammad AS , *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Hikam, Muhammad AS , *Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1999).
- Hill, Hal, *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, (Australia: Allen & Unwin Pty.Ltd., 1994).
- Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru*, (Bandung :Rosda Karya, 2000)

- Jackson, Karl D., "Bureaucratic Polity : A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia", dalam : Jackson, Karl D. and Pye, Lucian W., eds., *Political Power and Communication in Indonesia*, (Berkeley : University of California Press, 1978).
- Janowitz, Morris, *Military Conflict : Essays in the Institutional Analysis of War and Peace*, (Beverly Hills: SAGE Publications, 1975).
- Juliantara, Dadang, "Politik Perizinan, Gerakan Massa dan Demokrasi", dalam : Hairus Salim HS dan Anggar Jati Wijaya, (eds.), *Demokrasi dalam Pasungan : Politik Perizinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Forum LSM-LPSM, 1995).
- Kadi, Saurip , *TNI-AD : Dahulu- Sekarang, dan Masa Depan*, (Jakarta : Grafiti, 2000).
- Lane, Max, "Politik Massa dan Perubahan Politik di Indonesia", dalam Arief Budiman, Hartley, Barbara, Kingsbury, Damien (Penyunting), *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Terj. Endi Haryono, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2000).
- Lev, Daniel S., "Politik Indonesia Tahun 1950-an dan 1990-an", Wawancara , dalam F.X. Baskara T. Wardaya (Ed.), *Mencari Demokrasi*, (Institut Studi Pusat Informasi, 1999).
- Liddle, William, "Perjuangan Demokrasi Tahun 1990-an", Wawancara, dalam FX Baskara T. Wardaya (Ed.), *Mencari Demokrasi*, (Institut Studi Pusat Informasi, 1999).
- Mackie, J.A.C., "Pemilikan dan Kekuasaan di Indonesia", Tanter, Richard dan Young, Kenneth, eds., *Politik Kelas Menengah Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1996).
- MacIntyre, Andrew, *Business and Politics in Indonesia*, (Australia : Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin, 1990).
- Mas' oed, Mochtar , *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES, 1989).
- Mas' oed, Mochtar , *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994).

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1996).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Muhaimin, Yahya A., *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1982).
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta : LP3ES, 1991).
- Muhaimin, Yahya A., "Aktualisasi Konsep Tut Wuri Handayani", dalam Ginting, Selamat, et al., eds., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung : Dharmapena Nusantara dan Mizan, 1997).
- Muna, M. Riefqie, "Persepsi Militer dan Sipil tentang Dwifungsi : Mengukur Dua Kategori Ganda", Rizal Sukma, J. Kristadi (Penyunting), *Hubungan Sipil - Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia : Persepsi Sipil dan Militer*, (Jakarta : CSIS, 1999).
- Nasution, Adnan Buyung , *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Grafiti, 1995).
- Nordlinger, Eric A., *Militer dalam Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Prasetyo, Eko , "Dari Elitisme Menuju Populisme : Pilihan Strategis Gerakan Mahasiswa Indonesia Era '90-98", Epilog dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Mahasiswa Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta : Kerjasama Pustaka Pelajar dengan INSIST, 1999).
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, (London : Routledge, 1995).
- Surbakti, Ramlan , *Perbandingan Sistem Politik*, (Surabaya: Mecphiso Grafika, 1984).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

- Sumitro, *Sukses Militer dan Mahasiswa*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1999).
- Sundhussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, (Jakarta : LP3ES, 1986).
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer : Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1992).
- Susanto S.J., Budi dan Supriatna, A.Made , *ABRI: Stasat Kebudayaan 1945-1995*, (Yogyakarta : Kerjasama Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1995).
- Stephan, Alfred, *Militer dan Demokratisasi, Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Amerika Latin*, (Jakarta : Grafiti Pres, 1996).
- Uhlir, Anders, *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson Drawing among Indonesian Pro-Democracy*, (Sweden : Lund University, 1995).
- Uhlir, Anders, *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1997).
- van Langenberg, Michael, "Negara Orde Baru : Bahasa : Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan idi Subandy Ibrahim, (Editor), *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Mizan : Bandung, 1996).
- Vatikiotis, Michael; Swarz, Adam, "Kejatuhan Soeharto dan Kebangkitan Rakyat Indonesia : Menengok Hari-hari Terakhir Soeharto di Istana", Imam Baihaqi (Pentunting), *Soeharto Lengser : Perspektif Luar Negeri*, (Yogyakarta : LKIS, 1999).

B. JURNAL

- Abar, Akhmad Zaeni , "Kebebasan Pers , Kekocewaan Masyarakat dan Keperkasaan Negara : Studi Sejarah Pers Awal Orde Baru, 1966 – 1972, *Prisma* 4, 1994.
- Habari, "Antara Status-Quo dan Pembaruan Menjelang Sidang Umum MPR 1998", *Analisis*, Th. XXVII, No.2, 1998.
- Crouh, Harold, "Pasca Angkatan 1945 :Militer dan Politik di Indonesia", *Prisma* 8, 1986.

Markus Besar ABRI, "ABRI dan Reformasi: Pokok-Pokok Pikiran ABRI tentang Reformasi Menuju Pencapaian Cita-Cita Nasional", Rangkeman Eksekutif, Jakarta, Juni 1998.

Markus Besar ABRI, *TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*, (Jakarta : Jasa Bumi, 1999).

Said, Selim, "Kepemimpinan Politik TNI/ABRI dalam Perspektif Sejarah", Subroto, Djoko, Suroso, Untung, Armawi, Armaid (Akademi Militer), Penyunting, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998).

Sekolah Komando Angkatan Darat, *ABRI dan Agenda Perubahan*, (Jakarta : Aditoya Media, 1999).

C. MAKALAH

Nuryanto, F., "Macam Dan Penggunaan Inferensi", Makalah Penataran Metodologi Penelitian *Content Analysis* Program Antar Semester Tahun 1991 Pusat Penelitian IKIP YOGYAKARTA, 24 Juni 1991.

Siahaan, Hotman, "Anarki" sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi di Pedesaan, Makalah Seminar Anarki, Represi, dan Demokrasi: Reformasi Politik Indonesia Pasca Soeharto, Dies Fisipol UGM, Yogyakarta 19 September 1998.

Sparringa, Daniel, "Dari Sebuah 'Panggilan' ke 'Kembali ke Barak Sekarang' : Sebuah Taksonomi Paradigma Intelektual Indonesia tentang Dwifungsi ABRI", Makalah disampaikan pada Acara Dialog Nasional dengan Tema "Aktualisasi Arah dan Tujuan Reformasi Pembangunan Bangsa" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Airlangga, BKS-IKAPTISI, ILUNI-UI, KAGAMA dan IA-ITB, Jakarta 2 November 1998.

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

- Wawancara Bambang Widjojanto, "LSM Dituduh Bermasalah ? Ah ... Itu Sudah Biasa", *Tempo Interaktif*, Edisi 37/I, 09 Nopember 1996, Vol.II, September 1996 – Februari 1997.
- Wawancara Budiman Sudjatmiko, "Mereka Tak Pernah Bisa Membuktikan Kami Makar", *Tempo Interaktif*, Edisi 42/I, 14 Desember 1996, Vol.II, September 1996 – Februari 1997.
- Wawancara Syarwan Hamid, "PRD Bukan Dalang Kerusuhan 27 Juli", *Tempo Interaktif*, Edisi, 42/I, 14 Desember 1996, Vol.II, September 1996 – Februari 1997.
- Wawancara Sri Bintang Pamungkas, "Saya Menolak Pemilu 1997", *Tempo Interaktif*, Edisi 46/I, 11 Januari 1997, Vol. II< September 1996 – Februari 1997.
- Wawancara Mayor Jenderal Hari Sabarno, *Gatra*, 8 Maret 1997.
- Wawancara Harold Crouch, "Kontradiksi dalam Dwifungsi", *Tempo Interaktif*, Edisi 45/II, 10 Januari 1998, Vol. VI Desember 1997 – Februari 1998.
- Wawancara Daniel Sparringa, "Soeharto Akan Ditekan Oleh Kekuatan Massal untuk Mundur", *Tempo Inetraktif*, Edisi 47/II, 24 Januari 1998, Vol. VI, Desember 1997 – Februari 1998.
- Wawancara Letjen Hari Sabarno, "Yang Interupsi Calon Wapres Akan Di-Recall", *Tempo Interaktif*, Edisi 52/I, 28 Februari 1998, Vol. VI, Desember 1997 – Februari 1998.
- Wawancara Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letnan Jenderal TNI S. Bambang Yudhoyono, "Kami Tidak Ingin Berperan Overdosis", *Forum Keadilan*, Edisi Khusus "Ulang Tahun", 1998.
- Wawancara Jenderal (Purn.) R. Hartono, "Bicara Reformasi Lihat GBHN 1998", *Forum Keadilan*, No.25, Th. VI, 23 Maret 1998.
- Wawancara Munir, "Akan Lahir Soekarno dan Soeharto Baru", *Umat*, No. 18 Th. IV, 9 November 1998/19 Rajab 1419 H.
- Wawancara Soeyono, "Ada Duplikasi Komando antara Feisal dan Hartono", *Tempo*, 20 Februari 2000.

Wawancara Mayjen Agus Wirahadikusumah, "Operasi Naga Hijau Hasil Persepsi Intelijen", *Tempo*, 20 Februari 2000.

E. TABLOID

Hikam, Muhammad AS, "ABRI Pecah Karena Benturan Ideologi", *VOKAL*, No.04, Th.1, Edisi 7-13 Januari 1999.

"Kapuspen ABRI: Tak Ada Itu Penggusuran ABRI Hijau", *VOKAL*, No.04, Th.1, Edisi 7-13 Januari 1999, h.11.

Wawancara Syamsuddin Haris, *OPOSISI*, No.24, Th.I, 13 - 19 Januari 1999.

Wawancara Mayjen TNI Agus Wirahadikusuma MPA, *Realitas*, Edisi 17, 23 Januari 1999.

F. SURAT KABAR

"A.H. Nasution : Tuntutan Reformasi Tak Boleh Dilarang", *Bisnis Indonesia*, 18 April 1998.

"Dibalik Mundurnya HM Soeharto : Tutut Menangis Saat Bawa Pesan Gus Dur", *Kedaulatan Rakyat*, 28 Mei 1998.

"Dita Akui Dua Kali ke Australia", *Republika*, 1 Agustus 1996.

"Dwifungsi ABRI Wajib Ditelaah", *Kompas*, 20 Agustus 1998.

"Jangan Utak-Utik Kepemimpinan Nasional", *Media Indonesia*, 18 April 1998.

"Kasus Marsinah : BAIS Terlibat Demi Citra Bangsa", *Kompas*, 17 Juni 2000.

"Kassospol ABRI Soal Sidang Istimewa MPR Harus Dipertimbangkan Secara Matang", *Kompas*, 8 Mei 1998.

"Mahkamah Militer Belum Mampu Tangkap Rasa Keadilan Rakyat", *Kompas*, 24 Nopember 1999.

"Pak Mitro dan Pemikiran Politiknnya", *Kompas*, 12 Mei 1998.

- "Pandangan Amerika tentang ABRF", Kompas, 17 Mei 1998.**
- "Pangdam Jaya : Jaringan Oposisi Berusaha Masuk Kampus , Para Rektor Diminta Waspada", Media Indonesia, 18 April 1998.**
- "Reformasi Konstitusional Ala Presiden Soeharto", Jawa Pos, 4 Mei 1998.**
- Said, Salim, "Reformasi di ABRI Mestinya Dilakukan Usai Perang Dingin", Yogya Post, 27 Mei 1998.**
- Samsuddin, "Dwifungsi ABRI : Teori Gen dan Kromosom", Kompas, 9 Nopember 1998.**
- "Syarwan Hamid : Kalau Perlu Mundur Jika Reformasi Gagal", Kompas, 16 Mei 1998.**
- Surbakti, Ramlan, "Diskursus – diskursus Demokratik", Kompas, 4 Oktober 1993.**
- Suryoladiprojo, Sayidiman, "Keselamatan dan Keamanan Negara serta TNI yang Mendapat Kepercayaan Rakyat", Republika, 3 September 1999.**
- "Tak Lama, Usia Kepentingan Politik dalam Gerakan Buruh", Kompas, 24 Juni 2001.**
- Liddle, R. William, "Menjawab Tantangan Masa Reformasi", Makalah yang dipersiapkan untuk Konferensi Indonesia's Road to Recovery II : Redefining Nationalism to Rebuild the Nation, Berkeley, CA, 27 Mei, dimuat dalam Kompas 8 dan 9 Juni 2000.**